

SEJARAH KOTA JAKARTA

1950 – 1980

Disusun oleh :

**Edi Sedyawati
Supratikno Rahardjo
Irmawati Marwoto Johan
G.A. Manilet – Ohorella**

59.83

wisata

SED

8

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1986 / 1987

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KOTA JAKARTA

1950 – 1980

Disusun oleh :

Edi Sedyawati
Supratikno Rahardjo
Irmawati Marwoto Johan
G.A. Manilet – Ohorella



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1986 / 1987

SHARAH KOTA JAKARTA

1950 - 1980

Disusun oleh
Eli Sedyaningrat
Saputrisno Kharjono
Ismawati Murnono Jaban
G. A. Manilal - Oronella

PENGANTAR

Karangan ini disusun sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1986/1987, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya berhubungan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0322/P/1986 tanggal 15 April 1986. Karangan yang berjudul *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980* ini disusun atas dasar Surat Perjanjian Kerja nomor 013/IDSN/VI/1986, yang ditandatangani oleh Drs. Anhar Gonggong (pemimpin proyek IDSN) sebagai pihak pertama, dan Dr. Edi Sedyawati (penanggungjawab penelitian dan penulisan naskah/ sebagai pihak kedua.

Tim penyusun karangan ini terdiri dari empat orang, yaitu Edi Sedyawati, Supratikno Rahardjo, Irmawati Marwoto Johan dan G.A. Manilet-Ohorella. Edi Sedyawati bertindak sebagai koordinator, pengarah penelitian dan penulisan, serta penulis Bab I. Supratikno Rahardjo menyusun seluruh Bab II berkenaan dengan kependudukan. Irmawati Marwoto Johan menyusun seluruh Bab III berkenaan dengan segi fisik dalam perkembangan kota Jakarta. G.A. Manilet-Ohorella menyusun seluruh Bab IV yang menggambarkan berbagai peristiwa dan tempat penting di Jakarta.

Masing-masing penulis bertanggung-jawab atas bagian yang ditulisnya, namun kepaduan dari karangan ini sebagai keseluruhan adalah tanggung jawab koordinator. Selanjutnya koordinator bersama Sdr. Supratikno Rahardjo melakukan penyuntingan redaksional atas keseluruhan karangan ini.

Mengingat waktu yang terbatas (surat perjanjian kerja di-tanda-tangani pada 20 Agustus 1986), maka penelitian dan penulisan ini semata-mata bersandar pada data yang telah dihasilkan oleh pihak lain, baik yang tertuang dalam karangan-karangan yang telah diterbitkan maupun yang berupa laporan-laporan dan data yang terdapat di lingkungan terbatas. Survei lapangan yang khusus untuk penelitian ini tidak dilaksanakan. Namun demikian mudah-mudahan karangan ini ada manfaatnya sebagai perangkum dari keterangan yang tersebar.

Jakarta, April 1987
Edi Sedyawati
(koordinator penelitian)

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel, Grafik, dan Peta	ix
Keterangan Singkatan	xiii
 BAB I	
Gambaran Umum Permasalahan	1
Oleh: Edi Sedyawati	
1. Pembatasan Pokok Bahasan	1
2. Latar: Jakarta Sebelum 1950	7
2.1. Pemukiman Sederhana di Zaman Prasejarah	8
2.2. Pemukiman terkoordinasi sekitar zaman Tarumanagara	10
2.3. Kota Pusat Perdagangan	13
2.4. Kota Pusat Kekuasaan	16
Bab II	20
Penduduk DKI Jakarta 1950–1980	
Oleh: Supratikno Rahardjo	
1. Gambaran Umum Wilayah DKI Jakarta	20
1.1. Letak dan Keadaan Geografis	20

1.2. Perkembangan dan Pembagian Wilayah	21
2. Penduduk DKI Jakarta dan Pertumbuhannya	23
2.1. Masalah Penjelasan Pertumbuhan Penduduk	23
2.2. Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta	27
2.3. Komposisi Umur dan Jenis Kelamin	40
2.4. Status Perkawinan, Kelahiran dan Kematian	43
2.5. Pertumbuhan Angkatan Kerja dan Lapangan Pekerjaan	50
2.6. Pendidikan dan Pekerjaan	54
3. Migrasi	60
3.1. Migrasi dan Urbanisasi	60
3.2. Migrasi di Jakarta	62
3.3. Peranan Kaum Migran	69
4. Kebijakan Kependudukan	75
4.1. Keluarga Berencana	77
4.2. Transmigrasi	80
4.3. Administrasi Kependudukan	82
4.4. Pengembangan Wilayah Jabotabek	84
5. Tinjauan Masalah	88
Bab III	
Segi-segi Fisik dalam Perkembangan Kota Jakarta 1950—1980	92
Oleh: Irmawati Marwoto Johan	
1. Penataan Wilayah Jakarta: Tinjauan Umum	92
2. Perkembangan Kota Jakarta 1950—1960	97
2.1. Tanah dan Penduduk	97

2.2. Prasarana Umum	101
3. Perkembangan Kota Jakarta 1960–1970	102
3.1. Masalah Yang Timbul	103
3.2. Prasarana Umum	105
4. Perkembangan Kota Jakarta 1970 – 1980	117
4.1. Pengembangan Wilayah	117
4.2. Pengembangan Prasarana Umum	123
5. Rangkuman	135
 Bab IV	
Berbagai Peristiwa dan Tempat Penting di Jakarta 1950 – 1980	137
Oleh: G.A. Manilet – Ohorella	
1. Peristiwa-peristiwa Penting	137
2. Fasilitas Rekreasi dan Pendidikan Massa	157
2.1. Ancol	159
2.2. Kebon Binatang	161
2.3. Taman Ismail Marzuki	162
2.4. Planetarium	163
2.5. Tugu Monas (Monumen Nasional)	164
2.6. Taman Mini Indonesia Indah	167
2.7. Fasilitas-fasilitas Lain	169
 Daftar Pustaka	 180
Lampiran	

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN PETA

	Halaman
1. Pertumbuhan dan Komposisi Penduduk (1941–1980) :	
Tabel 1. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta Tahun 1961, 1971 dan 1980.....	22
Tabel 2a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta Tahun 1941–1980	29
Tabel 2b. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta Tahun 1941–1980 (per periode).....	32
Tabel 3. Penduduk DKI Jakarta dan Pertumbuhannya Pada Tahun 1961, 1971 dan 1980 (ribuan).....	33
Tabel 4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta dalam PELITA I, II, dan III Berdasarkan Registrasi.....	35
Tabel 5. Tingkat Pertambahan Penduduk DKI Jakarta dan Indonesia 1961–1980 ...	36
Tabel 6. Pertambahan Penduduk Kota di Indonesia Tahun 1961–1971 (Kota-kota	

	yang Mempunyai Penduduk Lebih dari 100.000 Pada Tahun 1971)	37
Tabel 7.	Urutan Jumlah Penduduk 50 Kota Tahun 1980 dan 1971, dan Perkembangan Penduduk di 30 Kotamadya di Indonesia Tahun 1971 dan 1980...	38
Tabel 8.	Penduduk DKI Jakarta Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1971 dan 1980.....	41
Tabel 9.	Penduduk DKI Jakarta Berumur 10 Tahun Keatas Pada Sensus 1971 dan 1980 Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan.....	46
Tabel 10.	Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun Keatas Pada Sensus 1971 dan 1980 Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan (persen).....	48
Tabel 11.	ASFR dan TFR di DKI Jakarta Periode Tahun 1967-1979.....	49
Tabel 12.	Pertumbuhan Angkatan Kerja di DKI Jakarta Tahun 1971-1980.....	52
Tabel 13.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 1971-1980.....	53
Tabel 14.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1971-1980.....	55
Tabel 15.	Rasio Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Sekolah di DKI Jakarta Tahun 1980.....	56
Tabel 16.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Lapangan Kerja.....	57
Tabel 17.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Pekerjaan.....	59

Tabel 18.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama	60
2. Migrasi (1961–1980) :		
Tabel 19.	Taksiran Penduduk Jakarta Berdasarkan Sukubangsa Pada Tahun 1961 . . .	64
Tabel 20.	Jumlah dan Persentase Pendatang Ke DKI Jakarta Selama 10 Tahun antara 1961–1971 dan antara 1971–1980 Menurut Daerah Asal.	66
Tabel 21.	Migran Selama Hidup Di DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 1971–1980 . . .	68
Tabel 22.	Migran dan Non-migran yang Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Di Jakarta Tahun 1971 . . .	74
3. Kebijakan Kependudukan (1971–1980) :		
Tabel 23.	Persentase Pencapaian Target Menurut Propinsi dan Tahun Penerimaan	79
Tabel 24.	Rata-rata Umur Akseptor Menurut Propinsi dan Tahun Penerimaan	80
Tabel 25.	Pengiriman Transmigran Asal DKI Jakarta (1972–1977)	82
Tabel 26.	Pendatang Dari Luar DKI Jakarta 1976–1980	83
Tabel 27.	Distribusi Penduduk JABOTABEK Tahun 1971–2065 Berdasarkan Daerah Pengembangan.	87
4. Segi-segi Fisik dalam Perkembangan Kota (1969–1980) :		
Tabel 28.	Perkembangan Areal Pertanian DKI Jaya 1969–1980 (dalam hektar)	124

Tabel 29.	Perkembangan Petani dan Tanaman Anggrek Di DKI Jakarta 1969–1980 .	125
Tabel 30.	Banyaknya Sekolah Umum dan Kejuruan di DKI Jakarta 1969–1980.....	130
Tabel 31.	Banyaknya Gedung Sekolah Umum dan Kejuruan di DKI Jakarta 1969–1980.....	131
Tabel 32.	Banyaknya Murid Pada Sekolah Umum dan Kejuruan di DKI Jakarta 1969 – 1980.....	132
Tabel 33.	Perkembangan Perbandingan Rumah Permanen, Semi Permanen dan Sementara di DKI Jakarta Tahun 1971–1980.....	134
 5. Distribusi Penduduk, Perkembangan Kota, Rekreasi dan Pendidikan Massa: Grafik dan Peta.		
Grafik 1.	Piramida Penduduk DKI Jakarta Tahun 1971 dan 1980.....	44
Grafik 2.	Distribusi Penduduk DKI Jakarta Raya Menurut Umur, Jenis Kelamin dan Status Migrasi 1971	73
Grafik 3.	Pertambahan Jumlah Pengunjung Planetarium Jakarta 1972–1980.....	16.5
Peta 1.	Wilayah Jakarta dan Pusat-pusat Aktivitas (Tugu Monas sebagai Titik Pusat)	119
Peta 2.	Model-model Dekonsentrasi Terkelompok	121

KETERANGAN SINGKATAN

BKLH DKI Jakarta	: Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BPS	: Biro Pusat Statistik.
DMS DKI Jakarta	: Dinas Museum dan Sejarah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
IDSN	: Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
KMNKLH	: Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
KSS DKI Jakarta	: Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
LD FEUI	: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
LPEM FEUI	: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
LPUI	: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
PDIN-LIPI	: Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
PPPP t.t.	: Pusat Penelitian Pranata Pembangunan. : tanpa tahun.

BAB I

GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN

Oleh: Edi Sedyawati

1. PEMBATASAN POKOK BAHASAN

Banyak karangan yang telah ditulis mengenai Jakarta, baik yang bersifat tinjauan umum meliputi rentang waktu yang panjang ataupun segi permasalahan yang aneka ragam, maupun yang bersifat studi khusus mengenai salah satu masa ataupun segi. Sebuah bibliografi mengenai Jakarta telah disusun oleh Abdurrahman Surjomihardjo (1977c), meliputi karangan-karangan antara tahun 1900 dan 1969. Pokok-pokok masalah yang dikelompokkannya meliputi: 1) sejarah dan ilmu bumi; 2) arsitektur dan benda-benda peninggalan; 3) perencanaan dan pembangunan kota; 4) politik dan pemerintahan; 5) penduduk dan kemasyarakatan; 6) perekonomian; 7) bahasa dan kesusastraan; dan 8) kesehatan rakyat dan kedokteran. Seperti telah dikemukakan oleh penyusunnya, bibliografi tersebut belum lengkap benar (Surjomuhardjo 1977c:118). Namun demikian bibliografi tersebut sangat bermanfaat, khususnya bagi telaah yang kini dilakukan, sebagai petunjuk jalan awal ke arah sumber-sumber. Selanjutnya dicari sumber-sumber informasi yang terbit atau dihasilkan sesudah tahun 1969.

Judul yang diberikan bagi telaah yang sekarang ini adalah "Sejarah Kota Jakarta 1950—1980". Pokok ini dirasakan masih terlalu luas, sehingga perlu diadakan pembatasan. Sejarah kota dalam hal ini hendak dilihat secara khusus sebagai riwayat suatu pemukiman beserta penduduk yang membuat dan menghuninya. Unsur penduduk dapatlah dipandang sebagai unsur pokok dalam sejarah kota, pertama karena kota tak mungkin terjadi tanpa penduduk, dan kedua karena corak penduduk menentukan wajah kota. Bukanlah tanpa sebab bahwa J.T. Canter Visscher pada tahun 1861 menyusun bibliografi di mana tiga dari tujuh pengelompokannya berkenaan dengan penduduk. Ketujuh rubrik bibliografinya itu adalah: 1) luas wilayah karesidenan; 2) daerah-daerah sekitar Batavia; 3) kota; 4) gereja dan sekolah; 5) penduduk Kristen; 6) penduduk Cina; dan 7) penduduk pribumi (Surjomihardjo 1977c:117. 129). Ketiga golongan penduduk itu dirasanya perlu untuk diberi perhatian terpisah tentulah karena dalam kenyataan pada waktu itu memang ketiga golongan penduduk itu bisa *dilihat* dan *dihadapi* sebagai golongan-golongan yang terpisah satu sama lain. Keterpisahan itu bisa jadi tidak semata-mata terjadi secara alamiah, melainkan juga dipertegas oleh aturan kebijakan kependudukan dari pemerintah masa itu. Tempat tinggal penduduk diatur menurut resort untuk masing-masing golongan, dan masing-masing golongan diberi pimpinan sendiri (peta dalam Surjomihardjo 1977b:40; Lohanda 1985:6). Jumlah golongan penduduk yang dibedakan satu sama lain itu berbeda-beda penyebutannya dalam berbagai sumber dan dalam berbagai zaman. Sebuah catatan tahun 1673 misalnya, menyebutkan bahwa golongan-golongan penduduk itu adalah: orang Eropa, orang Cina, orang "Mardijkers", orang "Moor", Jawa dan Sunda, orang Bali, orang Melayu, dan orang budak belian (Surjomihardjo 1917c: 115-6). Penggolongan yang lebih muda pada masa kolonial itu, seperti diperlihatkan dalam sensus tahun 1936, adalah lebih sederhana, yaitu terdiri atas: orang pribumi, orang Eropa, orang Cina, dan orang "timur asing" lain (Lohanda 1984:57).

Karena pentingnya faktor penduduk dalam proses pertumbuhan kota, maka masalah kependudukan diajukan sebagai topik pertama dalam laporan ini. Dalam hal ini pengertian "penduduk" adalah suatu himpunan manusia yang meninggalkan suatu wilayah tertentu. Dimensi individu dalam hal ini tidak diperhatikan. Individu-individu yang muncul sebagai tokoh tidak diberi sorotan utama, melainkan hanya disebut secara sepintas dalam bagian yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Jakarta antara tahun 1950 dan 1980 (bab IV.1).

Dalam masa yang dibahas ini, 1950–1980, di mana Indonesia telah merdeka, tampak bahwa penduduk Jakarta tidak lagi dikelompok-kelompokkan berdasar ras dan sukubangsa. Ini adalah bagian dari kebijakan Pemerintah R.I. untuk menggalang persatuan bangsa. Ras dan sukubangsa tidak dijadikan variabel dalam pengumpulan data sensus penduduk yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik. Dapat diduga bahwa strategi penghimpunan data yang demikian ini didasari maksud untuk mencegah apa yang disebut "sukuisme", yaitu sentimen yang bersifat memperkembangkan rasa keterpisahan antar sukubangsa. Apabila seorang peneliti ingin mengetahui hal-hal yang bersifat etnik dari data sensus tersebut, maka ia bisa berusaha mendekatinya melalui variabel-variabel lain, seperti misalnya "bahasa yang digunakan sehari-hari", "tempat kelahiran", "nama ayah", "nama ibu", dan lain-lain. Untuk jangka waktu tertentu memang barangkali variabel-variabel tak langsung itu dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai golongan etnik. Namun pada masa kini dan yang akan datang, ketika perkawinan campuran semakin sering terjadi, dan bahasa daerah semakin kurang digunakan, hal itu menjadi semakin sulit dilakukan. Maka, hanya penelitian khususlah yang akan dapat menghasilkan data etnik.

Karena keterbatasan sumber-sumber itulah maka untuk topik kependudukan dalam penyajian laporan ini data golongan

ethnik hanya ditampilkan dengan mengutip taksiran Lance Castles yang berkenaan dengan data tahun 1961 (periksa tabel no. 19). Di samping itu golongan ethnik dari para pendatang baru pada masa 1961–1971 dan 1971–1980 hanya dapat di-kira-kira saja berdasarkan data mengenai propinsi asal dari para pendatang tersebut (periksa tabel no. 20).

Maka, mengikuti data sensus yang ada, deskripsi dari komposisi penduduk Jakarta diberikan dengan menampilkan variabel-variabel lain, bukan ethnik, seperti jenis kelamin, kelompok umur, status sipil, dan pendidikan. Deskripsi komposisi penduduk yang demikian itu memberikan gambaran mengenai potensi penduduk yang khususnya dapat dihubungkan dengan produktivitas dan mobilitas. Penganutan nilai-nilai, suatu pokok yang berkaitan erat dengan sifat ethnik, tidak dapat didekati dengan data tersebut. Hanyalah suatu penelitian khusus yang mendalam yang akan dapat menyingkap permasalahan heterogenitas budaya seperti yang terdapat di Jakarta ini.

Dalam laporan yang sekarang diajukan ini, penduduk Jakarta dilihat terutama sebagai suatu satuan yang tak terpecah oleh perbedaan budaya. Sebagai informasi dasar diberikan gambaran mengenai komposisi penduduk. Dalam deskripsinya dapat diketahui proporsi penduduk dilihat pada variabel-variabel yang telah disebutkan di atas. Dalam hal itu, status sipil dan jenis kelamin dapat mengacu ke keragaman peranan, sedangkan kelompok umur dan tingkat pendidikan dapat lebih dihubungkan dengan jenis-jenis pekerjaan. Gambaran-gambaran proporsi dalam data angkatan kerja dapat digunakan selanjutnya untuk melihat asosiasi antara dua variabel, misalnya antara variabel tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan utama seperti yang datanya tercantum pada tabel 18.

Di samping komposisi dan angkatan kerja, penduduk Jakarta juga dibahas kepadatan dan laju pertumbuhannya. Ini dihubungkan dengan tahapan-tahapan masa yang mengandung di dalamnya peristiwa-peristiwa sejarah tertentu, yang mungkin

merupakan sebab ataupun akibat dari naik-turunnya nilai kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepadatan ataupun laju pertumbuhan penduduk itu adalah migrasi masuk ke Jakarta. Masalah ini pun dibahas dalam laporan ini, untuk selanjutnya dihubungkan dengan kebijaksanaan kependudukan. Hal terakhir ini meliputi kebijaksanaan pemerintah yang berskala nasional, yaitu keputusan untuk menjalankan program Keluarga Berencana serta transmigrasi, maupun kebijaksanaan khusus yang diambil oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Ada dua arah dari kebijaksanaan khusus ini. Yang pertama adalah tindakan pembatasan, berupa keputusan gubernur yang menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup (SK 1970). Keputusan ini disangga oleh usaha-usaha penertiban administrasi kependudukan. Arah yang kedua berupa perencanaan kewilayahan yang menyangkut usaha-usaha perluasan wilayah serta pengembangan prasarana pemukiman.

Tuntutan perkembangan kependudukan, serta tuntutan fungsi Jakarta sebagai ibukota negara, membutuhkan pemenuhan prasarana dan sarana yang memadai. Hal inilah yang merupakan pokok bahasan kedua dalam laporan ini. Sarana yang ditampilkan meliputi administrasi kependudukan (II.4.3) dan penataan wilayah (III.1, III.2.1, III.4.1). Sarana yang berupa aparatur pemerintahan dalam kesempatan ini tidak dibahas. Tidak ditampilkannya pokok ini disebabkan semata-mata karena keterbatasan kesempatan pada pihak peneliti. Sesungguhnya, struktur birokrasi pemerintahan daerah DKI Jaya sangat penting untuk dibahas. Sungguhpun struktur dasar dari pemerintahan DKI Jaya itu sama dengan struktur pada propinsi-propinsi lain, mengikuti petunjuk dari pusat, yaitu Departemen Dalam Negeri, namun rupanya oleh kedudukannya yang khas sebagai ibukota para pengelolanya telah terdorong untuk menciptakan unsur-unsur tambahan dalam struktur dasar tersebut. Sebagai contoh dapat disebutkan pembentukan *Badan Perencanaan Pembangunan DKI* pada tanggal 21 Juli 1968, dalam masa

jabatan Gubernur KDKI Ali Sadikin. Bentuk ini ternyata menjadi model yang kemudian sejak tahun 1974 ditetapkan sebagai badan yang tak terpisahkan dari struktur organisasi Pemerintah Daerah, dan ini merupakan kebijaksanaan nasional (*Gita Jaya* 1977:7). Badan ini kemudian secara umum dikenal sebagai BAPPEDA, singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Contoh yang lain, yang dibentuk pada tahun yang sama, adalah *Dewan Kesenian Jakarta* (SK Gubernur KDKI Jakarta No. Ib.3/2/19/1968, 7 Juni 1968) yang sebagai penasehat gubernur dalam masalah-masalah kesenian dinyatakan dalam SK yang bersangkutan sebagai "satu-satunya badan kesenian/kebudayaan tingkat Daerah yang tertinggi untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta". Ini pun kemudian menjadi badan yang ditiru di daerah-daerah lain, meskipun tidak dileakkan secara tetap dalam struktur organisasi pemerintahan daerah untuk seluruh Indonesia.

Selanjutnya dalam laporan ini disajikan data mengenai prasarana yang diadakan di Jakarta, ditinjau dalam tahapan-tahapan dasawarsa. Dalam hubungan ini diperlihatkan pula bahwa perkembangan pembangunan di Jakarta banyak ditentukan oleh suatu "master plan" yang disusun untuk tahapan masa 1865-1985. Rencana induk ini berkenaan dengan perluasan serta penataan wilayah dalam hubungannya dengan tata guna. Dengan ini peruntukan penggunaan tanah memisahkan antara wilayah tempat tinggal dengan tempat rekreasi, industri, perkantoran dan lain-lain (IV.1), sehingga dengan itu hendak dicegah pembangunan yang kacau oleh penduduk. Hal ini disangga oleh peraturan perizinan berkenaan dengan pembangunan gedung-gedung. Bahkan penggunaan tanah untuk pemakaman pun diatur, baik status, pengelolaan, pengenalan makam tumpang, dan pembatasan jangka waktu penggunaan tanah makam (*Gita Jaya* 1977:214-5). Penggunaan tanah makam dibatasi hingga jangka sembilan tahun, dengan mempertimbangkan bahwa dengan jumlah kematian sekitar 160 orang per hari di

Jakarta diperlukan perluasan tanah makam minimal 10 Ha per tahun, sesuatu yang tak mungkin dibiarkan tanpa batas.

Dalam memenuhi fungsi pelayanan masyarakat prasarana-prasarana umum senantiasa dipelihara, ditambah, ataupun dibuat. Prasarana umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak maupun yang merupakan prasarana penanggulangan masalah, seperti misalnya penyediaan air minum dan penanggulangan banjir, diadakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Mengenai jenis-jenis prasarana dan segala keterangannya dapat diperiksa pada bagian III.2.2, III.3.2, dan III.4.2. Adapun prasarana umum yang bersifat untuk rekreasi dan pendidikan diadakan baik oleh Pemerintah DKI maupun dengan swadaya masyarakat. Khusus mengenai prasarana rekreasi dan pendidikan ini dapat diperiksa pada bagian IV.2.

Sebagai faktor yang mungkin dapat dilihat sebagai penghubung; perangkai, penyebab ataupun akibat dari perkembangan-perkembangan penduduk, sarana, dan prasarana tersebut di atas, adalah sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Jakarta. Ini dideretkan pada bagian IV.1.

Keseluruhan laporan ini merupakan semata-mata himpunan data, mengenai berbagai keadaan dan kejadian di Jakarta dalam masa antara tahun 1950, yaitu tahun penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, hingga 1980, tigapuluh tahun kemudian. Dengan ini diharapkan dapat digambarkan perubahan-perubahan 'wajah' kota Jakarta sepanjang masa tiga puluh tahun, baik yang berupa unsur fisiknya maupun penduduknya, yaitu isi kota yang menghidupkannya.

2. LATAR: JAKARTA SEBELUM 1950

Jakarta, atau lebih tepat wilayah yang kemudian dinamakan Jakarta, mempunyai riwayat yang amat panjang di belakang tahun 1950. Riwayatnya sebagai tempat hunian manusia secara garis besar dapatlah ditahapkan sebagai berikut:

- (1) tahap pemukiman sederhana di zaman prasejarah;
- (2) tahap pemukiman terkoordinasi di zaman sekitar masa kerajaan Tarumanagara;
- (3) tahap pertumbuhan sebagai kota pusat perdagangan, yang dapat diperinci pula ke dalam tahap-tahap:
 - (a) Sunda Kalapa di bawah kedaulatan Pajajaran;
 - (b) Jayakarta yang jadi perebutan;
- (4) tahap sebagai kota pusat kekuasaan, yang menuruti perkembangan sebagai:
 - (a) Batavia, pusat kekuasaan kolonialis Belanda;
 - (b) Jakarta, ibukota negara Indonesia yang merdeka, sejak tahun 1950.

2.1 Pemukiman sederhana di zaman prasejarah

Sebenarnya belum pernah dapat dijelaskan bagaimana sifat pemukiman prasejarah yang berada di wilayah yang kini disebut Jakarta. Satu hal yang pasti hanyalah bahwa di tempat itu terdapat tempat-tempat hunian prasejarah. Hal ini dapat diketahui dari temuan-temuan yang diperoleh dalam berbagai penggalian ilmiah di beberapa situs di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Hasan Djafar (1987) menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada enam buah situs kepurbakalaan prasejarah yang telah dapat dinyatakan sebagai bekas tempat hunian manusia prasejarah. Situs-situs itu adalah: *Pejaten*, *Kampungkramat*, dan *Condet-Balekambang* yang ketiganya terletak di daerah aliran sungai Ciliwung; *Bukit Sangkuriang* dan *Kelapadua* yang keduanya terletak di sebelah selatan perbatasan wilayah DKI Jakarta dengan Kabupaten Bogor; dan situs *Buni* yang terletak di sebelah timur perbatasan wilayah DKI Jakarta dengan Kabupaten Bekasi, di daerah pantai utara dan terletak antara Kali Bekasi dan Kali Cilamaya. Besar kemungkinan deretan nama-nama tempat hunian prasejarah itu masih dapat diperpanjang, mengingat bahwa di antara 68 situs prasejarah yang telah dikenali baru 27 yang telah digali secara ilmiah.

H.Th. Verstappen dalam telaah geomorfologinya mengenai pembentukan garis pantai pada teluk Jakarta, telah memberikan taksiran bahwa dataran "kipas aluvial" yang meliputi wilayah Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi) terbentuk sekitar 5000 tahun yang lalu (Surjomihardjo 1977b:1-2; Verstappen 1953: 64-79; 85-90). Berdasarkan analisis "Carbon-14" atas temuan tulang dari situs Pejaten dapat ditetapkan umur relatif dari temuan situs tersebut, yaitu sekitar antara tahun 1000 Sebelum Masehi dan 500 Masehi (Djafar 1987:5). Jenis-jenis temuan di situs ini memberikan petunjuk mengenai tahap perkembangan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Dari penemuan alat-alat besi, benda-benda perunggu, serta fragmen cetakan terbuat dari tembikar untuk mencetak benda-benda logam, dapat ditetapkan bahwa situs tersebut menunjukkan tahap kebudayaan perundagian. Indikasi tahap kebudayaan perundagian terdapat pula pada situs-situs yang lain, yaitu Condet-Balekambang dan Buni. Situs Kampungkramat memberikan pula petunjuk ke tahap perundagian, namun sebagian besar temuannya juga menunjukkan budaya tahap sebelumnya, yaitu tahap kebudayaan bercocok tanam. Situs Bukit Sangkuriang dan situs Kelapadua, yang terletak paling selatan di antara keenam situs yang dibicarakan ini, justru menunjukkan kebudayaan dari tahap bercocok tanam saja. Ini semua menunjukkan bahwa wilayah "Jakarta" telah dihuni sekurangnya sejak 'masa' bercocok tanam, yang diperkirakan berlangsung antara sekitar tahun 3000 dan 1000 Sebelum Masehi (Djafar 1987:14). Jika di atas telah dikatakan bahwa dataran kipas aluvial atau kini wilayah Jabotabek itu terbentuk 5000 tahun yang lalu, jadi sekitar tahun 3000 Sebelum Masehi, sedangkan budaya bercocok tanam yang diperlihatkan oleh beberapa situs di wilayah tersebut diperkirakan berawal sekitar tahun 3000 Sebelum Masehi pula, maka terlihatlah kemungkinan dalam hal ini bahwa dataran aluvial Jabotabek itu telah dihuni manusia tak lama setelah terbentuknya. Tarikan utama manusia menempati wilayah ini mungkin sekali adalah kesuburan dan kelimpahan airnya.

Dalam pembahasan kepurbakalaan prasejarah, hadirnya budaya bercocok tanam dilihat pada hadirnya beliung batu yang diupam berdampingan dengan temuan benda-benda gerabah. Beliung menunjukkan fungsi pengerjaan tanah, sedangkan benda gerabah menunjukkan fungsi dari keadaan hidup menetap. Jika khusus dilihat teknik pembuatan alatnya, maka tahap kebudayaan ini juga disebut dengan nama Neolithicum (Batu Muda). Pada tahap kebudayaan inilah kiranya manusia mulai membentuk masyarakat berdasarkan ikatan tempat tinggal. Desa-desa terbentuk, dan kebudayaan petani mulai terbentuk dan kemudian berkembang. Perkembangan organisasi desa ini berlanjut pada tahap kebudayaan perundagian yang ditandai oleh kemahiran manusia mengerjakan logam. Tumbuhnya pemukiman-pemukiman sederhana tanpa koordinasi antara sesamanya inilah yang merupakan awal sejarah 'Jakarta'. Keadaan inilah yang mungkin terekam pada keenampuluh delapan situs di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang luasnya sekitar 40X50km², di daerah aliran sungai-sungai antara Cisadane di barat dan Cileungsi dan Kali Bekasi di timur.

2.2 Pemukiman terkoordinasi sekitar zaman Tarumanagara

Munculnya kerajaan Tarumanagara pada paruh kedua abad kelima Masehi (de Casparis 1975: 19) kiranya tidaklah secara tiba-tiba, melainkan didahului oleh terbentuknya kondisi yang mengandung kelayakan untuknya.

Kehadiran kerajaan Taruma di wilayah Jabotabek ditandai oleh sejumlah inskripsi yang ditemukan di Ciaruteun, Kebon Kopi, Jambu, dan Tugu. Kerajaan ini cakupan wilayahnya bahkan lebih luas daripada wilayah Jabotabek sekarang, terbukti inskripsinya ditemukan juga di Cidanghiang (daerah Lebak, Banten). Kelima inskripsi yang telah disebutkan itu dapat dipastikan mewakili satu era yang sama. Kelimanya secara keseluruhan mengandung kesatuan isi, yaitu memuat tentang *nagara* Taruma, raja Purnavarman, dan pemujaan tapak kaki.

Penggunaan aksara Pallava dan bahasa Sangskerta juga memper-satukan kelima inskripsi tersebut (Sedyawati 1987:5). Dengan data inskripsi-inskripsi itu dapat ditetapkan ciri-ciri budaya dari zaman Taruma, yaitu:

- (1) dikuasainya ilmu baca-tulis, khususnya dengan menggunakan aksara Pallava yang berasal dari India Selatan;
- (2) dikuasainya bahasa Sangskerta yang berasal dari India, dan pada waktu itu juga merupakan bahasa internasional bagi kaum terpelajar;
- (3) dikenalnya pengertian *nagara*, yaitu "kota", suatu tempat hunian yang berbatas jelas, biasanya bergerbang dan berpagar, di mana kehidupan lebih canggih, dengan pengkhususan peranan yang lebih kentara, apabila dibandingkan dengan hunian "desa"; dapat diduga, bahwa konsep ini tidak hanya dikenal dan disebut, melainkan juga diwujudkan secara nyata di zaman Taruma;
- (4) dikenalnya sistem pertanggalan berdasarkan perhitungan peredaran matahari dan bulan;
- (5) dikenalnya konsep *raja* Hindu, yang ditandai oleh sifat-sifat "berani, gagah perwira, menguasai seluruh bumi, menaklukkan musuh-musuhnya, serta bersahabat dengan kaum brahmana", serta dibandingkan pula dengan kualitas dewa *Visnu*;
- (6) dikenalnya sistem organisasi sosial dengan suatu taraf tertentu pemusatan kekuasaan sehingga mungkin dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan umum yang besar, seperti khususnya dalam hal ini berupa pembuatan terusan-terusan untuk mengubah arah aliran sungai;
- (7) dikenalnya pemujaan tapak kaki dari tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kekuatan sakti.

Apa yang tercapai di zaman Taruma itu, yang dapat diketahui melalui tinggalan pertulisan-pertulisan, kiranya sebagian merupakan lanjutan dari pencapaian kebudayaan pada tahap sebelumnya, dan sebagian lagi merupakan hasil akulturasi dengan kebudayaan India sezaman. Mengingat bahwa umur re-

latif dari kebudayaan perundagian berbatas akhir pada tahun sekitar 500 Masehi, sedangkan inskripsi-inskripsi Purnavarman dari Tarumanagara berasal dari paruh akhir dari abad kelima Masehi, sehingga di sini terdapat kesaling-lingkupan waktu, maka sangat masuk akal untuk menyimpulkan bahwa ada kesinambungan antara kedua kebudayaan tersebut. Kebudayaan perundagian memungkinkan terwujudnya masyarakat dengan perbedaan matapencaharian di antara warganya. Pada taraf lanjut, pengelompokan kerja itu dapat mewujudkan pelapisan sosial, yaitu apabila pekerjaan-pekerjaan tertentu dianggap lebih tinggi derajatnya daripada pekerjaan-pekerjaan lain. Penemuan benda-benda emas dari situs Buni, suatu situs masa perundagian, mengisyaratkan akan adanya lapisan atas masyarakat yang memiliki hak ataupun kemudahan khusus untuk menggunakan benda-benda dari logam emas yang mungkin telah dinilai mahal. Dengan demikian, pada akhir masa perundagian kiranya telah dikenal perbedaan antara golongan pemimpin dan golongan rakyat kebanyakan. Peranan "kepala pemerintahan" mungkin telah muncul, sehingga ketika pada suatu waktu tampil seorang Purnavarman sebagai *raja* dalam konsepsi Hindu, maka kedudukan raja itu pada dasarnya merupakan suatu konsep kepemimpinan baru untuk sebuah status dan peranan yang lama (Sedyawati 1987:9).

Terdapatnya wujud *nagara* (kota; dibedakan dengan *nagara*, yaitu "berkenaan dengan/dimiliki oleh/bersifat kota") pada masa Taruma itu menunjuk pada kenyataan yang dapat ditafsirkan dari situ, yaitu bahwa di samping *nagara* yang berkedudukan sebagai pusat (pemerintahan, kebudayaan) itu terdapat pula sejumlah daerah hunian bukan-*nagara* yang berkedudukan sebagai pinggiran. Inilah desa-desa, yang dilihat dari sudut perkembangan pemikiran memang bersifat "pinggiran", namun dilihat dari sudut perekonomian merupakan penyangga dari kebutuhan pusat.

Kenyataan mengenai pengambil-alihan unsur-unsur kebudayaan India di masa Taruma itu menunjukkan pula bahwa

sejak awal ditulisnya inskripsi-inskripsi Tarumanagara itu telah terjalin hubungan antara orang-orang pribumi dengan orang-orang luar daerahnya, dalam hal ini eksponen-eksponen kebudayaan India. Di samping itu, kalau benar *To-lo-mo* adalah ucapan Cina dari Taruma, maka mengikuti berita-berita Cina, dalam abad 6 dan 7 Masehi diketahui Taruma mengirim utusan-utusan pula ke negeri Cina (Surjomihardjo 1977b: 5). Hubungan dengan warga negeri-negeri lain itulah yang kemudian rupanya dikembangkan lebih intensif sehingga akhirnya sebuah pelabuhan di pantai utara, Sunda Kalapa, tumbuh menjadi sebuah kota pusat perdagangan.

2.3 Kota pusat perdagangan

Mengikuti berita Cina, Taruma masih jelas keberadaannya hingga bagian kedua abad 1 Masehi. Berita berikut yang tertua adalah inskripsi Bogor yang berangka tahun 854 Saka (932 Masehi), berbahasa Melayu Kuna, dan menyebut '*haji Sunda*' dan '*rakryan juru panambat*' (*Sejarah Nasional Indonesia II*⁴ 1984: 356). Jarak dua setengah abad lebih antara keduanya rupanya juga merupakan celah budaya yang besar. Kalau inskripsi-inskripsi Taruma menampilkan bahasa Sangskerta dan konsepsi mengenai raja Hindu yang tegas, maka sangat berbeda dengan itu, inskripsi Bogor menampilkan bahasa Melayu Kuna dan istilah-istilah lokal, yaitu *haji* dan *rakryan*, untuk menyebut nama-nama jabatan tinggi. Apa yang terjadi antara surutnya Taruma dan munculnya Sunda masih merupakan suatu yang diliputi kegelapan.

Akan halnya Sunda sendiri ternyata untuk selanjutnya merupakan nama negeri yang mantap. Inskripsi Bogor tersebut di atas menyebutkan Sunda sebagai nama tempat atau negara yang dipimpin oleh seorang raja dengan sebutan *haji*. Inskripsi berikut sesudah itu, yaitu inskripsi *Sanghyang Tapak* yang ditemukan di daerah Cibadak, Sukabumi, berbahasa dan berhuruf Jawa Kuna, serta berangka tahun 952 Saka (1030 Masehi),

menyebutkan Sunda sebagai nama *prahajyan* (kerajaan), sedangkan rajanya yang bernama Sri Jayabhupati menggunakan sebutan *maharaja* (*Sejarah Nasional Indonesia II*⁴ 1984: 360-2).

Untuk selanjutnya nama Sunda tertinggal pada nama sebuah pelabuhan di pesisir Teluk Jakarta, yaitu *Sunda Kalapa*. Pelabuhan ini berada dalam pengawasan sebuah kerajaan Hindu di pedalaman yang bernama Pajajaran. Sunda Kalapa terletak di muara sungai Ciliwung, sedangkan ibukota Pajajaran terletak di bagian hulunya. Kedua tempat dihubungkan secara langsung oleh sungai tersebut. Menurut sumber-sumber Portugis daerah Pajajaran itu disebut *Cumda* (Surjomihardjo 1977b: 6-8); ten Dam 1951). Dari pemberitaan-pemberitaan itu dapat diduga bahwa Sunda adalah nama wilayah atau kerajaan yang mungkin berubah-ubah luas dan pusatnya, sedangkan Pajajaran adalah nama ibukotanya pada suatu masa tertentu.

Menurut inskripsi Batu Tulis, Bogor, kerajaan yang berpusat di Pajajaran itu (atau lebih tepat: Pajajaran sebagai pusat kerajaan) didirikan pada tahun 1133 Masehi, sedangkan berita-berita Portugis yang memberitakan tentang Pajajaran sebagai pusat kerajaan itu berasal dari awal abad 16 Masehi, sehingga dengan demikian ternyata bahwa sekurang-kurangnya selama empat abad Pajajaran bertahan sebagai pusat kekuasaan (Surjomihardjo 1977b: 7-9). Menurut sumber Portugis itu Pajajaran merupakan pusat jaringan jalan-jalan darat yang merupakan urat nadi perdagangan. Jalan-jalan tersebut ke arah barat sampai ke Banten Girang, dan ke arah timur sampai ke Karawang di utara dan Purwakarta di selatan. Sumber-sumber tertulis Sunda Kuna juga menyebut nama ibukota itu Pakwan Pajajaran.

Sunda Kalapa sebagai kota pelabuhan ternyata kemudian berkembang menjadi kota pusat perdagangan, terutama dalam hubungan dagang dengan orang-orang asing. Menurut kesaksian para musafir Portugis, Sunda Kalapa ini dipimpin oleh pejabat-pejabat tinggi, antara lain *Tumenggung Sang Adipati*, dan syah-

bandar yang berwenang di *Fabyam* (Pabean). Pelabuhan ini merupakan pusat ekspor berbagai mata dagangan ke Malaka. Tercatat di antara mata dagangan tersebut adalah: lada sampai 1000 bahar, beras sepuluh jung setiap tahun, asam, emas, sayuran, buah-buahan, sejenis anggur, sapi, babi, kambing dan lembu (Surjomihardjo 1977b:9). Kelimpahan hasil pelabuhan inilah yang telah memikat pemimpin-pemimpin Portugis yang berpangkal di Malaka untuk menjalin hubungan erat dengan Pajajaran, khususnya dengan maksud untuk mendapatkan izin membangun benteng di Sunda Kalapa. Izin telah diberikan pada 21 Agustus 1522, diperingati dengan pendirian sebuah batu peringatan berinskripsi. Tetapi sebelum benteng Portugis dapat didirikan di Sunda Kalapa, pada tahun 1527 kota pelabuhan itu telah direbut oleh Fatahillah, menantu Trenggana, Sultan Demak. Dengan demikian maka seperti halnya Banten, pelabuhan pusat perdagangan Sunda Kalapa itu pun beralihlah dari lingkungan kekuasaan politik Pajajaran yang Hindu ke Demak yang Islam.

Peralihan tersebut diawali dengan penaklukan Angkatan Laut Portugis di Teluk Jakarta oleh armada yang dipimpin oleh Fatahillah.

Dengan kemenangan itu maka Sunda Kalapa diganti nama menjadi *Jayakarta*, dan ini diperkirakan terjadi pada tanggal 22 Juni 1527, tanggal yang kini dianggap tanggal kelahiran kota Jakarta (Surjomihardjo 1977b:11; *Sejarah Nasional Indonesia III*⁴ 1984:126, 137, 215).

Pertumbuhan Sunda Kalapa sebagai kota pelabuhan dan kota perdagangan, sebagai garis depan terhadap orang asing, dengan Pakwan Pajajaran di garis belakang sebagai ibukota kerajaan, pada dasarnya sejajar dengan pertumbuhan Banten sebagai pelabuhan dan kota perdagangan yang semula menaungi di garis belakangnya oleh Banten Girang yang berfungsi sebagai

kota pusat kerajaan. Hanya saja kedua kasus itu berbeda waktu. Semula baik Banten maupun Sunda Kalapa adalah pelabuhan-pelabuhan di bawah wewenang Pajajaran. Kemudian Banten lebih dahulu melepaskan diri, dan pemimpin-pemimpinnya yang telah mengambil Islam sebagai agamanya membangun kesultanan tersendiri. Sunda Kalapa sebaliknya, menjadi berpe-mimpin Islam setelah penaklukan oleh Demak yang bergabung dengan Banten, dan berganti nama menjadi Jayakarta. Banten dan Jayakarta berkembang terus sebagai kota pusat perdagangan. Perdagangan ini semakin ramai dengan timbulnya persaingan antara pedagang-pedagang dari Eropa, khususnya yang berke-bangsaan Portugis, Belanda dan Inggris.

Jayakarta rupanya lebih dikenal sebagai *Jacatra* oleh orang-orang Eropa, seperti terlihat pada peta-peta lama maupun sumber-sumber tertulis mereka. Kedudukannya sebagai pusat perdagangan yang ramai mendorong pedagang-pedagang asing untuk membentuk pangkalan-pangkalan dagang di tempat itu. Mereka berlomba memperoleh konsesi dari penguasa setempat untuk mendirikan kantor-kantor dagang.

2.4 Kota pusat kekuasaan

Jayakarta mempunyai, 'masa hidup' antara tahun 1527 dan 1619 Masehi. Bersama-sama dengan Banten, Jayakarta berkembang sebagai kota perdagangan, yang merupakan tempat menghimpun hasil bumi dan berbagai dagangan lain dari pedalaman untuk dibeli oleh saudagar-saudagar asing yang datang dengan kapal-kapal mereka. Pelabuhan-pelabuhan itu sendiri pun memiliki perahu-perahunya (*Sejarah Nasional Indonesia III*⁴ 1984:126), namun seberapa jauh penggunaan perahu-perahu atau kapal-kapal itu tidak begitu jelas. Setelah penaklukan Sunda Kalapa pada tahun 1527 oleh Demak dan Banten, maka Banten banyak mengalihkan kegiatan dagang ke negerinya sendiri. Belanda pun semula memusatkan kegiatan dagangnya di Banten. Sementara itu saudagar-saudagar Belanda itu pada tahun 1602 membentuk serikat dagang yang dinamakan

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) (Surjomihardjo 1977b:13; *Sejarah Nasional Indonesia III*⁴ 1984:47) dengan tujuan mengembangkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Permusuhan Belanda dengan Banten, yang senantiasa berusaha menolak dominasi Belanda, menyebabkan kemudian VOC memindahkan kantor yang didirikannya di Banten pada tahun 1603 ke Jayakarta (*Sejarah Nasional Indonesia III*⁴ 1984:46, 66-8, 126). Pemindahan itu terjadi pada tahun 1619. Orang Belanda mengganti nama Jayakarta menjadi *Batavia*, dan sejak itu dijadikannya pusat kekuasaan Belanda di Indonesia (Surjomihardjo 1977b:14). Sejak itu Jan Pieterszoon Coen, pejabat Belanda yang mempunyai wewenang atas kantor dagang VOC di Banten dan Jayakarta, memutuskan bahwa benteng Kumpeni (VOC) di Jakarta menjadi pusat pertemuan kapal-kapal Kumpeni yang berlayar di kepulauan Nusantara. Sementara itu benteng Belanda di Jakarta, yang disebut benteng *Jacatra*, dan kemudian diganti nama menjadi *Kasteel Batavia*, telah diperluas dan diperkuat (*Sejarah Nasional Indonesia III*⁴ 1984: 67-8; Surjomihardjo 1977b:15).

Sebuah peta yang disertai gambar-gambar pemandangan dan keterangan dalam bahasa Jerman, dibuat di Nurnberg tahun 1733, menggambarkan situasi Batavia, yang di situ dikatakan terletak di kerajaan Jakarta (*in dem Konigreich Jacatra*). Penyebutan itu menunjukkan bahwa secara resmi kerajaan Jayakarta itu masih ada sekurang-kurangnya sampai bagian pertama abad kedelapan belas Masehi. Namun peta-peta kuna juga menunjukkan bahwa secara fisik Jayakarta telah didesak dan dikelung oleh bangunan-bangunan Belanda. Sebuah kota dengan bangunan-bangunan yang tersusun rapat dan teratur telah terbentuk di sekitar benteng Batavia, khususnya di arah selatan dan baratnya. Dalam pada itu, di luar kota tersebut, di tengah persawahan dan perkebunan, terdapat benteng-benteng Belanda yang lebih kecil, yaitu *Ansjol* (Ancol) di sebelah timur, *Das Funff Eck* ("sudut lima") dan *Ancke* (Angke) di sebelah barat

daya, *Iacatra* di sebelah tenggara, serta *Ryswyck* dan *Nortwyck* di sebelah selatan. Apabila dibandingkan dengan peta "Batavia 1627" (Surjomihardjo 1977b:18) dimana masih tercantum keletakan "Jayakarta Lama", maka pada peta tahun 1733 itu tampak bahwa "Jayakarta Lama" itu sudah ditelan oleh kota Batavia.

Rencana perluasan wilayah itu rupanya segera dimulai oleh Belanda setelah penghancuran kota Jayakarta oleh J.P. Coen pada tanggal 30 Mei 1619. Kecepatan pendudukan dan ekspansi itu terlihat apabila dibandingkan peta "Jayakarta 1619" dengan "Batavia 1627" (Surjomihardjo 1977b: 14-19). Bukan hanya bangunan-bangunan yang dibuat, melainkan juga kanal-kanal dan parit-parit yang dialiri dari sungai Ciliwung. Tujuan pembuatan saluran-saluran air tersebut kiranya adalah untuk memenuhi dua kebutuhan, yaitu kebutuhan praktis ekonomis sebagai sarana lalu-lintas, serta kebutuhan psikologis untuk menghadirkan lingkungan yang mirip dengan negeri asal orang-orang Belanda tersebut.

Pedagang-pedagang Belanda itu menduduki tempat-tempat yang strategis, berupa pelabuhan dan pusat perdagangan, dengan membawa pesertanya kekuatan militer untuk mengawal kepentingan-kepentingannya. Tentara mereka adalah tentara sewaan yang berasal dari berbagai sukubangsa Eropa (Lohanda 1987:4; Taylor 1978:9-12). Tindakan Belanda di Batavia benar-benar telah merupakan tindakan kolonisasi yang disertai penjarahan, dan bukan lagi menjalankan perdagangan biasa.

Dengan demikian maka pemusatan kegiatan VOC di Batavia itu menjadikan Batavia dalam kenyataannya merupakan sebuah pusat kekuasaan. VOC telah menyusun birokrasi yang didukung oleh kekuatan militer untuk suatu tujuan serempak berupa: dagang, kolonisasi dan penjarahan. Semakin lengkap kedudukannya sebagai pusat kekuasaan setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, dan Batavia menjadi ibukota sebuah negara jajahan yang dinamakan Nederland-Indie.

Dari waktu ke waktu kota Batavia itu diperluas. Jenis-jenis fasilitas perkotaan pun senantiasa bertambah. Di samping parit-parit, dibuat juga jalan-jalan. Ini kemudian dilengkapi dengan jalur-jalur trem dalam kota maupun jalur kereta api ke luar kota. Penanggulangan pantai dan perbaikan pelabuhan pun dilakukan. Bangunan-bangunan yang dibuat adalah benteng-benteng, kantor-kantor, istana, serta rumah-rumah tinggal baik yang di pusat kota maupun yang di tengah-tengah kebun luas.

Baik di benteng-benteng maupun di rumah-rumah megah dari orang-orang Belanda itu tinggal juga orang-orang Cina dan orang-orang dari berbagai sukubangsa Indonesia yang bekerja sebagai buruh atau pelayan. Wanita-wanita bumiputra juga seringkali dijadikan *nyai* (istri) dari orang-orang Belanda. Maka lahirilah keturunan mereka yang Eurasia. Penduduk pribumi, Cina dan orang-orang "timur asing" lain tinggal pula di Batavia, mendiami rumah-rumah kampung. Keadaan ini sedikit berubah di kemudian hari, ketika orang-orang Indonesia semakin banyak yang terdidik secara Barat, dan melalui itu dapat meraih kedudukan tinggi dalam tata masyarakat "Hindia-Belanda" yang tercermin di Batavia itu.

Pembentukan kota Batavia sepanjang masa seringkali menyangkut kebutuhan untuk mendatangkan orang-orang, dari berbagai bangsa, untuk bekerja di kota itu: sebagai tentera, kuli, tukang, pelayan, dan lain-lain. Upaya itulah yang dari awalnya telah menjadikan Batavia, yang kemudian berkembang menjadi Jakarta, sebagai suatu kancah percampuran bangsa. Bahkan yang disebut "orang Betawi", yang dikatakan sebagai penduduk asli Jakarta, kiranya telah mengandung pula di dalam identitasnya itu unsur percampuran bangsa, yang terjadi 'karena ada Batavia'. Jadi, yang dalam tabel no. 19 disebut "Jakarta Asli" haruslah dipahami sebagai "yang telah dianggap asli pada tahun 1961".

BAB II

PENDUDUK DKI JAKARTA 1950 – 1980

Oleh : Supratikno Rahardjo

1. GAMBARAN UMUM WILAYAH DKI JAKARTA

1.1 Letak dan Keadaan Geografis

Wilayah DKI Jakarta merupakan dataran rendah dari bagian pantai utara Jawa Barat. Wilayah ini terletak pada $6^{\circ} 12'$ Lintang Utara dan $106^{\circ} 48'$ Bujur Timur. Luas seluruhnya, termasuk pulau Seribu, sebesar $655,76 \text{ km}^2$. Sebelah Utara merupakan daerah pantai yang berawa-rawa dengan ketinggian tanah maksimal 7 m dari titik 0 Tanjung Priok. Pada lokasi tertentu bahkan ada yang letaknya di bawah permukaan laut. Sebelah Selatan merupakan daerah yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian tanah mencapai kurang lebih 50 m di atas permukaan laut. Oleh karena itu di wilayah Jakarta Selatan, sampai dengan banjir kanal, keadaan tanah agak curam, sedangkan dari banjir kanal ke arah laut keadaan tanah hampir rata. Di atas wilayah Jakarta mengalir banyak sungai (umumnya disebut 10 sungai) yang umumnya mengalir dari selatan ke utara. Sungai yang paling terkenal dan terbesar adalah sungai Ciliwung yang membelah wilayah kota dan membagi wilayah

DKI Jakarta menjadi dua bagian, Barat dan Timur (*Gita Jaya*, 1977:22; Rahardjo, 1985/86:1/3; Aswatini dan Mudjiani 1986: 1).

Jakarta memiliki iklim tropis dengan suhu berkisar antara 22°C sampai 34°C dan suhu rata-rata sepanjang tahun 27°C. Tingkat kelembaban udara berkisar antara 80% dan 90%. Sebagai bagian dari kawasan Katulistiwa, arah angin dipengaruhi oleh angin musim. Dari bulan Nopember sampai dengan bulan April bertiup angin musim Barat dan dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober bertiup angin Musim Timur. Wilayah DKI sebagai kota pantai sehari-hari mengalami pula angin laut dari sebelah utara ke selatan dengan kecepatan rata-rata 0,9 – 1,1 m per detik. Curah hujan tertinggi terjadi sekitar bulan Januari dan yang terendah di sekitar bulan September. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun adalah 2.000 mm.

1.2 Perkembangan dan Pembagian Wilayah.

Luas daratan seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk daratan kepulauan Seribu, sejak awal pengukurannya hingga sekarang tampak berbeda-beda dari tahun ke tahun. Di dalam penerbitan Statistik Wilayah tahun 1967 tercantum 590,11 km²; tahun 1969 sampai dengan tahun 1975 tercantum 587,62 km²; tahun 1976 dan 1977 tercantum 637,44 km²; tahun 1978 tercantum 654,90 km²; dan akhirnya dari laporan yang dikeluarkan sesudah tahun 1978 dicantumkan luas wilayah DKI Jakarta adalah 655,76 km². Perbedaan-perbedaan angka-angka tersebut, terutama sesudah tahun 1976, adalah sebagai akibat dari pembulatan atau tambahan-wilayah yang berasal dari desa-desa Propinsi Jawa Barat ke dalam wilayah DKI Jakarta, dan sebagai akibat telah diadakannya perbaikan-perbaikan pengukuran dari wilayah-wilayah yang bersangkutan (KSS DKI Jakarta 1979:1).

Wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi lima wilayah administratif, yaitu Jakarta Selatan dengan luas wilayah 146,20 km²; Jakarta Barat dengan luas wilayah 131,45 km²; Jakarta Utara

dengan luas wilayah 139,58 km² ; Jakarta Timur dengan wilayah paling luas, yaitu 184,01 km² dan Jakarta Pusat dengan wilayah paling sempit, yaitu 54,46 km². Menarik untuk diketahui adalah adanya fakta bahwa pada tahun 1971 wilayah Jakarta Pusat yang luasnya paling sempit ternyata tingkat kepadatannya paling tinggi, yaitu 23.142 orang per km², bahkan kedudukan tersebut tetap bertahan sampai dengan tahun 1980 meskipun sedikit mengalami penurunan, yaitu menjadi 22.712 orang per km². Sebaliknya, Jakarta Timur dengan wilayah paling luas ternyata memiliki tingkat kepadatan paling rendah pada tahun 1971, yaitu 7.914 orang per km². Sedangkan pada tahun 1980 kedudukan Jakarta Timur yang semula memiliki tingkat kepadatan terendah digantikan oleh wilayah Jakarta Utara (lihat Tabel 1.).

Tabel 1.
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta
Tahun 1961, 1971 dan 1980

Wilayah Jakarta	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (orang/Km2)		
		1961	1971	1980
Selatan	146,20	—	7.188	10.806
Timur	184,01	—	4.359	7.914
Pusat	54,46	—	23.142	22.712
Barat	131,45	—	6.244	9.366
Utara	139,58	—	4.388	6.943
DKI Jakarta	655,76	4.432	6.933	9.999

Sumber: BKLH DKI Jakarta 1985a: 9.

Sejak ditetapkan sebagai ibukota Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1964, DKI Jakarta secara administratif setingkat dengan Propinsi/Daerah Tingkat I yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Meskipun demi-

kian, berbeda dengan Propinsi/Daerah Tingkat I yang lain, karena DKI Jakarta tidak terbagi atas Daerah Otonom Tingkat II, melainkan terbagi atas 5 wilayah administratif yang masing-masing dikepalai oleh seorang Walikota. Tiap wilayah administratif dibagi atas kecamatan-kecamatan yang kini berjumlah 30 kecamatan untuk kelima wilayah tersebut. Tiap kecamatan dibagi lagi atas kelurahan-kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah, jumlah seluruhnya kini ada 236 kelurahan. Pengaturan DKI Jakarta serupa di atas sebenarnya merupakan hasil perubahan yang memperlakukan DKI Jakarta tidak hanya sebagai Daerah Tingkat I, tetapi terutama sebagai kota metropolitan yang memerlukan penanganan secara khusus sebagai metropolitan. Oleh sebab itu, DPRDGR DKI Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1966 menetapkan peraturan Daerah no. 4 tahun 1966 tentang pembagian wilayah-wilayah dalam rangka dekonsentrasi Pemerintah DKI Jakarta. Dengan demikian DKI Jakarta tidak memerlukan pembentukan Daerah Tingkat II, sehingga pengaturan penyelenggaraan pemerintahan cukup dengan berazaskan dekonsentrasi terbatas. Sebagai akibatnya Struktur Organisasi Pemerintah DKI Jakarta mengalami perombakan (*Gita Jaya*, 1977:18, 49-56; Aswatini, 1986: 1-2).

2. PENDUDUK DKI JAKARTA DAN PERTUMBUHAN-NYA

2.1 Masalah Penjelasan Pertumbuhan Penduduk

Sensus penduduk pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1961, kemudian menyusul tahun 1971 dan 1980. Namun tidak berarti bahwa data kependudukan, khususnya Jakarta, tidak ada dari masa-masa sebelumnya. Sensus penduduk sebelum kemerdekaan juga sudah pernah dilakukan, yaitu pada tahun 1920 dan 1930. Bahkan sejak awal abad ke-17 jumlah penduduk Jakarta sudah dicatat. Sebagaimana ditulis oleh De Haan, bahwa penduduk Jakarta

pada tahun 1623 berjumlah 6.000 orang. Sampai dengan tahun 1848, data penduduk Jakarta terutama merupakan hasil laporan-laporan perseorangan. Kecuali dari tulisan De Haan, keterangan penduduk Jakarta ditulis pula oleh Lekkerkerker, Radermacher dan van Hogendorp, Nederburg, Raffles dan Bleeker. Baru sejak tahun 1849 pemerintah Kolonial Belanda mulai menerbitkan laporan tahunan penduduk Jawa sampai dengan tahun 1879, sedangkan untuk periode 1880—1905 dalam bentuk laporan lima tahunan sebagai hasil sensus yang dilakukan tiap lima tahun sekali.

Berdasarkan sumber-sumber data di atas, pertumbuhan penduduk Jakarta nampaknya dapat digambarkan secara kronologis dengan cukup baik, setidak-tidaknya sejak pemerintah kolonial Belanda menerbitkan laporan kependudukan yang secara teratur dimuat dalam *Kolonial Verslag* sampai dengan masa kini. Usaha untuk menggambarkan pertumbuhan penduduk Jakarta sejak tahun 1623 hingga tahun 1930 telah dilakukan oleh Abdoel Djalal (1977:9-12). Keadaan penduduk Jakarta pada masa selanjutnya dilaporkan oleh Kantor Sensus dan Statistik DKI Jakarta, khususnya mulai tahun 1941 sampai dengan tahun 1973. Kemudian secara lebih lengkap hingga tahun 1983 dilaporkan dalam *Jakarta dalam Angka 1983*.

Apabila sejarah pertumbuhan penduduk Jakarta sejak tahun 1623 hingga tahun 1979 akan direkonstruksi, maka perlu lebih dahulu diperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Data penduduk Jakarta yang didasarkan laporan individu, terutama yang berasal dari periode sebelum tahun 1849 atau sebelum pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan laporan tahunan dalam *Koloniaal Verslag*, harus digunakan dengan sangat hati-hati. Karena kita tidak mendapatkan keterangan yang pasti mengenai bagaimana dan dengan cara apa penulisnya mendapatkan keterangan mengenai jumlah penduduk Jakarta. Dengan demikian gambaran mengenai pertumbuhan penduduk Jakarta yang didasar-

kan atas data dari periode antara tahun 1623 dan 1849 pertama-tama harus dinilai sebagai upaya penjelasan historis, bukan sebagai usaha untuk mengungkapkan keadaan penduduk yang mendekati keadaan yang sebenarnya.

2. Data penduduk Jakarta yang didasarkan atas laporan tahunan dan lima tahunan yang dimuat dalam *Koloniaal Verslag* sejak tahun 1849 hingga tahun 1905 serta hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 1920 dan tahun 1930, pertama-tama harus kita anggap sebagai data yang baik dan obyektif. Anggapan tersebut masuk akal mengingat pentingnya data kependudukan bagi pengaturan tujuan-tujuan pemerintah. Namun demikian data tersebut tentu tidak dapat dianggap benar-benar mewakili wilayah yang tetap sepanjang 81 tahun (1849-1930), karena bukti sejarah menunjukkan bahwa Jakarta telah mengalami perubahan batas dan bentuk pemerintahan beberapa kali.

3. Data penduduk Jakarta yang didasarkan atas laporan Kantor Sensus dan Statistik DKI Jakarta dari tahun 1941 dan hasil sensus tahun 1961, 1971 dan 1986, boleh dikatakan merupakan data yang paling baik di antara data kependudukan yang ada sebelumnya. Hal tersebut dapat dimengerti karena sumber datanya diambil dari kantor-kantor kelurahan yang sistem administrasinya sudah lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Kecuali itu Data kependudukan hasil ketiga sensus di atas memuat juga macam-macam data kependudukan yang meliputi aspek-aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi, keluarga berencana dan lain-lain. Meskipun demikian harus diingat bahwa data kependudukan yang paling banyak memberikan bahan hanyalah dari hasil sensus (1961; 1971 dan 1980), sedangkan data penduduk yang dihasilkan selain dari data sensus umumnya hanya menyangkut aspek-aspek yang terbatas. Namun kadang-

kadang terdapat juga keterangan yang cukup mendalam untuk suatu aspek yang terbatas. Hal ini biasanya merupakan hasil dari penelitian individu atau sekelompok individu, baik yang mengatas namakan pribadi maupun yang mengatas namakan lembaga tertentu.

Data penduduk Jakarta yang meliputi tahun 1941 hingga 1979 bahkan hingga tahun 1983 telah dicatat jumlah pertahunnya. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan pertahun juga dapat diketahui. Akan tetapi harus tetap diingat bahwa sepanjang periode di atas, Jakarta juga mengalami perubahan batas dan bentuk pemerintahan. Sebagai contoh antara tahun 1948-1949 luas wilayah Jakarta meliputi 1200 km persegi dengan bentuk pemerintahan Distrik Federal. Pada tahun 1950 ketika bentuk pemerintahan diubah menjadi Kotapraja luas wilayahnya berkurang menjadi 530 km persegi dan ketika tahun 1959 bentuk pemerintahannya diubah menjadi Daerah Khusus Ibukota, wilayahnya bertambah menjadi 577 km persegi. Perubahan luas wilayah tersebut terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 1967, 1969, 1975, 1976 dan 1978 (lihat halaman 28) dan akhirnya sesudah tahun 1978 luas wilayah DKI Jakarta 655, 76 km persegi.

Dengan menunjukkan beberapa masalah di atas, tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa data statistik mengenai pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tetapi justru untuk mengingatkan bahwa faktor-faktor perubahan batas wilayah dan bentuk pemerintahan hendaknya selalu diperhitungkan.

Dalam sub-bab berikut ini akan dikemukakan pertumbuhan penduduk antara tahun 1950 hingga tahun 1979. Namun demikian kiranya penting juga untuk mengemukakan data kependudukan yang ada sejak tahun 1941. Setidak-tidaknya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai penduduk Jakarta sebelum, selama dan sesudah perang kemerdekaan. Perlu dikemukakan bahwa data umum mengenai pertum-

buhan jumlah penduduk dapat dilihat pertahunnya, namun untuk data yang sifatnya khusus terutama bersandar pada hasil sensus. Hal ini berarti kita hanya dapat memperoleh gambaran setiap sepuluh tahun, suatu hal yang dapat dipahami karena tidak semua aspek kependudukan harus dicatat setiap tahun. Bahkan sering dapat dijumpai satu aspek kependudukan dicatat pada tahun tertentu, tetapi kemudian tidak dicatat lagi. Demikian juga sebaliknya banyak aspek kependudukan yang sebelumnya tidak pernah dicatat tetapi pada masa kemudian dicatat. Oleh karena itu usaha untuk memperoleh gambaran secara kronologis untuk aspek-aspek tertentu sering tidak memuaskan.

2.2 Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta

Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 1941 seperti yang dilaporkan oleh Kantor Sensus dan Statistik DKI Jakarta adalah 544.823 orang. Setahun kemudian, yaitu tahun 1942 jumlah penduduknya menjadi 563.009 orang yang berarti mengalami laju pertumbuhan sebesar 3,3 persen. Tahun 1943 bertambah lagi, bahkan laju pertumbuhannya cukup besar hingga mencapai 10,4 persen, sedangkan pada tahun 1944 laju pertumbuhannya merendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu menjadi hanya 3,7 persen dengan jumlah penduduk 644.236 orang. Tahun 1945 hingga tahun 1947 adalah masa-masa yang menarik dalam sejarah pertumbuhan penduduk DKI Jakarta, karena jumlah penduduk secara berturut-turut selama tiga tahun mengalami penurunan, yaitu sampai -3,3 persen pada tahun 1945 dengan jumlah penduduk 623.343 orang; kemudian turun lagi sampai -3,4 persen pada tahun 1946 dan sekali lagi turun hingga -0,3 persen pada tahun 1947 dengan jumlah penduduk 599.821 orang, sedangkan tahun sebelumnya 601.904 orang.

Data empiris serupa ini oleh ahli-ahli ekonomi dan kependudukan sering dihubungkan dengan masa-masa perjuangan fisik. Suatu hal yang masuk akal mengingat masa-masa tersebut

merupakan masa perang merebut kemerdekaan dari tangan Jepang serta mempertahankannya dari pihak Belanda yang ingin menduduki Indonesia kembali (periksa Sartono Kartodirdjo, 1976:29-54). Penurunan jumlah penduduk mungkin karena banyak yang menjadi korban perang, disamping juga mungkin karena tingkat aktivitas reproduksi kecil karena umumnya kaum lelaki dewasa lebih banyak berada di medan perang.

Setelah mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk sampai tiga tahun berturut-turut, pada tahun 1948 dan 1949 jumlah penduduk Jakarta mengalami penambahan yang drastis, yaitu menjadi 823.356 orang pada tahun 1948 atau naik 37,2 persen dan naik lagi lebih tinggi pada tahun 1949, yaitu 1.340.625 orang atau naik 62,8 persen. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk ini diduga sebagai akibat dari masuknya arus migrasi pertama yang terbesar dalam periode setelah kemerdekaan. Pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 1960, jumlah penduduk DKI Jakarta terus bertambah meskipun laju kecepataannya berbeda-beda setiap tahunnya. Tahun 1953 dan tahun 1956 laju kecepataannya menunjukkan tingkat yang rendah, yaitu di bawah satu persen sedangkan pada tahun 1951 dan 1959 laju kecepataannya nampak cukup tinggi, yaitu 16 persen dan 38,8 persen (lihat tabel 2a.). Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi pada tahun 1959 ini mungkin sekali berkaitan dengan masuknya arus migrasi dari Jawa Barat karena memuncaknya pergolakan politik dan keamanan di daerah tersebut (Rahardjo, 1985/1986:I/11).

Tahun 1961 agaknya merupakan tahun terakhir jumlah penduduk DKI Jakarta mengalami penurunan, yaitu sampai -2,2 persen. Pada tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 1979 jumlah penduduk DKI Jakarta terus mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan berkisar antara 2,6 persen (tahun 1978 dan 1979) dan 7,3 persen (tahun 1969).

Apabila pola laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta dilihat setiap lima tahun, maka akan tampak bahwa laju per-

Tabel 2a.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta
TAHUN 1941 – 1980

Tahun	Banyaknya Penduduk	Laju	Tahun	Banyaknya Penduduk	Laju
1941	544.823	—	1961	2.906.533	-2,2
1942	563.009	3,3	1962	3.022.107	4,0
1943	621.827	10,4	1963	3.154.405	4,4
1944	644.236	3,7	1964	3.301.870	4,7
1945	623.343	-3,3	1865	3.462.945	4,9
1946	601.904	-3,4	1966	3.639.465	5,1
1947	599.821	-0,3	1967	3.806.866	4,6
1948	823.356	37,2	1968	3.981.768	4,6
1949	1.340.625	62,8	1969	4.273.863	7,3
1950	1.432.085	6,8	1970	4.437.135	3,8
1951	1.661.125	16,0	1971	4.576.009	3,1
1952	1.781.723	7,3	1972	4.755.279	3,9
1953	1.795.831	0,8	*1973	4.973.210	4,6
1954	1.823.918	1,6	*1974	5.182.597	4,2
1955	1.884.700	3,3	*1975	5.403.957	4,3
1956	1.889.618	0,3	*1976	5.701.469	5,5
1957	1.945.883	2,9	*1977	5.925.417	3,9
1958	2.025.959	4,1	*1978	6.081.963	2,6
1959	2.811.835	38,8	*1979	6.239.293	2,6
1960	2.910.858	3,5	**1980	6.503.227	4,2

Sumber: KSS DKI Jakarta: Jakarta
 Dalam Angka 1984
 PPPP dan BKLH DKI Jakarta
 t.t.: 7.

* : Hasil proyeksi penduduk
 ** : Sensus Penduduk 1980

tumbuhan terendah dicapai pada periode 1976–1980, yaitu 3,3 persen, kemudian periode lima tahun sebelum kemerdekaan, yaitu antara tahun 1941–1945 dengan laju pertumbuhan 3,4 persen. Sedangkan laju pertumbuhan tertinggi dicapai pada lima tahun pertama sesudah kemerdekaan, yaitu 18,1 persen dalam periode 1945–1950, kemudian disusul pada periode 1955–1960 dengan laju pertumbuhan 7,5 persen. Akan tetapi bila pola laju pertumbuhan penduduk dilihat setiap sepuluh tahun, maka akan terlihat bahwa angka laju pertumbuhannya

memperlihatkan pola yang semakin mengecil setiap sepuluh tahun berikutnya. Laju pertumbuhan tertinggi dicapai pada sepuluh tahun pertama, yaitu 11,3 persen pada periode 1941–1950, sedangkan laju pertumbuhan terendah dicapai pada sepuluh tahun terakhir, yaitu 3,98 persen pada periode 1971–1980 (lihat tabel 2b.). Periode 1945–1950 dan periode 1950–1961 adalah merupakan masa-masa yang sulit dalam bidang ekonomi dan masa-masa yang tidak stabil dalam kehidupan politik, bahkan hingga periode berikutnya yaitu antara 1961–1971, namun laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Penjelasan yang sering dipakai untuk menerangkan cepatnya laju pertumbuhan penduduk pada dua periode pertama adalah, kecuali naiknya angka kelahiran, juga terutama banyaknya arus migrasi masuk, khususnya yang terjadi pada tahun-tahun 1947, 1948 dan 1959. Seperti dikemukakan oleh Heeren (1955:715), bahwa setiap tahunnya sekitar 100.000 orang pindah ke Jakarta, di antaranya 60.000 orang berasal dari Jawa Barat, sekitar 30.000 orang dari Jawa Tengah dan selebihnya dari kepulauan lain di luar Jawa.

Pertumbuhan penduduk Jakarta kecuali dapat dilihat secara global, juga dapat dilihat secara sektoral atau menurut pembagian wilayah kotanya. Memperhatikan distribusi penduduk di kelima wilayah kota Jakarta sangatlah penting, terutama untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam mengelola pusat-pusat kegiatan manusia yang meliputi sektor-sektor pemukiman, perdagangan, pemerintahan, hiburan, sarana-sarana kesehatan dan lain-lain.

Pada Tabel 1 di depan telah ditunjukkan bahwa luas masing-masing wilayah kota tidak sama ukurannya, demikian juga jumlah penduduk yang mendiami wilayah-wilayah tersebut juga berbeda-beda. Oleh karena itu masing-masing wilayah juga berbeda dalam laju pertumbuhan penduduknya. Di dalam tabel 3 kita akan dapat melihat laju pertumbuhan penduduk Jakarta dalam periode 1971–1980. Terdapat bukti yang menarik di sini

yaitu bahwa laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi ternyata diwakili oleh wilayah Jakarta Timur, yaitu 6,78%. Padahal wilayah tersebut dalam hal jumlah penduduknya pada tahun 1971, hanya menempati urutan ke-4 yaitu sesudah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Karena laju pertumbuhan yang cepat ini wilayah Jakarta Timur pada tahun 1980 menduduki urutan ke-2. Sebaliknya wilayah Jakarta Pusat yang luas wilayahnya paling sempit dengan jumlah penduduk (1971) paling banyak dan paling padat, ternyata malahan mengalami penurunan jumlah penduduk sampai -0,29%. Sehingga pada tahun 1980 hanya menempati urutan ke-3 dalam hal jumlah penduduknya. Sedangkan wilayah Jakarta Selatan yang semula menempati urutan ke-2 dalam hal jumlah penduduk, pada tahun 1980 menjadi paling banyak meskipun laju pertumbuhannya hanya 4,58%. (lihat Tabel 3.).

Adanya perbedaan kecepatan laju pertumbuhan penduduk di tiap wilayah DKI Jakarta, kecuali disebabkan karena faktor-faktor dari dalam, juga dari luar wilayah. Faktor dari dalam adalah: 1. adanya perbedaan komposisi penduduk di tiap wilayah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; dan 2. perbedaan tingkat pendidikan, jenis dan status pekerjaan serta tingkat pendapatan. Faktor dalam yang pertama (perbedaan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur) jelas memberi pengaruh pada tingkat kelahiran. Suatu wilayah yang struktur penduduknya memiliki kelompok 'usia subur' tinggi, mungkin sekali laju pertumbuhan penduduknya akan tinggi pula. Sedangkan faktor dalam yang kedua (perbedaan tingkat pendidikan, jenis dan status pekerjaan serta tingkat pendapatan) secara tidak langsung juga dapat memberi pengaruh, terutama dalam memilih keputusan untuk kawin dan mempunyai anak. Termasuk di dalamnya juga adalah keputusan untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan. Keputusan serupa ini harus kita pahami bukan semata-mata didasarkan atas pertimbangan ekonomis, tetapi juga pertimbangan budaya yang

Tabel 2b.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta
Tahun 1941-1980
(per periode)

Tahun	Jumlah Penduduk	Perkembangan per-tahun	
		Periode	Persentase Pertumbuhan per-tahun
1941	544.823	—	—
1945	623.343	1941-45	3,4
1950	1.432.085	1945-50	18,1
1955	1.884.700	1950-55	5,6
1961	2.906.533	1955-61	7,5
1965	3.462.945	1961-65	4,5
1971	4.576.009	1965-71	4,8
1976	5.701.469	1971-76	4,5
1980	6.503.227	1976-80	3,3
		1941-50	11,3
		1950-61	6,6
		1961-71	4,6
		1971-80	3,98

Persentase pertumbuhan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$r : 1 - \frac{Pt}{Po} \times 100$$

Pt: penduduk pada tahun t
 Po: penduduk pada tahun ke o

Dihitung dari Tabel 2a.

Sumber: KSS DKI Jakarta: Jakarta Dalam Angka 1984
 PPPP dan BKLH DKI Jakarta
 t.t.: 7.

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan maupun akar nilai budaya yang melatar belakangnya.

Tabel 3.
Penduduk DKI Jakarta pada Pertumbuhannya
pada Tahun 1961, 1971 dan 1980
(ribuan)

Wilayah	1961	1971	1980*)	Pertumbuhan (%)	
				1961-1911	1971-1980
Jakt. Selatan	1.156,4	1.050,5	1.519,8	—	4,58
Jakt. Timur	—	802,1	1.456,8	—	6,78
Jakt. Pusat	796,5	1.266,3	1.236,9	—	— 0,29
Jakt. Utara	953,6	612,4	976,0	—	5,25
Jakt. Barat	—	820,8	1.231,2	—	4,16
DKI Jakarta	2.906,5	4.546,5	6.480,7	4,62	3,97

Sumber: BKLH DKI Jakarta 1985a: 8.
 Hasil Sensus 1980, tidak termasuk
 Tuna Wisma dan Awak Kapal.

Faktor dari luar wilayah yang bersangkutan dapat disebabkan oleh dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek mobilitas sosial dan yang kedua adalah aspek kebijaksanaan pemerintah. Aspek mobilitas sosial ini terutama meliputi perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, baik antar wilayah di DKI Jakarta maupun antar wilayah DKI Jakarta dengan wilayah di luarnya. Mobilitas serupa ini bisa menambah atau sebaliknya mengurangi jumlah penduduk dari satu wilayah tertentu. Aspek yang kedua, yaitu kebijaksanaan pemerintah mungkin yang paling memberi pengaruh pada perubahan komposisi dan laju pertumbuhan penduduk Jakarta. Kebijakan yang mungkin paling besar pengaruhnya adalah kebijaksanaan dalam pengembangan dan relokasi industri dan pusat-pusatnya. Pusat-pusat industri sebagaimana diputuskan pada masa pemerintahan Ali Sadikin meliputi areal-areal di wilayah Ancol, Tanjung Priok

dan Pasar Ikan untuk industri maritim; wilayah Cilandak untuk industri kerajinan; wilayah Karet Kuningan dan Pal Merah untuk industri Batik; wilayah Marunda untuk industri perkayuan sedangkan jenis-jenis industri lainnya di wilayah Pulo Gadung, Gandaria, Pulau Mas, Pluit, Cempaka Putih dan Cengkareng. Agaknya yang sangat penting adalah ditetapkan wilayah Pulau Gadung sebagai pusat pengembangan kawasan industri (*industrial estate*) sejak tahun 1969. Kawasan industri yang semula memiliki luas 568 hektar, pada tahun 1972 diperluas dengan tambahan 750 hektar lagi sehingga hampir meliputi 1.300 hektar, bahkan kemudian untuk kemungkinan pengembangannya disediakan lagi areal seluas 800 hektar.

Program relokasi industri-industri ini jelas memberi pengaruh pada mobilitas penduduk antar wilayah di DKI Jakarta. Hal tersebut terutama karena relokasi industri mensyaratkan semua industri-industri yang tidak berada pada lokasi-lokasi yang ditetapkan menurut Rencana Induk, harus memindahkan usahanya ke daerah-daerah yang sudah diperuntukkan bagi industri. Dari 6000 industri di Jakarta, sudah terdaftar 1.044 perusahaan yang terkena relokasi pada tahun 1975.

Perlu diketahui bahwa di Pulau Gadung saja (*Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung*) industri-industrinya (pada tahun 1977) menyerap 13.000 orang. Setelah diperluas nanti akan mampu menyerap kurang lebih 75.000 orang. Selebihnya banyak tenaga kerja yang bisa diserap secara tidak langsung sekitar 150.000 orang.

Apabila kita memperhatikan kembali tabel 3 di depan dan mencoba untuk membandingkan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam upaya relokasi pusat-pusat industri, akan nampak bahwa setelah kebijaksanaan tersebut dilaksanakan hingga tahun 1980 ternyata bahwa wilayah-wilayah pusat industri menunjukkan tingkat laju pertumbuhan penduduknya tinggi dengan pola yang agaknya sesuai dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja oleh industri-industri tersebut, berturut-turut adalah Ja-

karta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur yang tertinggi. Sedangkan Jakarta Pusat justru berkurang penduduknya, karena mungkin sekali sebagian dari mereka memang berpindah ke wilayah-wilayah yang dekat pusat-pusat industri, khususnya mungkin ke Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Kemungkinan pola mobilitas serupa itu adalah besar mengingat pertimbangan ekonomis, karena orang cenderung memburu sumber kehidupan (pekerjaan) dan akan tinggal dekat dengan tempatnya bekerja.

Untuk mendapatkan gambaran secara umum jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta selama Pelita I, II dan III, tabel 4 berikut ini dapat menjelaskan perkembangannya. Jumlah penduduk Jakarta dalam setiap periode sensus selalu mengalami pertumbuhan, dengan demikian kepadatanpun menjadi semakin tinggi. Namun demikian tingkat laju pertumbuhannya sebaliknya mengalami penurunan. Selama Pelita I-II penurunan sam-

Tabel 4.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta
dalam PELITA I, II dan III
Berdasarkan Hasil Registrasi

PELITA	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (orang/Km ²)
I	4.709.072	8.013
II	5.640.080	8.602
III	5.184.842	9.432

Sumber: BKLH DKI Jakarta 1985a: 10.
Hanya penduduk legal.

pai mencapai 0,46% sedangkan antara Pelita II-III sampai sekitar 1,50%. Dalam Pelita I pertumbuhan penduduk Jakarta mencapai 4,41% sementara dalam Pelita II dan III berturut-turut adalah 3,95% dan 3,44%.

Apabila diambil rata-ratanya, laju pertumbuhan penduduk Jakarta selama periode 1961–1971 adalah 4,62% setahun, sedangkan pada periode 1971–1980 hanya 3,97%. Ini berarti laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yang cukup berarti. Namun bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional (lihat tabel 5), pertumbuhan Jakarta relatif masih cukup

Tabel 5.
Tingkat Pertambahan Penduduk DKI Jakarta dan Indonesia
1961 – 1980

T a h u n	Jumlah Penduduk (juta)		Tingkat Pertumbuhan	
	DKI Jakarta	Indonesia	DKI Jakarta	Indonesia
I. 1961	2.906,5	97.085,3	4,64	2,07
1971	4.576,0	119.208,2	3,98	2,39
1980	6.503,2	147.490,0	3,69	2,34

Sumber: Rahardjo 1985/1986: I/13.

tinggi. Pada tahun 1961 ketika laju pertumbuhan nasional mencapai 2,07%, pertumbuhan Jakarta lebih dari dua kali lipatnya, yaitu 4,64%. Pada tahun 1971 ketika pertumbuhan nasional mengalami kenaikan, yaitu menjadi 2,39 persen, Jakarta masih diatasnya, yaitu 3,98%. Sementara tahun 1981 ketika pertumbuhan nasional menurun lagi menjadi 2,34%, Jakarta masih tetap di atasnya, yaitu 3,69%. Juga bila dibandingkan dengan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di daerah/propinsi lain (lihat Tabel 6 dan Tabel 7), maka tampak bahwa sampai dengan tahun 1971 Jakarta menempati kedudukan teratas, baik dalam jumlah maupun kecepatan laju pertumbuhannya. Baru kemudian tempat kedua disusul oleh Surabaya. Baru kemudian pada tahun 1980, ketika laju pertumbuhan Jakarta mengalami sedikit penurunan, ternyata di daerah-daerah/propinsi lain (selama satu dekade) mengalami pertumbuhan yang bervariasi. Ada yang mengalami penurunan seperti Surabaya,

Tabel 6.
Pertambahan Penduduk Kota di Indonesia
Tahun 1961 - 1971 (Kota-kota yang Mempunyai
Penduduk Lebih dari 100.000 Pada Tahun 1971)

Kota	Pulau	Penduduk tahun 1971	Rata-rata tingkat pertambahan penduduk (%) 1961 - 1971
Jakarta	Jawa	4.576.009	4,6
Surabaya	Jawa	1.332.249	4,3
Bandung	Jawa	1.201.750	2,1
Semara g	Jawa	646.590	2,5
Medan	Sumatera	635.562	2,9
Palembang	Sumatera	582.961	2,1
Ujung Pandang	Sulawesi	434.766	2,7
Malang	Jawa	422.425	2,2
Surakarta	Jawa	414.285	1,2
Yogyakarta	Jawa	342.267	0,9
Banjarmasin	Kalimantan	281.673	2,8
Pontianak	Kalimantan	217.555	3,8
Tanjung Karang	Sumatera	198.986	4,0
Padang	Sumatera	196.339	3,2
Bogor	Jawa	195.882	2,4
Kediri	Jawa	178.854	1,2
Cirebon	Jawa	178.529	1,2
Manado	Sulawesi	169.684	2,7
Jambi	Sumatera	158.559	3,4
Pekanbaru	Sumatera	145.030	7,4
Samarinda	Kalimantan	137.521	7,0
Balikpapan	Kalimantan	137.340	4,1
Madiun	Jawa	136.147	1,0
Tasikmalaya	Jawa	136.004	0,8
Pematang Siantar	Sumatera	129.232	1,2
Jember	Jawa	122.712	2,7
Pekalongan	Jawa	111.537	0,9
Magelang	Jawa	110.308	1,4
Tegal	Jawa	105.752	1,7

Sumber: Singarimbun 1977 : 5.

Tabel 7.
Urutan Jumlah Penduduk 50 Kota Tahun 1380 dan 1971,
dan Perkembangan Penduduk di 30 Kotamadya di Indonesia
Tahun 1971 dan 1980

Urutan Tahun 1980	K o t a	Jumlah Penduduk (1980)	Urutan Tahun (1971)	Jumlah Penduduk (1971)	% Perkembang- an 1971-1980
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Jakarta	6.503.449	01	4.579.303	5,9
02	Surabaya	2.027.913	02	1.556.255	2,9
03	Bandung	1.462.637	03	1.200.380	2,2
04	Medan	1.378.955	04	635.562	8,5
05	Semarang	1.026.671	05	646.590	5,2
06	Palembang	187.187	06	582.961	5,4
07	Ujung Pandang	709.638	07	434.766	5,5
08	Malang	511.780	08	422.428	2,1
09	Padang	480.922	14	196.339	10,3
10	Surakarta	469.888	09	414.285	1,4
11	Yogyakarta	398.727	10	314.629	1,7
12.	Banjarmasin	381.286	11	281.675	3,4
13	Pontianak	364.778	12	217.555	3,8
14	Tanjung Karang	284.275	13	198.986	4,0
15	Balikpapan	280.675	22	137.340	8,2
16	Samarinda	264.718	21	137.182	7,4
17	Bogor	247.409	15	195.875	2,6
18	Jambi	230.375	19	158.559	4,2
19	Cirebon	223.776	17	178.529	2,5
20	Kediri	221.850	16	178.865	2,4
21	Manado	217.159	18	170.181	2,7
22	Ambon	208.89s	31	79.636	11,6
23	Pakan Baru	186.262	20	145.030	2,8
24	Madiun	150.562	23	136.147	1,1
25	Pematang Siantar	150.376	24	129.232	1,7
26	Pekalongan	132.558	25	111.201	1,9
27	Tegal	131.728	27	105.752	2,4
28	Magelang	123.484	26	110.308	1,2
29	Sukabumi	109.994	28	96.242	1,5
30	Probolinggo	100.296	30	82.008	2,2
31	Gorontalo	97.628	29	82.320	
32	Pasuruhan	95.864	32	75.266	
33	Tebing Tinggi	92.087	46	30.314	

1	2	3	4	5	6
34	Pangkal Pinang	90.096	33	74.735	
35	Pare-Pare	86.450	34	72.538	
36	Salatiga	85.849	35	69.831	
37	Payakumbuh	78.836	37	63.388	
38	Blitar	18.503	36	67.856	
39	Binjai	76.464	40	59.882	
40	Banda Aceh	72.090	41	53.668	
41	Bukit Tinggi	70.171	38	63.132	
42	Mojokerto	68.849	39	60.013	
43	Bengkulu	64.783	44	31.866	
44	Palangka Raya	60.447	47	27.132	
45	Sibolga	59.897	42	42.223	
46	Tanjung Balai	41.894	43	33.604	
47	Padang Panjang	34.517	45	30.711	
48	Solok	31.724	48	24.771	
49	Sabang	23.821	49	17.625	
50	Sawah Lunto	13.561	50	12.427	

Sumber: Reksohadiprodjo 1984: 15.

Magelang, bahkan ada yang cukup menyolok yaitu Pekanbaru (dari 7,4% pada tahun 1971 menjadi hanya 2,8% pada tahun 1980). Ada pula yang pertumbuhannya tetap yaitu kota Pontianak, Tanjung Karang dan Manado. Namun, kota-kota selebihnya, terutama yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang pada tahun 1971, mengalami kenaikan. Bahkan kota-kota tertentu mengalami loncatan pertumbuhan yang cukup besar, seperti misalnya Medan (dari hanya 2,9% pada tahun 1971 menjadi 8,5% tahun 1980), juga Padang (dari 3,2% menjadi 10,3%) dan Balikpapan (dari 4,1% menjadi 8,2%).

Dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia dapat dikatakan bahwa pada dekade 1971–1980, pengendalian penduduk Jakarta menunjukkan keberhasilan, khususnya dalam mengurangi tingkat laju pertumbuhan penduduknya. Keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari kebijaksanaan pemerintah dalam bidang kependudukan sepanjang periode tersebut maupun periode sebelumnya.

2.3 Komposisi Umur dan Jenis Kelamin

Struktur umur dan jenis kelamin merupakan unsur pokok untuk mengetahui karakteristik penduduk dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku demografis maupun sosial ekonomis.

Struktur umur mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat ketergantungan suatu masyarakat dan biasanya dinyatakan dengan angka beban ketergantungan (*Dependency ratio*). Penduduk yang mempunyai struktur umur muda umumnya akan mempunyai angka beban ketergantungan yang tinggi. Karena angka beban ketergantungan biasanya digunakan sebagai indikator ekonomi, maka negara yang mempunyai angka beban ketergantungan tinggi, dikategorikan ke dalam negara yang belum maju.

Komposisi umur dan jenis kelamin penduduk DKI Jakarta dapat dihitung berdasarkan Tabel 8. Bila angka-angkanya dinyatakan dalam persentase, dapat diketahui bahwa hasil Sensus penduduk 1980 menunjukkan bahwa kelompok penduduk berumur di bawah 15 tahun berjumlah 39 persen. Hal itu berarti mengalami penurunan 4,2 persen, karena pada tahun 1971 kelompok umur yang sama menunjukkan angka sebesar 43,2 persen. Kelompok umur 0—4 tahun juga mengalami penurunan. Pada tahun 1971 proporsinya sebesar 17 persen sedangkan pada tahun 1980 menjadi hanya 14,9 persen. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan fertilitas. Sebaliknya penduduk yang termasuk kelompok umur 15—64 tahun dan 65 tahun ke atas mengalami kenaikan, masing-masing dari 55,5 persen dan 1,3 persen pada tahun 1971 menjadi 59,5 persen dan 1,5 persen pada tahun 1980.

Bila dihitung umur medianya, hasil sensus 1980 menunjukkan umur median 19,4 tahun, suatu kenaikan sebesar 1,3 persen bila dibandingkan dengan satu dasawarsa sebelumnya yang menunjukkan angka 18,1 tahun. Umur median merupakan umur tengah yang ditentukan berdasarkan umur dari penduduk yang

Tabel 8.
Penduduk DKI Jakarta Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 1971 dan 1980

U m u r	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	1971	1980	1971	1980	1971	1980
0 - 4	391.371	495.784	381.953	473.305	773.324	969.089
5 - 9	331.971	423.950	319.499	403.561	651.470	827.511
10 - 14	270.428	369.875	267.518	363.770	537.946	733.645
15 - 19	243.674	374.055	265.251	428.374	508.925	802.429
20 - 24	215.271	368.939	227.890	388.841	443.161	757.780
25 - 29	207.143	321.802	201.771	288.222	408.914	610.024
30 - 34	173.302	223.732	164.195	202.789	337.497	426.521
35 - 39	146.013	199.011	135.959	182.297	281.972	381.308
40 - 44	115.403	165.285	94.008	144.469	209.411	309.754
45 - 49	73.642	114.301	60.930	101.336	134.572	215.637
50 - 54	53.012	92.377	47.382	81.202	100.394	173.579
55 - 59	29.355	51.891	25.220	46.975	54.575	98.866
60 - 64	20.797	37.634	25.026	39.563	45.823	77.197
65 - 69	11.777	19.906	13.718	21.278	25.495	41.184
70 - 74	8.179	12.145	10.009	16.723	18.188	28.868
75+	5.856	10.913	8.969	16.349	14.825	27.262
Jumlah	2.297.194	3.281.600	2.249.298	3.199.054	4.546.492	6.480.654

Sumber : Aswatini dan Mudjiani 1986: 12.

Catatan : Jumlah Net Stated sudah didistribusikan (prorated).

lebih tua dan penduduk yang lebih muda. Apabila dibandingkan dengan umur median penduduk Indonesia, ternyata umur mediannya menunjukkan angka yang sama dengan Jakarta, yaitu 19,4 pada tahun 1980, dan 18 tahun pada satu dasawarsa sebelumnya (*LDFEUI* 1980:14 dan 1984:16 dan Aswatini dan Mudjiani 1986: 10-15).

Kenaikan umur median dan proporsi penduduk ke arah umur yang lebih tua menunjukkan struktur umur yang bertambah tua. Namun demikian struktur umur DKI Jakarta dan juga Indonesia seperti ditunjukkan di atas masih termasuk golongan "penduduk muda", tetapi mendekati golongan "penduduk in-

termediate". Struktur penduduk dikatakan "tua" jika proporsi golongan penduduk berumur 0-14 tahun lebih kecil atau sama dengan 30 persen; golongan umur 15-64 tahun sama atau lebih besar dari 60 persen dan golongan umur di atas 60 tahun sama atau lebih besar dari 10 persen (Aswatini dan Mudjiani 1986: 13).

Bila orang yang dianggap tidak produktif berumur dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun, maka angka beban ketergantungan penduduk DKI Jakarta menurut Sensus 1971 menunjukkan angka 80, sedangkan bila yang dianggap orang tidak produktif berumur di bawah 10 tahun dan 65 tahun ke atas, angka beban ketergantungannya adalah 48.

Angka-angka tersebut menunjukkan penurunan yang cukup berarti bila dibandingkan dengan satu dasawarsa berikutnya yang menunjukkan angka 68 dan 41. Namun demikian angka ketergantungan tersebut masih termasuk tinggi. Angka tersebut memberi arti bahwa setiap seratus orang yang produktif harus menanggung 68 orang yang tidak produktif. Meskipun demikian angka tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi Indonesia, yaitu 87 pada tahun 1971 dan 79,1 pada tahun 1980. (*LD FEUI*, 1980: 16 dan 1984: 16).

Secara umum dapat dikatakan bahwa penurunan tersebut mencerminkan bertambahnya kesejahteraan karena penduduk yang menjadi beban ternyata menurun atau berkurang.

Mengetahui komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting karena jika penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki, atau sebaliknya, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk (secara alamiah). Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan DKI Jakarta pada tahun 1971 dan 1980 dapat dilihat pada Grafik 1 dalam bentuk piramida penduduk.

Hasil Sensus 1971 maupun 1980 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih tinggi daripada jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 1971 jumlah penduduk laki-laki

2.297.194 dan jumlah penduduk perempuan 2.249.298. Sedangkan pada tahun 1980 jumlah penduduk laki-lakinya 3.281.600 sedangkan perempuannya 3.199.054 (periksa tabel 8). Hal ini berarti dalam jangka waktu 1971–1980 jumlah penduduk laki-laki bertambah sebesar 984.406 orang atau 42,80 persen. Pertumbuhan penduduk laki-laki ini relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk perempuan yang kenaikannya sebesar 42,20 persen.

Bila dilihat angka imbang jenis kelamin (*sex ratio*) pada Sensus 1980 terdapat 1.025 laki-laki untuk 1000 perempuan. Angka itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka sensus 1971, yaitu 1.021 laki-laki untuk 1.000 perempuan. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan. Apabila dibandingkan dengan rasio jenis kelamin penduduk Indonesia, ternyata berbeda. Karena penduduk Indonesia pada tahun 1971 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada perempuan, yaitu 97 laki-laki untuk 100 perempuan, sedangkan pada tahun 1980 meskipun pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, tapi jumlah penduduk laki-lakinya masih lebih sedikit, yaitu 99 penduduk laki-laki untuk 100 perempuan. (LD FEUI 1980: 15 dan 1984:15 dan Aswatini dan Mudjiani 1986:15).

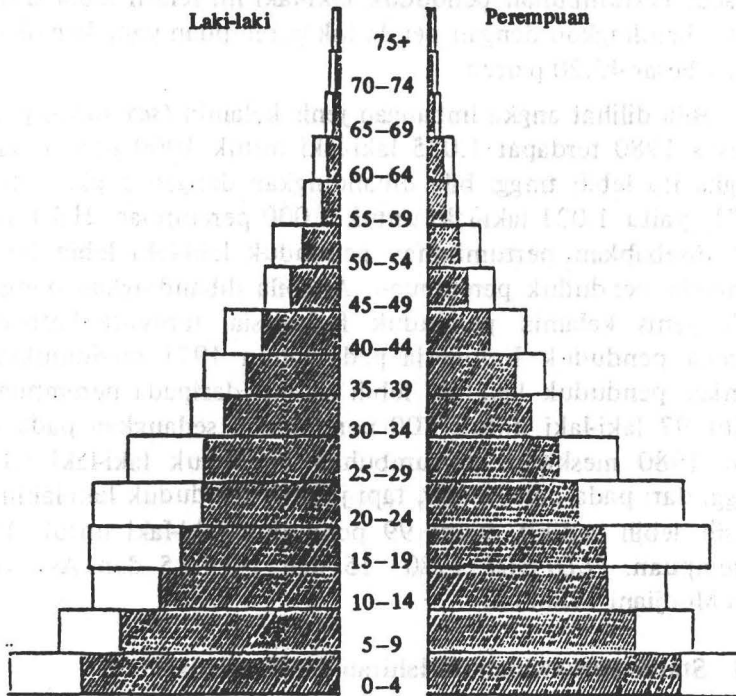
2.4 Status Perkawinan, Kelahiran dan Kematian

2.4.1. Status Perkawinan

Status perkawinan merupakan salah satu hal yang perlu ditinjau untuk melihat kecenderungan perubahan komposisi dan pertumbuhan penduduk, karena status perkawinan merupakan salah satu faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi angka kelahiran.

Perlu kiranya dibedakan di sini dua istilah yang bisa menimbulkan salah pengertian, yaitu status perkawinan dan per-

Grafik 1.
Piramida Penduduk DKI Jakarta
Tahun 1971 dan 1980



Penduduk Tahun 1971
 Mewakili 100.000



Penduduk Tahun 1980
 Mewakili 100.000

Sumber: Aswatini dan Mudjiani 1986:14.

kawinan itu sendiri. Status perkawinan di setiap negara diketahui ada 4 jenis, yaitu belum kawin, kawin, janda dan cerai. Adapun status di luar jenis di atas dianggap kelainan. Misalnya di Amerika Latin terdapat jenis status '*consensual*' atau '*convience*', yaitu kumpul tanpa mempunyai predikat legal dalam hukum atau agama. Di Amerika Serikat dan Amerika Latin keadaan tersebut dianggap berstatus kawin. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah perubahan dari status lain menjadi status kawin. Perceraian merupakan perubahan dari status kawin menjadi status cerai, sedangkan janda merupakan perubahan dari status kawin ke status lain karena salah satu pasangan meninggal. Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan adalah hubungan yang sah dari dua orang yang berlainan jenis kelamin. Sahnya hubungan tersebut didasarkan atas hukum perdata yang berlaku, agama atau peraturan-peraturan lain yang dianggap sah dalam negara.

Berdasarkan Sensus Penduduk 1971 dapat ditunjukkan bahwa dari total penduduk DKI Jakarta yang berumur di atas 10 ke atas, 4,2 persen belum kawin; 51,4 persen dalam status kawin dan 7,4 persen cerai mati/hidup. Pada Sensus 1980 persentasenya menjadi 44,2 persen; 50,0 persen dan 5,8 persen. Berarti selama 1971-1980 proporsi yang berstatus kawin menurun (lihat tabel 9).

Apabila dilihat menurut kelompok umur, tampak bahwa dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1980, terjadi penurunan persentase penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang sudah kawin, khususnya pada kelompok umur 10-14; 15-19; 20-24; dan 25-29 tahun. Penurunan persentase status pada kelompok usia muda itu menunjukkan adanya penundaan usia perkawinan yang mungkin disebabkan adanya perubahan pandangan pada wanita terhadap keputusan untuk kawin (lihat Tabel 10).

2.4.2. Kelahiran

Kelahiran (*fertility*) diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Salah satu

Tabel 9.
Penduduk DKI Jakarta Berumur 10 Tahun Keatas
Pada Sensus 1971 dan 1980 Menurut Jenis Kelamin dan
Status Perkawinan (persen)

Tahun Sensus dan Jenis Kelamin	Status Perkawinan				Jumlah	
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Mati	Cerai Hidup	%	N
1971						
Laki-laki	47,6	50,1	1,5	0,8	100,0	1.569.020
Perempuan	34,7	52,8	8,9	3,6	100,0	1.542.337
Jumlah	41,2	51,4	5,2	2,2	100,0	3.111.357
1980						
Laki-laki	49,0	49,6	0,8	0,6	100,0	2.361.583
Perempuan	39,3	50,5	6,6	3,6	100,0	2.322.032
Jumlah	44,2	50,0	3,1	2,1	100,0	4.683.615

Catatan : *) Tidak termasuk "Tidak Tercatat" (Not Stated)

Sumber : Sensus Penduduk 1971, Seri E, Tabel 07

Sensus Penduduk 1980, Seri S, No. 11 Tabel 03.3.

Aswatini dan Mudjaini 1986: 17.

indikator yang baik untuk mengukur tingkat kelahiran adalah "Age Specific Fertility Rate" (ASFR), yaitu banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu. Jumlah dari ASFR adalah "Total Fertility rate" (TFR), yaitu banyaknya anak yang dilahirkan oleh satu kohor (generasi) wanita selama masa reproduksinya (15—49 tahun) dengan asumsi bahwa wanita itu tidak ada yang mati.

ASFR dan TFR di DKI Jakarta selama periode 1967 sampai dengan 1979 dapat dilihat pada Tabel 11. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa angka ASFR rendah pada kelompok umur muda kemudian meningkat dan mencapai puncaknya pada kelompok umur 25—29 tahun. Kemudian menurun sampai

ke angka terendah pada kelompok umur 45–49 tahun. Di DKI Jakarta pola di atas berlaku untuk seluruh periode, yaitu 1967–1970; 1971–1975 dan 1976–1979. Secara umum dalam ketiga periode terjadi penurunan ASFR. Turunnya ASFR itu diikuti juga oleh turunnya TFR dari 5.175 per seribu wanita pada periode 1967–1970 menjadi 4.780 pada periode 1971–1975 dan turun lagi menjadi 3.990 pada periode 1976–1979.

Jika dibandingkan dengan angka kelahiran di Indonesia, TFR untuk Indonesia lebih besar daripada TFR DKI Jakarta. Puncak ASFR Indonesia terjadi pada kelompok umur 20–24 tahun. Hal itu berarti umur perkawinan di DKI Jakarta lebih tua daripada rata-rata Indonesia. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab adalah mungkin karena adanya perubahan pandangan dalam menentukan usia kawin, dalam menentukan saat yang tepat untuk mempunyai anak serta dalam menentukan jumlah anak yang diinginkan. Kesemuanya itu mungkin dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan dan keluarga Berencana. Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa penurunan ASFR tidak hanya berlaku di DKI Jakarta tetapi juga dalam skala Indonesia dan meliputi seluruh periode.

Pada umumnya angka TFR (Angka Fertilitas Total) di negara-negara yang sedang berkembang tinggi sekali, yaitu 5,0 atau lebih sedangkan di negara maju rendah, yaitu di bawah 2,0. Dibandingkan dengan DKI Jakarta, TFR Indonesia pada tahun 1971 lebih tinggi, yaitu 5,9 per wanita atau 5900 per 1000 wanita sedangkan untuk tahun 1976 adalah 4,2 per wanita. Pada tahun 1980 TFR Indonesia sedikit mengalami kenaikan menjadi 4,3 per wanita atau 4300 per 1000 wanita (*LDPEUI*, 1980:25 dan 1984:30).

2.4.3. Kematian

Mati menurut definisi yang diberikan oleh PBB dan WHO adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat *setelah kelahiran*

Tabel 10.
Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun Keatas Pada
Sensus 1971 dan 1980 Menurut Kelompok Umur dan
Status Perkawinan (persen)

Umur	Status Perkawinan 1971			Jumlah	N	Status Perkawinan 1980			Jumlah	N
	Belum Kawin	Kawin	CeraI/Janda			Belum Kawin	Kawin	CeraI/Janda		
10 - 14	98,3	1,3	0,4	100,0	266.566	99,5	0,4	0,1	100,0	363.746
15 - 19	68,5	28,1	3,4	100,0	264.307	78,9	19,4	1,7	100,0	428.345
20 - 24	26,1	66,7	7,2	100,0	227.079	35,7	60,1	4,2	106,0	388.815
25 - 29	8,9	83,2	7,9	100,0	201.053	15,2	79,0	5,8	100,0	288.203
30 - 34	4,2	85,4	10,4	100,0	163.611	7,0	85,5	7,5	100,0	202.773
35 - 39	2,3	83,1	14,6	100,0	135.475	3,4	85,6	11,0	100,0	182.285
40 - 44	2,1	73,7	24,2	100,0	93.674	2,5	80,1	17,4	100,0	144.459
45 - 49	1,6	67,9	30,5	100,0	60.713	1,5	75,1	23,4	100,0	101.329
50 - 54	1,6	54,8	43,6	100,0	47.213	2,2	60,7	37,1	100,0	81.197
55+	1,0	35,4	63,6	100,0	82.646	1,8	39,1	59,1	100,0	140.878

Catatan : *) Tidak Termasuk "Tidak Tercatat" (Not Stated)

Sumber : Sensus Penduduk 1971, Seri E No. 09 Tabel 07.

Sensus Penduduk 1980, Seri S No. 11 Tabel 03.3.

Aswatini dan Mudjiani 1986: 18.

Tabel 11.
ASFR dan TFR di DKI Jakarta Periode Tahun 1967-1979

Periode Tahun	A S F R							TFR
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
1967-1970	140	266	268	198	110	41	12	5.175
1971-1975	107	241	252	185	113	46	12	4.780
1976-1979	94	208	213	157	87	31	8	3.990

Sumber: Aswatini dan Mudjiani 1986: 21.

hidup. Data kematian sangat diperlukan tidak saja untuk pemerintahan tetapi juga bagi pihak swasta, terutama yang berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Di samping itu data kematian diperlukan untuk proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan.

Salah satu cara untuk mengukur kematian adalah angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*), yaitu jumlah kematian bayi berumur dibawah satu tahun per 1000 kelahiran pada periode tertentu. IMR ini merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat.

Angka kematian bayi di DKI Jakarta selama jangka waktu 1971-1980 mengalami penurunan. Pada tahun 1971 IMR di DKI Jakarta untuk laki-laki adalah 0,134 yang berarti selama tahun 1971 terdapat 134 kematian bayi per 1000 kelahiran bayi laki-laki hidup. Pada tahun 1980 angka tersebut menurun menjadi 0,089. Untuk wanita juga turun dari 0,115 pada tahun 1971 menjadi 0,073 pada tahun 1980. IMR pada laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan terjadi pada seluruh propinsi di Indonesia pada tahun 1971 dan 1980. Kenyataan ini sering

ditafsirkan bahwa bayi perempuan lebih tahan daripada bayi laki-laki.

Dari analisa Sensus Penduduk 1980, ditemukan adanya hubungan yang konsisten antara pola mortalitas bayi di DKI Jakarta dengan latar belakang sosial ekonomi ibu. Wanita yang menikah pada usia yang lebih muda mengalami tingkat mortalitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan wanita yang menikah lebih tua. Wanita yang tidak bersekolah mengalami tingkat kematian bayi tertinggi dibandingkan dengan wanita yang bersekolah. Demikian juga wanita yang tidak bekerja atau bekerja non pertanian mempunyai tingkat kematian bayi lebih rendah daripada tingkat kematian bayi yang dicapai oleh wanita yang bekerja di bidang pertanian.

Penurunan IMR antara tahun 1971–1980 diikuti naiknya harapan hidup pada waktu lahir. Pada tahun 1971 harapan hidup pada waktu lahir adalah 47,9 tahun dan meningkat menjadi 56,0 tahun pada tahun 1980. Demikian juga untuk perempuan, dari 50,8 tahun pada tahun 1971 menjadi 59,5 tahun pada tahun 1980. Perbaikan dan peningkatan fasilitas kesehatan dapat diduga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya (Aswatini dan Mudjiani, 1986:26-7). Bila dibandingkan dengan keadaan Indonesia pada tahun 1979, harapan hidup waktu lahir di DKI Jakarta sedikit lebih tinggi, karena angka untuk Indonesia pada tahun tersebut adalah 50 tahun (LDFEUI, 1980:33).

2.5 Pertumbuhan Angkatan Kerja dan Lapangan Pekerjaan.

2.5.1. *Pertumbuhan Angkatan Kerja*

Dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah golongan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah golongan penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain.

Sensus Penduduk Jakarta menunjukkan bahwa pada kelompok umur muda (10–19 tahun), jumlah angkatan kerja lebih rendah dibandingkan dengan jumlah bukan angkatan kerja, masing-masing 12,3 persen dan 48,3 persen. Hal itu dapat di-

mengerti karena pada umur muda baik laki-laki maupun perempuan masih duduk di bangku sekolah.

Bila dilihat menurut golongan umur dan jenis kelamin, ternyata perempuan Jakarta lebih awal masuk dalam angkatan kerja daripada laki-laki. Selain itu, permintaan tenaga kerja usia muda lebih terbuka untuk wanita. Hal ini dapat dihubungkan dengan pesatnya pertumbuhan industri pengolahan yang banyak melibatkan pekerja wanita usia muda dengan pendidikan tidak terlalu tinggi. Namun setelah memasuki umur 20 tahun, persentase angkatan kerja wanita menurun. Rupanya pada usia 20 ke atas banyak wanita memutuskan untuk mengurus rumah tangga daripada bekerja. Suatu pertimbangan yang dapat dimengerti mengingat pendidikan mereka yang tidak cukup tinggi tentu mereka menganggap dengan memilih tetap bekerja tidak dapat menjadi jaminan bahwa masa depannya akan lebih baik. Hal lain yang menjadi bahan pertimbangan barangkali adalah kepentingan rumah tangga, dimana mengurus rumah tangga bagi seorang wanita (Indonesia pada umumnya) dinilai lebih utama daripada pekerjaan lain di luar rumah.

Pada Tabel 12. dapat dilihat bahwa selama kurun waktu hampir sepuluh tahun, angkatan kerja di Jakarta secara keseluruhan mengalami kenaikan sebanyak 653.084 atau 4,5% tiap tahunnya. Bila dilihat menurut jenis kelamin ternyata pertumbuhan angkatan kerja wanita lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu 5,0 persen sedangkan laki-lakinya 4,0 persen. Hal tersebut mungkin disebabkan karena kesempatan kerja untuk wanita lebih terbuka sehingga wanita mempunyai kecenderungan untuk masuk dalam angkatan kerja (Aswatini dan Mudjiani, 1986: 38).

2.5.2. Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/industri di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Pembagian lapangan pekerjaan biasanya digolongkan ke dalam tiga sektor, yaitu A, M dan S. Sektor A adalah pertanian;

Tabel 12.
Pertumbuhan Angkatan Kerja di DKI Jakarta
Tahun 1971-1980

Jenis Kelamin	Jumlah Angkatan Kerja		Perubahan	% perubahan per tahun
	1971	1980		
Laki-laki	1.036.024	1.480.280	444.256	4,0
Perempuan	315.370	524.198	208.828	5,0
Jumlah	1.351.394	2.004.478	6.533.084	4,5

Sumber: Sensus Penduduk 1980, Seri S No. 11
 Sensus Penduduk 1971, Seri E No. 09.
 Aswatini dan Mudjiani 1986: 38.

sektor M meliputi pertambangan, industri, bangunan, listrik, air dan gas. Sedangkan sektor S terdiri dari perdagangan, angkutan/komunikasi, keuangan dan jasa.

Berdasarkan Sensus penduduk tahun 1971 dan 1980 (Tabel 13) dapat dilihat bahwa penduduk bekerja terutama pada sektor S, mencapai 73,9 persen pada tahun 1971 dan meningkat menjadi 75,1 persen pada tahun 1980. Di antara kategori sektor S, sektor jasa menempati urutan teratas kemudian disusul perdagangan dan angkutan/komunikasi. Besarnya tenaga kerja yang terserap pada sektor S ini mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja di sektor lain. Hal ini dapat dimengerti karena bekerja di sektor ini lebih mudah daripada di sektor lain. Banyak pekerjaan di sektor S, terutama jasa dan perdagangan merupakan sektor informal yang umumnya dapat diciptakan sendiri dan tidak terlalu menuntut tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, suatu hal yang lebih dituntut oleh bidang keuangan tentunya.

Sektor A (pertanian) menduduki tempat terendah di antara sektor-sektor lain, yaitu 3,8 pada tahun 1971 dan menurun lagi menjadi hanya 1,9 persen. Angka-angka tersebut memberi

Tabel 13.
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Tahun 1971-1980

Lapangan Pekerjaan		1971	1980
A	Pertanian	3,8	1,9
M	Pertambangan	0,3	0,7
	Industri	9,1	14,9
	Listrik, air, gas	0,6	0,6
	Bangunan	7,2	6,7
Semua M		17,3	23,0
S	Perdagangan	24,8	24,6
	Angkutan/komunikasi	10,7	8,3
	Keuangan	2,8	3,4
	Jasa	35,6	38,1
Semua S		73,9	75,1
Lain-lain		5,0	0,03
%		100	100
N		1.283.865	1.898.371

Sumber: Sensus Penduduk 1980, Seri S No. 11, Tabel 33.

Sensus Penduduk 1971, Seri E No. 09.

Aswatini dan Mudjianti 1986: 40

Catatan: Tidak termasuk "tak terjawab".

gambaran bahwa ciri kehidupan kota semakin menonjol di mana sektor pertanian menjadi semakin berkurang, sebaliknya sektor M, khususnya industri menjadi semakin menonjol, yaitu 9,1 per-

sen pada tahun 1971 dan bertambah besar menjadi 14,9 persen pada tahun 1980.

Bila dibandingkan dengan keadaan Indonesia, polanya sangat berbeda karena Sektor A (pertanian) masih sangat mendominasi, yaitu 64,28 persen pada tahun 1971 dan mengalami penurunan menjadi 55,43 persen pada tahun 1980. Sedangkan sektor M justru menduduki tingkat terendah, yaitu hanya 8,45 persen pada tahun 1971 dan mengalami kenaikan menjadi 13,18 persen pada tahun 1980 (Suparman, 1986: 20).

2.6 Pendidikan dan Pekerjaan

Berdasarkan Sensus tahun 1971, dapat diketahui bahwa seluruh penduduk DKI Jakarta yang berumur di atas 10 tahun, ternyata 22,67 persen di antaranya tidak sekolah. Namun dalam satu dasawarsa kemudian mengalami penurunan sangat menyolok, hingga tinggal 11,18 persen yang tidak bersekolah. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh usaha pemerintah DKI Jakarta dengan mengadakan pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung SD yang sudah dimulai sejak tahun 1966 sampai setidaknya tahun 1976. Tidak kurang dari 407 Sekolah Dasar dibangun selama periode tersebut, ditambah 179 buah SD Inpres dan 54 SD-MHT dan rehabilitasi terhadap sekitar 221 SD dan 132 buah SD-inpres (Gita Jaya, 1977: 176-180).

Di samping itu penduduk yang berpendidikan SMTP dan SMTA juga mengalami kenaikan. Menarik untuk diketahui adalah perbandingan penduduk yang berpendidikan SMTP dan SMTA. Pada tahun 1971 penduduk dengan tingkat pendidikan SMTP lebih banyak daripada SMTA, tapi pada tahun 1980 berubah karena penduduk dengan tingkat pendidikan SMTA mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu dari hanya 8,44 persen pada tahun 1971 menjadi 16,49 persen pada tahun 1980. Sementara SMTP hanya naik kurang dari 3 persen, yaitu dari 11,35 persen pada tahun 1971 menjadi 14,13 persen pada

tahun 1980 (lihat tabel 14). Naiknya persentase SMTP dan SMTA kecuali karena harus menampung lulusan SD dan SMTP yang proporsinya tidak seimbang (tahun 1971 : SD 26,05 persen; SMTP 11,35 persen dan SMTA 8,44 persen), juga mungkin disebabkan karena jumlah fasilitas gedung yang juga bertambah. Selama periode 1967–1976 dibangun tidak kurang dari 279 buah gedung baru ditambah 66 buah hasil rehabilitasi, semuanya untuk Sekolah Lanjutan (*Gita Jaya*, 1977:176-177; lihat hal. 137-141 pada Bab III).

Tabel 14.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 1971–1980

Tingkat Pendidikan	1971**	1980*
Tidak Sekolah	22,67	11,18
Belum Tamat SD	29,25	29,87
Sekolah Dasar	26,05	25,40
SMTP	11,35	14,13
SMTA	8,44	16,49
Akademi/Perguruan Tinggi	2,24	2,94
Jumlah	100	100
N	3.111.357	4.115.432

Sumber: * BPS, 1984c., Hal. 105.

** Sensus Penduduk 1971, Seri E No. 09.

Aswatini dan Mudjiani 1986: 53

Pendidikan tinggi agaknya masih terlalu jauh dari jangkauan sebagian besar penduduk DKI Jakarta. Meskipun persentase SMTA naik dengan cepat, namun yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi sangat sedikit. Dari 2,24 persen pada tahun 1971 menjadi 2,94 persen, berarti tidak lebih dari satu persen pun kenaikannya. Sebabnya mungkin karena fasilitas gedung untuk Perguruan Tinggi sangat sedikit, sedangkan Perguruan Tinggi

swasta yang kecuali juga masih sedikit, biayanya pun sangat mahal. Sampai dengan tahun 1980 dapat diketahui bahwa jumlah Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta sebanyak 3.243; SMTP sebanyak 673 dan SMTA hanya 483. Kelihatan jelas bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit sarana yang ada. Bahwa sarana pendidikan yang lebih tinggi masih kurang dapat dilihat rasio penduduk terhadap jumlah sekolahnya. Tabel 15, menggambarkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan makin besar angka rasionya.

Tabel 15.
Rasio Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Sekolah
di DKI Jakarta Tahun 1980

Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk	Rasio
SD	3.243	938.981 ¹⁾	290
SMTP	673	439.475 ²⁾	653
SMTA	483	495.908 ³⁾	1.026

Sumber : Sensus Penduduk 1980, Seri S No. 11.

Keterangan: 1) Penduduk Umur 7-12

2) Penduduk Umur 13-15

3) Penduduk Umur 16-18

Tingkat pendidikan agaknya mempunyai kaitan yang erat dengan pilihan lapangan kerja. Dari Tabel 16 dapat dilihat bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan rendah paling banyak mengisi sektor pertanian. Sejalan dengan naiknya tingkat pendidikan persentase pekerja di sektor pertanian menurun. Kecuali pertanian, sektor lain yang menyerap tenaga berpendidikan rendah adalah perdagangan, industri pengolahan dan angkutan serta komunikasi. Sedangkan pekerja yang berpendidikan tinggi terutama mengisi lapangan pekerjaan pertambangan, listrik, gas dan air serta keuangan. Kecenderungan yang sama dapat dilihat pula pada pekerja dengan tingkat pendidikan menengah.

Tabel 16.
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan
yang Ditamatkan dan Lapangan Kerja

Pendidikan	Lapangan Pekerjaan Utama									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Tidak pernah sekolah	41,9	2,7	5,5	2,0	10,4	15,9	5,8	1,1	11,1	11,1
Tidak/Belum Tamat SD	31,9	9,3	22,7	7,6	29,1	25,2	10,0	7,7	20,8	22,3
Sekolah Dasar	16,8	11,7	28,2	18,1	30,0	28,7	29,1	14,9	22,6	25,5
SLP Umum	3,2	8,6	13,6	12,9	7,7	12,2	15,9	13,1	10,7	11,6
SLP Kejuruan	0,5	2,0	2,4	4,2	2,1	1,2	2,5	1,9	2,3	2,0
SLA Umum	3,0	31,9	13,4	14,7	9,2	11,2	14,3	33,5	14,5	13,7
SLA Kejuruan	1,3	13,9	10,6	25,7	7,5	3,7	7,7	12,0	9,9	8,2
Akademi	0,8	9,5	2,0	5,1	1,6	1,1	3,4	7,8	3,1	2,8
Universitas	0,6	10,4	1,6	9,7	2,2	0,8	0,8	8,0	4,4	2,8
%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	36.922	14.128	285.228	10.916	128.515	470.605	159.098	64.239	740.351	1.910.002

Sumber : Sensus Penduduk 1980, Seri S, No. 11

Catatan : 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air
5. Perdagangan Besar

6. Perdagangan Eceran
1. Angkutan, Perdagangan, Komunikasi
8. Keuangan/Asuransi
9. Jasa Kemasyarakatan

Kecenderungan di DKI Jakarta memiliki pola yang sama dengan keadaan Indonesia. Kalau di DKI Jakarta sektor pertanian diisi oleh sekitar 80 persen pekerja berpendidikan SD dan tidak pernah sekolah, untuk Indonesia sekitar 63 persen pada tahun 1971 dan 54 persen pada tahun 1980. Demikian pula pada tingkat-tingkat pendidikan yang lebih tinggi angka persentase pekerja yang masuk ke sektor pertanian semakin menurun (lihat Suparman, 1986:22). Kenyataan ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan, karena sektor yang amat penting di Indonesia tidak hanya semakin ditinggalkan tetapi juga tidak disukai oleh pekerja-pekerja yang pendidikannya tinggi.

Tabel 17 memberikan gambaran persentase penduduk yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis pekerjaan utamanya.

Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah (SD dan yang tidak pernah sekolah) terutama mengisi usaha penjualan, jasa dan usaha pertanian. Sedangkan mereka yang menamatkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi cenderung menjadi tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan. Usaha penjualan, jasa dan pertanian semakin menurun persentasenya. Pola yang serupa nampak pula di Indonesia (lihat Suparman, 1986:21).

Terdapat kenyataan yang menarik bila penduduk yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan dikaitkan dengan status pekerjaan utamanya. Tabel 18 menunjukkan bahwa pekerja dengan latar pendidikan rendah justru paling banyak berusaha sendiri, baik tanpa bantuan maupun dengan bantuan orang lain. Sebaliknya pekerja dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi paling banyak menjadi buruh atau karyawan. Ini berarti bahwa sektor-sektor penting dalam kehidupan ekonomi banyak sekali ditopang oleh masyarakat kelas bawah.

Tabel 17.
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan
yang Ditamatkan dan Jenis Pekerjaan

Pendidikan	Jenis Pekerjaan Utama								
	0/1	2	3	4	5	6	7/8/9	x/oo	
Tidak pernah sekolah	1,2	0,4	0,6	17,3	20,4	42,1	7,7	0,9	11,1
Tidak/Belum tamat SD	3,7	2,4	3,2	26,2	34,1	32,1	26,8	3,1	22,3
Sekolah Dasar	7,1	4,4	10,1	29,4	27,3	17,3	33,7	21,9	25,4
SLP Umum	7,5	6,0	13,9	12,0	7,6	3,3	13,1	27,0	11,7
SLP Kejuruan	2,7	1,2	2,2	1,2	1,1	0,5	2,7	6,9	2,0
SLA Umum	19,7	30,5	39,5	9,9	5,9	2,3	7,5	21,9	13,7
SLA Kejuruan	33,4	6,7	14,1	2,8	2,8	1,3	7,4	9,7	8,2
Akademi	10,5	16,7	8,7	0,7	0,5	0,7	0,1	3,9	2,8
Universitas	14,2	31,7	7,7	0,5	0,3	0,4	0,4	2,7	2,8
%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	126.691	18.300	282.936	430.879	337.920	37.019	632.050	38.747	1.904.542

Sumber : Sensus Penduduk, 1980 Seri S No. 11 Tabel 37.
 Catatan : 0/1. Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis
 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan
 3. Tenaga Tata Usaha dan Tenaga yang sejenis
 4. Tenaga usaha penjualan

5. Tenaga usaha jasa
 6. Tenaga usaha pertanian
 7/8/9. Tenaga produksi operator alat angkutan, pekerja kasar
 x/oo. Lain-lain.

*) Tidak termasuk yang Tidak Terjawab.

Tabel 18.
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama

Pendidikan	Status Pekerjaan *					Jumlah
	1	2	3	4	5	
Tidak pernah Sekolah	21,1	18,2	5,7	7,4	16,5	11,1
Tidak/belum Tamat SD	30,0	30,1	19,7	18,9	31,7	22,3
Sekolah Dasar	29,2	28,9	27,2	23,9	29,1	25,5
SLP Umum	9,3	10,6	13,6	12,3	13,3	11,7
SLP Kejuruan	1,4	1,6	1,9	2,3	0,8	2,0
SLA Umum	6,0	6,9	16,7	16,9	5,7	13,7
SLA Kejuruan	2,1	2,7	8,2	10,8	1,8	8,1
Akademi	0,4	0,6	2,8	3,8	0,3	2,8
Universitas	0,5	0,4	4,2	3,7	0,2	2,8
%	100	100	100	100	100	100
N	359.921	144.487	42.755	1.299.604	69.238	1.916.005

Sumber : Sensus Penduduk 1980, Seri S No. 11, Tabel 38.

Catatan : 1. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain
 2. Berusaha sendiri dengan bantuan anggota rumah tangga
 3. Berusaha dengan buruh tetap
 4. Buruh/karyawan
 5. Pekerja keluarga

*) Tidak termasuk yang Tak Terjawab.

3. MIGRASI

3.1 Migrasi dan Urbanisasi

Kecuali Kelahiran dan kematian, migrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur dan pertumbuhan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas ne-

gara/politik maupun batas administratif dalam suatu negara. Adapun orangnya yang pindah tempat, atau disebut migran, dijelaskan menurut definisi Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai "A person who changes his place of residence from one political or administrative area to another". Pengertian migrasi dan migran selalu dikaitkan dengan dimensi waktu dan daerah. Menurut definisi yang digunakan pada waktu Sensus Penduduk di Indonesia tahun 1961, seseorang dapat disebut migran bila ia telah tinggal di daerah tujuan paling sedikit 3 bulan sedangkan Sensus Penduduk tahun 1971 dan 1980 batas minimalnya adalah 6 bulan. Pemberian batasan waktu memang dianggap perlu karena migrasi memang dikaitkan dengan perpindahan tempat tinggal yang relatif permanen.

Dimensi daerah secara garis besar dibedakan antara perpindahan antar negara atau Migrasi Internasional dan perpindahan yang terjadi dalam satu negara misalnya antar propinsi, kota atau kesatuan administrasi yang dikenal dengan Migrasi Intern. Di samping perpindahan tersebut ada jenis perpindahan yang batasan waktunya lebih pendek dari migrasi dan tidak bermaksud untuk menetap selamanya di tempat tujuan, yaitu dikenal dengan mobilitas sirkuler yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan (ada yang memberi batas waktu 179 hari). Jika jangka waktunya lebih pendek lagi, misalnya dalam satu hari, yaitu pagi berangkat dan sore kembali yang dilakukan terus menerus setiap harinya dikenal dengan istilah "commuting" atau "nglajju". Di Jakarta jenis-jenis perpindahan penduduk seperti di atas, baik yang masuk ke Jakarta (*in migration*) maupun yang keluar dari Jakarta (*out migration*), telah dan sedang terus berlangsung.

Adapun yang dimaksud dengan urbanisasi adalah proses suatu daerah menjadi kota, di mana proses tersebut dapat merupakan perubahan secara bertahap dari suatu daerah bukn-kota menuju kehidupan kota. Urbanisasi juga diartikan sebagai "proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, sehingga terjadi konsentrasi pemukiman penduduk di kota (Suroso 1985:

33). Kecuali itu urbanisasi dapat juga dikatakan sebagai proses pertambahan penduduk kota yang berasal dari pendatang baru, jadi tidak termasuk pertambahan alamiah, tidak terbatas mereka yang dari daerah atau desa, tetapi bisa juga dari kota atau negara lain. Urbanisasi dalam arti yang kedua dan ketiga memang dialami oleh Jakarta, jadi dalam hal ini urbanisasi dapat dikatakan sebagai migrasi masuk (*in migration*) ke dalam wilayah Jakarta. Sedangkan urbanisasi dalam artian yang pertama dapat dikaitkan dengan proses terbentuknya "kota-kota baru" di daerah-daerah pinggiran Jakarta (*hinterlands*).

3.2 Migrasi di Jakarta

Sejak kapan arus migran pertama kali memasuki wilayah Jakarta, sulit ditentukan secara pasti. Hal ini disebabkan karena sulit ditentukan siapa sebenarnya yang harus disebut sebagai penduduk "asli" Jakarta. Kalau kita mengembalikan pada masa yang paling awal, adalah mungkin sekali bahwa penduduk "asli" Jakarta adalah sebenarnya migran juga. Mungkin dari Jawa Timur atau Jawa Tengah tapi mungkin juga dari wilayah lain. Berdasarkan data arkeologi, studi bahasa, seni dan teknologi bercocok tanam, Krom dapat menyimpulkan bahwa migrasi internasional bahkan telah terjadi sejak abad-abad sebelum Masehi (Djalal, 1977).

Apabila yang dimaksud penduduk Jakarta "asli" adalah mereka yang tinggal di wilayah Jakarta sebelum masuknya kolonial Belanda, maka sebagian orang Cina dan mungkin juga beberapa suku bangsa Indonesia dapat dianggap sebagai penduduk Jakarta "asli". Demikian juga bila kita mau mengatakan bahwa penduduk Jakarta "asli" adalah mereka yang telah lahir dan tinggal di Jakarta sebelum kemerdekaan, maka penduduk Jakarta "asli", kecuali mereka yang disebut di atas, juga sebagian orang-orang Eropah dan Timur Asing masuk di dalamnya.

Istilah migran yang digunakan oleh ahli kependudukan memang cukup operasional untuk tujuan sensus penduduk.

Namun perbedaan yang jelas antara penduduk non-migran dan penduduk asli rupanya tidak mendapat perhatian. Sampai sekarang yang dikenal sebagai penduduk asli adalah mereka yang disebut sebagai "orang betawi", umumnya tinggal di pinggiran Jakarta, sedangkan selebihnya yang umumnya tinggal di wilayah pusat Jakarta adalah penduduk pendatang. Perbedaan oleh umum itu rupanya didasarkan atas faktor latar belakang budaya dan keturunan. Oleh karena itu kiranya perlu dibedakan pengertian non-migran keturunan orang betawi dan berbudaya betawi, dan non-migran yang bukan keturunan dan tidak berbudaya betawi.

Sarjana pertama yang melakukan penelitian mengenai komposisi penduduk Jakarta berdasarkan suku bangsa adalah Lance Castles yang ditulisnya pada tahun 1967 dengan judul "The Ethnic Profile of Djakarta". Tabel 19 menggambarkan komposisi penduduk Jakarta pada tahun 1961 sebagaimana dimuat dalam tulisan Lance Castles. Tabel tersebut secara jelas menggambarkan bahwa penduduk Jakarta asli jumlahnya hanya 655.400 orang, dan hanya menduduki urutan ketiga dari 16 kelompok suku bangsa pribumi yang menjadi penduduk Jakarta. Jika dibandingkan dengan total penduduk Jakarta pada waktu itu ternyata jumlah penduduk Jakarta asli kurang dari seperempatnya atau persisnya hanya 22,9 persen dari jumlah seluruhnya.

Apabila kita memberi perhatian pada banyaknya pendatang yang menjadi penduduk Jakarta pada tahun 1961. Maka kita dapat memperkirakan bahwa arus migran yang masuk ke wilayah Jakarta tentu sudah lama terjadi. Suku bangsa Sunda, Jawa dan Madura serta Minangkabau adalah suku-buku bangsa pribumi yang paling awal bermigrasi ke wilayah Jakarta. Sebabnya adalah kecuali karena jaraknya yang dekat dengan Jakarta, khususnya yang berasal dari Jawa dan Sunda, juga karena kebiasaan merantau khususnya suku Minangkabau. Di samping itu terdapat juga penduduk non-pribumi yang jumlahnya 10,1

Tabel 19
Taksiran Penduduk Jakarta
Berdasarkan Sukubangsa Pada Tahun 1961

	Jumlah	Persen
Pribumi		
Jakarta Asli	655.400	22,9
Sunda	952.500	32,8
Jawa dan Madura	737.700	25,4
Aceh	5.200	0,2
Batak	28.900	1,0
Minangkabau	60.100	2,1
Kelompok Sumatera Selatan	54.900	1,2
Banjar	4.800	0,2
Kelompok Sulawesi Selatan	17.200	0,6
Kelompok Sulawesi Utara	21.000	0,7
Kelompok Maluku dan Irian	11.800	0,4
Kelompok Nusantara Timur	4.800	0,2
Kelompok Nusantara Barat	1.300	0,0
B a l i	1.900	0,1
Melayu dan kelompok lain Luar Jawa	19.800	0,7
Tidak diketahui	38.600	1,3
Non-pribumi		
Cina	294.000	10,1
Lain-lain	16.500	0,6
Jumlah Penduduk	2.906.500	100,00

Sumber: Castle 1967: 185.

Singarimbun 1977: 6.

persen dari seluruh penduduk Jakarta, yaitu Cina. Jumlahnya yang meliputi 294.000 itu menempati urutan keempat terbanyak sesudah Sunda, Jawa-Madura dan Minangkabau. Hal itu dapat diterangkan karena orang-orang Cina memang sudah ada di Jakarta jauh sebelum kemerdekaan, bahkan mungkin jauh

sebelum suku-suku bangsa pribumi dari luar Jawa datang ke tempat yang sama.

Bagaimana perkembangan komposisi penduduk Jakarta menurut suku-bangsa sesudah tahun 1961, agaknya sulit diperoleh. Kebijaksanaan politik agaknya memberi pengaruh pada caranya komposisi penduduk diperlihatkan kepada masyarakat. Dalam penerbitan-penerbitan yang resmi, komposisi penduduk tidak lagi disusun berdasarkan suku bangsa, tetapi berdasarkan propinsi. Demikian juga jumlah dan komposisi migran yang datang ke Jakarta juga didasarkan atas daerah atau propinsi asal.

Apabila jumlah pendatang ke Jakarta mau dilihat perkembangannya setiap 10 tahun sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1980, maka tampak pada Tabel 20 bahwa pada periode 1961-1971 pendatang terbanyak berasal dari Jawa Barat, yaitu 382.500 orang atau 37,4 persen dari seluruh penduduk Jakarta. Kemudian disusul oleh daerah Jawa Tengah dengan jumlah 281.354 orang atau 27,5 persen. Namun dalam perkembangan satu dasawarsa kemudian, ternyata daerah Jawa Tengah menggeser posisi Jawa Barat ke urutan teratas dengan jumlah 387.810 atau 34,5 persen sedangkan Jawa Barat jumlahnya 317.810 atau hanya tinggal 28,0 persen. Adalah sangat menarik bahwa ketika arus pendatang ke Jakarta dari Jawa Barat dan sebagian besar daerah-daerah Indonesia mengalami penurunan, sebaliknya pendatang dari daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Kalimantan Barat justru meningkat. Apabila dilihat proporsi migran per 1000 penduduk di daerah asal, maka akan tampak bahwa sekitar 17 orang setiap seribu penduduk Jawa Barat melakukan perpindahan selama periode 1961-1971 dan menurun menjadi 12 per seribu penduduk pada periode 1971-1980. Untuk Jawa Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Kalimantan Barat masing-masing 10, 7, 15 dan 6 orang per seribu pada periode 1961-1971 menjadi 15, 16, 10 dan 9 orang per seribu pada periode 1971-1980.

Tabel 20.
Jumlah dan Persentase Pendatang ke DKI Jakarta
Selama 10 Tahun antara Tahun 1961-1971 dan
antara 1971-1980 Menurut Daerah Asal

Daerah	1961-1971		1971-1980	
	Jumlah Pendatang	% Pendatang	Jumlah Pendatang	% Pendatang
1. Jawa Barat	382.500	37,4	317.810	28,0
2. Jawa Tengah	281.354	27,5	387.810	34,5
3. Jawa Timur	84.499	8,3	104.821	9,2
4. Sumatera Utara	46.546	4,5	83.398	7,3
5. Sumatera Barat	42.134	4,1	54.862	4,8
6. D.I. Yogyakarta	38.297	3,1	38.804	3,4
7. Sumatera Selatan	34.283	3,4	27.546	2,4
8. Sulawesi Selatan	20.632	2,1	23.154	2,0
9. Kalimantan Barat	14.438	1,4	16.525	1,5
10. Riau	9.703	0,9	10.029	0,8
11. Sulawesi Utara	9.252	0,9	9.431	0,8
12. Luar Negeri	8.120	0,8	8.242	0,7
13. Lampung	6.812	0,7	5.769	0,5
14. D.I. Aceh	6.422	0,6	5.628	0,4
15. Maluku	5.294	0,5	5.477	0,3
16. Kalimantan Selatan	5.294	0,5	4.975	0,4
17. Jambi	5.126	0,5	4.742	0,4
18. Bali	3.670	0,4	4.149	0,3
19. N.T.T.	3.056	0,3	3.856	0,3
20. Kalimantan Timur	2.943	0,28	3.074	0,2
21. Sulawesi Tenggara	2.698	0,26	2.937	0,2
22. Bengkulu	2.642	0,25	2.193	0,2
23. Irian Jaya/Irian Barat	2.473	0,29	1.830	0,16
24. N.T.B.	2.137	0,18	1.411	0,12
25. Sulawesi Tenggara	1.878	0,18	1.194	0,10
26. Kalimantan Tengah	952	0,09	994	0,08
Jumlah	1.022.796	100%	1.134.985	100%

Sumber: BPS. Sensus Penduduk 1971 dan 1980.
 BKLH DKI Jakarta 1984: 32.

Mengenai penurunan pendatang dari Jawa Barat ada yang menganggap disebabkan karena pada periode 1971-1980 telah ada perluasan wilayah DKI Jakarta seperti Tangerang, Ciledug, Ciputat dan lain-lain (daerah-daerah tersebut semula merupakan daerah Jawa Barat). Di samping itu sarana transportasi dan komunikasi sudah semakin baik. Sehingga penduduk Jawa Barat tidak perlu berpindah tempat karena perjalanan ke pusat kota yang sebelumnya terasa jauh dan sulit sudah menjadi terasa mudah dan dekat. Bahkan barangkali untuk sebagian besar kebutuhannya sudah dapat diperoleh di daerah-daerah pinggiran yang sedang tumbuh menjadi kota. Sebaliknya mengenai naiknya jumlah pendatang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak mudah untuk mencari sebab-sebabnya. Namun dapat pula diajukan kemungkinan apakah makin banyaknya pendatang dari dua daerah tersebut berkaitan dengan semakin menyempitnya wilayah pertanian yang mereka miliki?

DKI Jakarta merupakan propinsi di Indonesia yang paling banyak menerima migran. Dengan jumlah pendatang hampir 1,8 juta pada tahun 1971 berarti kira-kira 46 persen penduduk Jakarta dilahirkan di luar wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 1980 jumlah pendatang DKI Jakarta meningkat menjadi hampir 2,6 juta. Namun jika dilihat dari persentasenya menunjukkan penurunan, yaitu dari 36,50 persen pada tahun 1971 menjadi 33,60 persen pada tahun 1980. Keadaan ini biasanya dihubungkan dengan semakin luasnya pembangunan di daerah-daerah sehingga arus migrasi ke DKI Jakarta dapat ditahan oleh daerah-daerah tersebut. Bahwa DKI Jakarta mempunyai beban yang paling besar dalam menerima migran di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 21. Dari 1.703.031 orang migran seumur hidup di seluruh Indonesia (migran seumur hidup adalah seseorang yang pada waktu pencahan sensus tinggal di tempat pencacahan, tetapi lahir di luar wilayah itu), ternyata DKI Jakarta menerima neto sebanyak 1.659.420 orang atau sekitar 30 persen pada tahun 1971. Pada tahun 1980 terdapat 9.971.785 migran seumur

Tabel 21.
Migran Selama Hidup DKI Jakarta dan Indonesia
Tahun 1971 & 1980

	Jumlah Penduduk	Jumlah Migran			Persentase Migran		
		Masuk	Keluar	Netto	Masuk	Keluar	Netto
1971							
DKI Jakarta	4.546.492	1.791.635	135.215	1.659.420	39,41	2,91	36,50
Indonesia	118.367.850	5.703.037	5.703.037	0	4,82	4,82	—
1980							
DKI Jakarta	6.445.777	2.564.490	400.767	2.163.723	39,8	6,2	33,6
Indonesia	146.517.460	9.971.785	9.971.785	0	6,8	6,8	0

Sumber: Rahardjo 1985/1986: I/15

hidup di Indonesia, 2.163.723 di antaranya atau lebih dari 20 persen masuk ke wilayah DKI Jakarta.

3.3 Peranan Kaum Migran

Pada Tabel 21 di depan telah diperlihatkan bahwa seluruh daerah di Indonesia merupakan tempat asal migran. Itu berarti seluruh propinsi di Indonesia sejak tahun 1961 telah menyumbangkan migran ke kota Jakarta. Selama periode 1961-1971 dan periode 1971-1980 dapat diketahui bahwa mayoritas migran di Jakarta berasal dari daerah yang dekat. Lima propinsi asal migran yang terbanyak memberikan sumbangannya kepada Jakarta, sebagaimana sudah dikemukakan adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Tentu tidak kebetulan bahwa kelima daerah tersebut mewakili empat kelompok etnis yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, yaitu Sunda (Jawa Barat), Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Batak (Sumatra Utara), dan Minangkabau (Sumatra Barat). Lebih dari 75 persen migran di DKI Jakarta berasal dari keempat propinsi di pulau Jawa, sedangkan selebihnya dari daerah-daerah luar Jawa, baik pada periode 1961-1971 maupun periode 1971-1980.

Adalah menarik bahwa jumlah migran dari Jawa Tengah saja telah melampaui Jawa Barat pada periode 1971-1980. Padahal hasil penelitian Mochtar Naim memberikan gambaran bahwa orang-orang Jawa sebenarnya tidak memiliki kecenderungan tinggi untuk bermigrasi, bahkan termasuk golongan terendah bila dibandingkan dengan orang-orang dari suku-suku Bugis, Ambon, Banjar, Batak terlebih lagi Bawean dan Minangkabau (Naim 1981:290-2, khususnya Bagan IV-1).

Apabila kita melihat latar belakang sejarah, kecenderungan serupa itu mungkin dapat dikaitkan dengan hasil penelitian Geertz yang menyebutkan bahwa proporsi tanah pertanian di Jawa sudah tidak seimbang lagi. Jumlah penduduk pedesaan di Jawa menurut sensus tahun 1963 ada 11,5 juta rumah tang-

ga, 33 persen dari jumlah itu menguasai lebih dari 0,5 hektar tanah pertanian, 54 persen menguasai kurang dari 0,5 hektar dan 13 persen tidak bertanah. Itu data tahun 1963. Pada tahun-tahun kemudian dapatlah kita memperkirakan bahwa golongan tak bertanah dan petani gurem tentu semakin bertambah dan proporsi semakin tidak seimbang lagi. Oleh karena itu dapat dimengerti bila arus migran dari Jawa yang semakin banyak masuk ke Jakarta sebagian besar dari golongan petani tersebut.

Kecuali itu latar belakang sejarah Jawa dianggap tidak memberikan gambaran yang baik bagi dunia usaha. Ada yang melihat bahwa sejarah Jawa merupakan serangkaian kisah yang berulang-ulang terjadi tentang penumpasan golongan pengusaha yang baru muncul oleh suatu golongan elit politik yang pada dasarnya memusuhinya. Proses tersebut terus berlangsung sejak jaman Portugis hingga akhir penjajahan Belanda, bahkan sampai masa-masa kemerdekaan. Walaupun muncul golongan elit yang memberikan kepemimpinan politik, namun tidak memberikan kepemimpinan ekonomi atau kepengusahaan, bahkan sering sikap dan tindakan mereka justru menghambat aktivitas kepengusahaan. Pengaruh Belanda di luar Jawa yang datangnya jauh lebih kemudian tidak memberikan efek yang meluas dan mendalam seperti di Jawa, sehingga mereka sempat mengembangkan kelompok pengusaha pribumi mereka masing-masing. Beberapa di antaranya, terutama Batak dan Minangkabau, bahkan memberikan pimpinan ekonomi di Jawa maupun di daerahnya sendiri (Higgins 1983:xv). Dalam kaitan ini sering dikemukakan bahwa sistem sosial matrilineal banyak mendorong laki-laki Sumatra Barat meninggalkan kampung halamannya. Hal lainnya adalah bahwa keadaan alam Sumatra Utara dikatakan merupakan dorongan pula bagi warganya untuk meninggalkan kampung halamannya.

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa tekanan-tekanan ekologis, ekonomis dan sosial budaya banyak mendorong orang-orang meninggalkan daerahnya.

Dari arah sebaliknya, Jakarta sebagai ibukota mempunyai daya tarik bagi kaum migran. Dengan semakin berkembangnya pembangunan di banyak bidang, maka bertambah pula perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja inilah yang menjadi daya tarik bagi mereka yang telah mendapat dorongan untuk meninggalkan tempat asalnya. Jakarta menarik para migran dari daerah-daerah pedesaan maupun perkotaan lain karena berbagai alasan. Beberapa alasan yang sering dikemukakan adalah karena kehidupan kota yang penuh gemerlapan, kemungkinan melanjutkan pendidikan dan harapan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang dapat diandalkan. Namun rupanya alasan-alasan di atas tidak semua dianggap sama pentingnya. Berdasarkan hasil penelitian Gordon Temple diketahui bahwa alasan utama migran memilih Jakarta adalah karena kota ini dianggap memberi harapan paling besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang dapat diandalkan (Temple 1986:84).

Di samping itu, ikatan kekeluargaan serta komunikasi antara migran dengan mereka yang ditinggalkan di daerah asalnya juga banyak menarik pendatang baru. Hasil penelitian LEKNAS—LIPI dan juga Gordon Temple menggambarkan bahwa komunikasi informal serupa itulah yang banyak menarik pendatang baru. Kalau ada migran yang berhasil dalam konkurensinya di Jakarta maka ia akan menarik saudara dan kenalannya sekampung untuk ikut mengadu untung. Hubungan demikian bersama dengan harapan memperoleh pekerjaan menjadi daya tarik Jakarta bagi kaum pendatang (Oey 1977:70).

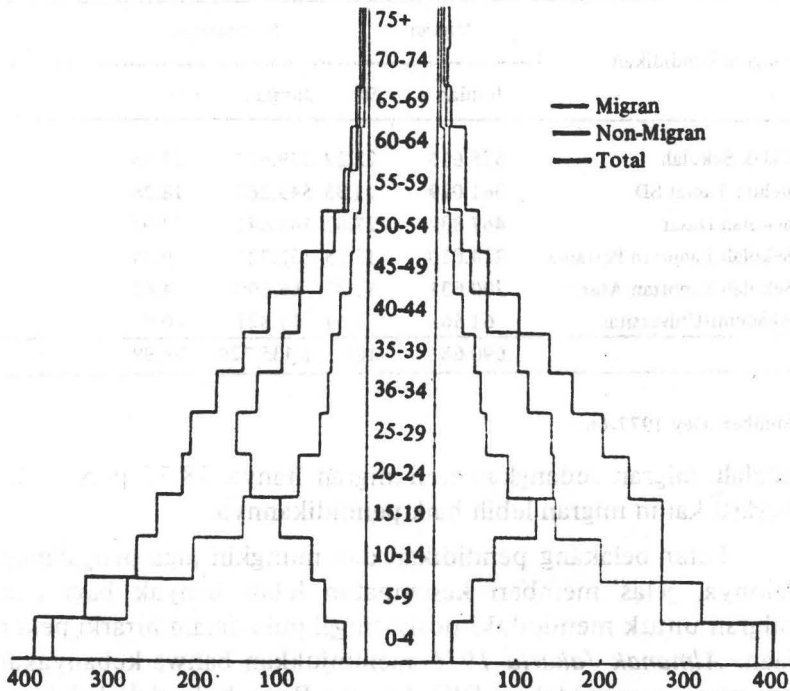
Di muka telah dikatakan bahwa pada tahun 1911 sekitar 40 persen penduduk DKI Jakarta adalah migran sedangkan pada tahun 1980 menurun menjadi 33,60 persen. Meskipun intensitas kaum migran menurun, namun peranannya tetap besar dalam perkembangan kota Jakarta. Peranan kaum migran bukan hanya dalam volume (meskipun persentase menurun tetapi jumlahnya bertambah, yaitu dari 1,8 juta pada tahun 1971 men-

jadi 2,6 juta pada tahun 1980), tetapi terutama karena sifat-sifat mereka.

Berdasarkan *Sensus Penduduk 1971* yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik, dapat ditunjukkan bahwa kaum migran yang datang ke Jakarta terutama masuk ke dalam kelompok umur 20–54 tahun, bahkan merupakan mayoritas dari seluruh penduduk Jakarta dari kelompok umur yang sama. Dalam ilmu kependudukan kelompok umur 20–54 tahun termasuk kelompok usia produktif, oleh karena itu gejala di atas dapat diartikan bahwa sumbangan terbesar dalam pembangunan Ibukota Jakarta diberikan oleh kaum migran (lihat Grafik 2.). Data tahun 1971 menunjukkan bahwa kaum migran merupakan mayoritas dari tenaga kerja Jakarta, terutama karena mereka memasuki ibukota ketika usianya menginjak dewasa. Dalam beberapa tahun berikutnya diketahui pula bahwa rata-rata usia migran yang masuk ke DKI Jakarta sekitar 19,5 tahun dan keadaan ini berlangsung secara hampir konstan. Data yang sama menunjukkan bahwa pada umumnya usia untuk bermigrasi adalah antara 10 dan 29 tahun. Dalam suatu periode tertentu, 60 persen migran tergolong dalam kelompok umur tersebut (Oey 1977:64).

Hal serupa dapat ditinjau dari segi pendidikannya. Ternyata bahwa tingkat pendidikan para migran jauh lebih tinggi daripada non-migran. Tabel 22 menunjukkan bahwa kaum migran di atas usia 10 tahun lebih banyak daripada jumlah non-migran pada tahun 1971, yaitu 1.690.685 berbanding 1.435.729 orang. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah tingkat pendidikan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan, jumlah migran semakin banyak dibandingkan dengan non-migran, baik dalam jumlah maupun persentasenya. Pada tingkat Sekolah Lanjutan Pertama, jumlah kaum migran hampir dua kali lipat non-migran dan pada tingkat Sekolah Lanjutan Atas jumlah migran lebih banyak lagi, yaitu lebih dari tiga kali lipat sedangkan pada tingkat pendidikan yang paling

Grafik 2.
Distribusi Penduduk DKI Jakarta Raya
Menurut Umar, Jenis Kelamin serta Status Migrasi 1971



Sumber: Oey 1977: 65

tinggi yaitu Akademi dan Universitas, jumlah migran bahkan mencapai lebih dari lima kali lipat jumlah non-migran (lihat Tabel 22.).

Secara umum perkembangannya memperlihatkan bahwa untuk mereka yang telah menyelesaikan Sekolah Dasar terdapat 35 persen lebih banyak kaum migran daripada non-migran; untuk SLP 69 persen: SLA 201 persen dan Akademi/Universitas mencapai 421 persen. Secara keseluruhan penduduk Jakarta yang telah menamatkan Sekolah Dasar ke atas, 56,43 persen

Tabel 22.
Migran dan Non-migran yang Berusia 10 Tahun Keatas
Menurut Tingkat Pendidikan di Jakarta Tahun 1971

Tingkat Pendidikan	Migran		Non-Migran	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak Sekolah	575.615	22,22	329.677	22,96
Belum Tamat SD	361.029	21,35	549.267	18,26
Sekolah Dasar	467.837	27,67	545.641	24,07
Sekolah Lanjutan Pertama	224.010	13,25	132.723	9,24
Sekolah Lanjutan Atas	200.631	11,87	66.600	4,64
Akademi/Universitas	61.565	3,64	11.821	0,82
	1.690.685	100%	1.435.729	99,99

Sumber: Oey 1977:66.

adalah migran sedangkan non-migran hanya 38,77 persen. Ini berarti kaum migran lebih baik pendidikannya.

Latar belakang pendidikan dan mungkin juga pengalaman lainnya, jelas memberi kesempatan lebih banyak bagi para migran untuk menduduki posisi tinggi pula dalam hirarki pekerjaan. *Almanak Jakarta 1976* menunjukkan bahwa kebanyakan penguasa pemerintahan DKI Jakarta Raya bukanlah kelahiran Jakarta. Demikian pula sepintas lalu terlihat bahwa dalam dunia usaha pun pimpinannya jarang berada di tangan mereka yang berkelahiran Jakarta. (Oey 1977:67).

Kecuali itu bahwa status sosial migran lebih tinggi daripada non-migran juga diperlihatkan dalam pola fertilitasnya. Pada umumnya ditemukan hubungan terbalik antara status sosial dan fertilitas. Semakin tinggi status sosial seseorang atau suatu kelompok orang, semakin rendah fertilitasnya. Pola fertilitas penduduk Jakarta menunjukkan bahwa jumlah anak yang dilahirkan hidup untuk setiap golongan umur, golongan non-migran menempati tingkat yang lebih tinggi daripada golongan

migran. Juga bila dilihat dari variabel pendidikan, yaitu bahwa para migran yang tingkat pendidikannya lebih tinggi tingkat fertilitasnya lebih rendah dibandingkan dengan non-migran (periksa Oey 1917:67, terutama perhatikan Grafik 2-nya).

4. KEBIJAKSANAAN KEPENDUDUKAN

Perkembangan kota Jakarta yang semakin pesat terutama dalam bidang pembangunan ekonomi dan fisik tidak sepenuhnya memberi keuntungan bagi Jakarta. Keadaan serupa itu justru merupakan faktor penarik utama bagi para pendatang dari luar daerah untuk mencoba mengadu nasib di Jakarta. Sebagai konsekuensinya penduduk Jakarta mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Meskipun angka persentase pertumbuhan penduduk memperlihatkan kecenderungan menurun, yaitu dari 6,6 persen pada dasawarsa 1950–1961 menjadi 3,98 persen pada dasa warsa 1971–1980, namun sesungguhnya yang menjadi masalah adalah jumlah penduduknya yang memperlihatkan kenaikan yang sangat besar dan pesat. Kota Jakarta yang semula direncanakan oleh Pemerintah Belanda sebelum perang hanya untuk menampung 600.000 penduduk, pada tahun 1950 telah berpenduduk lebih dari duakali lipat dan pada tahun 1980 telah mencapai jumlah 6.503.227 orang, atau hampir sebelas kali lipat.

Peningkatan jumlah penduduk yang sedemikian pesatnya tidak saja membawa masalah perlunya peningkatan secara kuantitatif sarana kotanya, tetapi juga memerlukan penataan kembali struktur kota secara kualitatif dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan baru seperti lapangan kerja, pemukiman, transportasi dan komunikasi.

Kenaikan penduduk tersebut, kecuali karena pertumbuhan alami, juga terutama disebabkan karena pendatang dari daerah-daerah di luar Jakarta. Seperti telah disebut di bagian depan bahwa pada tahun 1971 diketahui kira-kira 40 persen penduduk DKI Jakarta dilahirkan di luar Jakarta (tanpa memperhatikan

bahwa anak-anak para migran ini nantinya akan menjadi penduduk "asli" Jakarta). Meskipun pada tahun 1980 persentasenya menurun, yaitu menjadi 36,50 persen tetapi jumlah populasinya bertambah menjadi hampir 2,6 juta dari hanya 1,8 juta pada tahun 1971. Kecuali semakin bertambahnya jumlah migran, masalah lain yang menyertainya adalah karena sebagian besar dari mereka ini terdiri dari golongan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah sehingga pendapatannyapun kecil. Karena itu mereka tidak dapat segera menyesuaikan diri dengan kondisi kota. Secara liar mereka menempati lokasi-lokasi terbuka di sela-sela bagian kota yang bangunannya sudah diatur. Pemukiman yang mereka bangun menggunakan bahan yang sederhana, tanpa memperhatikan syarat pemukiman yang sehat dan secara bersama-sama mereka membentuk pemusatan penduduk dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Pada tahun 1961 tercatat sekitar 60 persen penduduk Jakarta tinggal di daerah-daerah perkampungan yang sangat padat. Di banyak daerah kepadatannya berkisar antara 400 dan 600 orang/Ha, dengan bangunan tidak bertingkat (*Gita Jaya*, 1977:221/).

Distribusi penduduk Jakarta juga merupakan masalah yang harus dihadapi oleh Pemerintah DKI Jakarta. Pada bagian depan sudah diperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang semakin membengkak masih sulit untuk ditekan, tetapi yang juga menjadi persoalan semakin rumit adalah persebaran penduduk yang ada sangat timpang. Tabel 1 di depan jelas memperlihatkan bahwa daerah-daerah yang luas wilayahnya sempit justru tingkat kepadatannya tinggi, bahkan untuk daerah Jakarta pusat termasuk amat tinggi, yaitu dengan 23.142 orang tiap kilometer persegi padahal luas wilayahnya hanya 54,46 km persegi, sedangkan Jakarta Timur yang luasnya mencapai 184,01 km persegi tingkat kepadatan penduduknya hanya 4,359 orang tiap kilometer persegi pada tahun 1971 dan pada tahun 1980 masih menunjukkan kecenderungan yang sama.

Menghadapi profil penduduk Jakarta serupa di atas memaksa Pemerintah DKI Jakarta mengambil tindakan untuk

mengimbangi kebutuhan penduduknya di banyak sektor. Usaha serupa itu memerlukan sarana-sarana administratif dan perundang-undangan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang diperlukan. Tentu saja tidak semua masalah ditangani secara serentak tetapi dengan memperhatikan skala prioritas dan tingkat kemungkinan yang dapat dilakukan.

Dalam Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai pengembangan tata ruang diperlukan suatu kebijaksanaan pokok yang antara lain melaksanakan berbagai kebijaksanaan kependudukan untuk menekan pertumbuhan penduduk agar pada tahun 2005 tidak lebih besar dari 12 juta dan distribusinya serasi dengan daya dukung lingkungan (BKLH DKI Jakarta 1985a:40). Dalam periode 1971–1980, peningkatan jumlah penduduk tercatat sekitar 4 persen (persisnya 3,96 persen) pertahun yang disebabkan karena migrasi 1,7 persen dan pertambahan alami 2,3 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4 persen setahun diperkirakan penduduk Jakarta akan menjadi 13 juta pada tahun 2005, sedangkan daya dukung Jakarta tahun itu hanya dapat menyerap sekitar 12 juta jiwa. Hal ini berarti usaha-usaha untuk mempengaruhi komponen-komponen utama pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi, harus lebih ditingkatkan. Namun harus tetap diingat pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kependudukan pada hakekatnya diarahkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan warga masyarakat.

Kebijaksanaan yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian penduduk dan redistribusi penduduk di DKI Jakarta antara lain adalah program Keluarga Berencana, program Transmigrasi, Administrasi Kependudukan dan pengembangan wilayah Jabotabek.

4.1 Keluarga Berencana.

Usaha membatasi jumlah penduduk dengan program-pro-

gram keluarga berencana dimulai sangat terlambat di Indonesia. Dalam dua dasawarsa sejak kemerdekaan, pada saat pemimpin-pemimpin Indonesia lebih mementingkan pengembangan kesatuan dan solidaritas nasional daripada perkembangan ekonomi, masalah kelebihan penduduk, khususnya di Jawa dan Madura, dianggap sebagai masalah yang cukup dapat dipecahkan dengan usaha transmigrasi. Negara Indonesia yang jaya dan besar oleh Presiden Soekarno waktu itu diasosiasikan dengan banyaknya jumlah penduduk dan massa yang membanjir. Hal serupa itu tentu sangat bertentangan dengan konsep Keluarga Berencana yang berusaha menekan jumlah penduduk dengan mutu yang tinggi. Dalam periode Orde Baru yang lebih banyak memberi perhatian pada perkembangan ekonomi, usaha keluarga berencana mulai ditangani pemerintah secara serius dan dilaksanakan sebagai program nasional setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden no. 8 tahun 1970 tentang pembentukan organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN/ (Koentjaraningrat 1982: 20).

Kegiatan Keluarga Berencana di DKI sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1967 dengan tujuan memperkenalkan ide Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat. Pada tahun 1968 di Jakarta masih terdapat 78 persen wanita berstatus kawin dan berumur di bawah 50 tahun yang tidak pernah mendengar KB. Sedangkan hasil Sensus Penduduk 1980 menunjukkan bahwa proporsi wanita berstatus kawin berumur 10—49 tahun di Jakarta ternyata 30,5 persen pernah menggunakan kontrasepsi sementara itu 25,5 persen masih memakainya. Sampai dengan tahun 1980, kegiatan pelaksanaan KB dapat dikatakan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, terutama dari penyebaran tentang pengetahuan KB, sehingga kesadaran dan sikap penduduk terhadap manfaat dari usaha KB telah bertambah pesat. Penelitian-penelitian pada tahun-tahun berikutnya ternyata menunjukkan hasil yang lebih menggembirakan. Pemakaian alat kontrasepsi, misalnya, ternyata dipengaruhi oleh jumlah anak yang dimiliki. Di DKI Jakarta, wanita yang pernah

kawin (dalam tiap kelompok umur) yang tidak memakai alat kontrasepsi umumnya adalah mereka yang mempunyai anak lebih sedikit daripada yang pernah memakai. Keadaan ini agaknya menunjukkan bahwa pemakaian alat kontrasepsi terutama digunakan oleh wanita yang memiliki anak banyak dengan maksud untuk menghentikan kelahiran berikutnya (Aswatini dan Mudjiani 1986: 24).

Berbeda dari segi pencapaian target akseptor, dihitung sejak 1974/75, DKI Jakarta mengalami kenaikan pada periode satu tahun berikutnya, yaitu dari 92,3 persen menjadi 112,4 persen pada 1975/76. Tetapi pada periode tiga tahun berikutnya penurunan sampai hanya 86,3 persen pada periode 1978/79. Bahkan bila dibandingkan dengan daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali, ternyata DKI Jakarta menduduki urutan terendah. Meskipun data tersebut tidak dapat begitu saja dikaitkan dengan menurun atau meningkatnya tingkat fertilitas yang dapat dicapai, namun hal tersebut dapat dianggap cukup mengkhawatirkan. Demikian pula rata-rata umur akseptor. DKI Jakarta ternyata tidak mengalami kemajuan dalam menurunkan rata-rata umur akseptor dan tetap bertahan pada umur 27,6 tahun baik pada periode 1974/75 maupun 1978/79. Bahkan terendah bila dibandingkan dengan Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali (lihat Tabel 23 dan Tabel 24).

Tabel 23.
Persentase Pencapaian Target Menurut
Propinsi dan Tahun Penerimaan

Daerah	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79
DKI Jakarta	92,3	112,4	105,6	94,4	86,3
Jawa Barat	93,4	109,9	112,5	157,7	97,1
Jawa Timur	120,7	110,0	117,2	88,9	149,2
Bali	87,4	86,5	116,3	109,8	109,4

Sumber: Kartoyo 1981: 165.

Tabel 24.
Rata-rata Umur Akseptor Menurut
Propinsi dan Tahun Penerimaan

Daerah	1974/1975	1978/1979
DKI Jakarta	27,6	27,6
Jawa Barat	27,5	26,8
Jawa Timur	28,3	26,6
B a l i	29,2	28,2

Sumber: Kartoyo 1981: 166.

Dilihat dari gejala di atas agaknya pelaksanaan program KB terutama nampak hasilnya pada beberapa tahun setelah dikeluarkannya keputusan Presiden untuk kemudian menjadi semakin berkurang. Namun demikian berkurangnya persentase akseptor yang dicapai dan umur rata-rata akseptor yang tetap 27,6 tahun justru merupakan indikator yang baik, karena disebabkan adanya kecenderungan penundaan usia kawin muda pada para wanita di Jakarta.

4.2 Transmigrasi

Kebijakan redistribusi penduduk melalui program transmigrasi baru dilaksanakan sejak dikeluarkannya undang-undang no. 3 tahun 1972 yang mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi.

Pelaksanaan program transmigrasi di DKI Jakarta menghadapi tantangan yang sangat berat. Setidak-tidaknya ada tiga hal yang memberi pengaruh cukup dominan bagi penduduk DKI Jakarta untuk memilih tetap tinggal di Jakarta walaupun penuh resiko. Pertama, orientasi program transmigrasi selama ini ditujukan pada bidang pertanian yang tentu saja tidak tepat bagi penduduk Jakarta yang sebagian besar bukan petani. Se-

perti sudah diketahui bahwa penduduk Jakarta yang lapangan kerjanya di bidang pertanian hanya 3,8 persen pada tahun 1971 dan pada tahun 1980 bahkan hanya tinggal setengahnya, yaitu 1,8 persen. Kedua, kondisi DKI Jakarta dianggap lebih menarik karena banyak memberikan harapan untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang lebih baik. Ketiga, fasilitas kota yang tersedia memang memberikan banyak kemudahan-kemudahan kepada penduduknya (BKLH DKI 1985a: 44).

Pada masa pemerintahan Ali Sadikin, usaha memindahkan penduduk DKI Jakarta dilakukan dalam periode 1971/1972 – 1976/1977. Para transmigran yang akan dikirim, agar tidak banyak menghadapi masalah, harus memenuhi sejumlah syarat yaitu: sudah berkeluarga, umur maksimum 45 tahun, mempunyai pengetahuan dasar pertanian, bebas G.30.S/PKI, sehat dan atas kemauan sendiri. Bagi yang memenuhi syarat dimasukkan ke dalam Panti Pendidikan Calon Transmigran (diresmikan pemakaiannya pada tahun 1974) untuk diberi bimbingan mental dan ketrampilan. Pada periode 1971/1972 berhasil dikirimkan 54 kepala keluarga yang meliputi 159 jiwa dan pada periode-periode berikutnya mengalami kenaikan yang pesat bahkan mencapai 951 kepala keluarga atau 2.863 jiwa pada periode 1974/1975. Tetapi sesudah itu terus mengalami penurunan hingga hanya dapat dikirimkan 200 kepala keluarga yang meliputi 537 jiwa (lihat Tabel 25). Penurunan ini disebabkan karena di samping minat masyarakat untuk transmigrasi masih sangat rendah, juga berita-berita yang dibesar-besarkan tentang kegagalan transmigran di daerah penempatan, menghambat promosi usaha itu. Bahwa transmigran asal DKI Jakarta masih menunjukkan jumlah yang kecil dapat dilihat pula pada pengiriman-pengiriman yang berlangsung selama periode-periode berikutnya (BKLH DKI 1985a, khususnya Tabel 16, h, 45).

Tabel 25.
Pengiriman Transmigran
Asal DKI Jakarta (1972-1977)

Tahun	Kepala Keluarga	Jiwa
1971/1972	54	159
1972/1973	102	279
1973/1974	750	2.200
1974/1975	951	2.863
1975/1976	620	1.668
1976/1977	200	537
Jumlah	2.677	7.706

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Transmigrasi
 DKI Jakarta.
 Gita Jaya 1977:205.

4.3. Administrasi Kependudukan

Usaha menertibkan administrasi kependudukan sudah dimulai tahun 1968, yaitu sejak dikeluarkan ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran kelahiran, kematian dan kewajiban penduduk untuk memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya dilakukan pendaftaran dan pencatatan data yang meliputi jumlah pendatang dari luar DKI Jakarta, kelahiran, jumlah kematian dan jumlah perpindahan penduduk ke luar wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data ini agaknya kemudian menjadi jelas bahwa pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, yaitu 4,6 persen pada dasawarsa 1961-1971, bukan semata-mata akibat pertumbuhan alami. Bila diasumsikan bahwa pertumbuhan alamiah penduduk DKI Jakarta sama dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode yang sama, yaitu 2,1, maka selisih antara pertumbuhan penduduk total dengan pertumbuhan penduduk alamiah adalah karena migrasi, yaitu 2,5 persen. Jadi melebihi pertumbuhan alamiahnya.

Tabel 26.
Pendatang dari Luar DKI Jakarta 1976-1980

No.	Tahun	Jumlah Pendatang	Kenaikan/Penurunan
1.	1976	22.867	-
2.	1977	23.332	465
3.	1978	42.182	18.850
4.	1979	33.606	-8.576
5.	1980	30.645	-2.961
Jumlah		198.831	1778

Sumber: KSS DKI Jakarta: Jakarta Dalam Angka 1981

BKLN DKI Jakarta 1985a: 48.

Oleh sebab itu dikeluarkannya SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1b/3/1/27/70 tentang Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang dari luar DKI Jakarta, agaknya memang dapat dimengerti. Namun keputusan tersebut sering ditafsirkan sebagai larangan menjadi penduduk DKI Jakarta, sehingga secara politis kurang menguntungkan. Karena itu kemudian dilakukan penyempurnaan landasan yuridis administrasi kependudukan melalui Perda No. 1 tahun 1979. Ternyata memang diketahui kemudian bahwa ketentuan dan persyaratan administratif bagi pendatang yang ingin menjadi penduduk DKI Jakarta, dilihat dari upaya menghambat para pendatang, boleh dikatakan hasilnya kurang menggembirakan.

Tabel 27 berikut ini menunjukkan bahwa jumlah pendatang dari luar Jakarta antara tahun 1976 sampai dengan 1978 naik cukup tinggi, tetapi sesudah itu mengalami penurunan sampai dengan tahun 1980. Naiknya jumlah pendatang yang cukup tinggi antara tahun 1977-1978 dianggap menggambarkan adanya fluktuasi di mana tahun 1977 ada Pemilu sehingga penduduk dari luar Jakarta menahan diri untuk menuju ke DKI

Jakarta dan baru dilakukan secara serentak sesudah Pemilu. Sebaliknya penurunan pendatang antara tahun 1978–1980 ditafsirkan sebagai akibat adanya penyempurnaan landasan yuridis administrasi kependudukan dengan dikeluarkannya Perda No. 1 tahun 1979 tentang Pendaftaran Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dan Perda No. 6 tahun 1979 tentang pembentukan susunan organisasi Tata Kerja Dinas Kependudukan. Meskipun demikian, lepas dari dikeluarkannya kedua Perda tersebut, jumlah pendatang tahun 1979 dan 1980 tetap jauh lebih besar daripada yang terjadi pada tahun 1976 dan 1977. Kenyataan tersebut sebenarnya merupakan indikator bahwa usaha menekan masuknya pendatang ke DKI Jakarta masih belum cukup bila hanya mengandalkan sistem administrasi kependudukan.

4.4 Pengembangan Wilayah Jabotabek

Kebijakan pembangunan daerah sekeliling Jakarta sebagai kesatuan JABOTABEK, seperti yang tertuang pada Instruksi Presiden No. 13 tahun 1976, antara lain dimaksudkan untuk mengembangkan pemukiman serta pengembangan kesempatan kerja yang lebih merata, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan penduduk di Jakarta.

Seperti sudah diketahui bahwa usaha-usaha yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta sekarang, terutama untuk kepentingan yang akan datang, adalah bagaimana mengurangi laju pertumbuhan penduduk serta mengendalikan persebarannya agar sesuai dengan harapan agar jumlah penduduk tidak melebihi 12 juta pada tahun 2005. Karena selama ini dinyatakan bahwa daya dukung DKI Jakarta adalah untuk 12 juta jiwa. Persoalan yang dikhawatirkan adalah bagaimana jika penduduk Jakarta ternyata lebih dari 12 juta. Kekhawatiran tersebut beralasan karena berdasarkan proyeksi penduduk Jakarta, baik yang disusun oleh Kantor Statistik DKI Jakarta maupun Biro Pusat Statistik, memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2000

saja, jumlah penduduk DKI Jakarta sudah melebihi 12 juta, bahkan Kantor Statistik DKI Jakarta dalam salah satu asumsi-nya memperkirakan pada tahun 2000 penduduk Jakarta telah mencapai 13,532 juta dan pada tahun 2005 telah mencapai 16,2095 juta (BKLH DNI 1984/85:11, terutama lihat Tabel 4-nya). Hal ini berarti kecuali harus diusahakan untuk mempengaruhi komponen-komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi, juga penting diusahakan untuk mengembangkan wilayah. Setidak-tidaknya untuk mendorong terjadinya perpindahan penduduk ke arah wilayah pengembangan.

Pengembangan wilayah yang nampak kini terutama dapat dilihat dari banyaknya dibangun pemukiman-pemukiman di sekeliling Jakarta. Memang dirasakan pembangunan pemukiman tersebut telah menarik sebagian penduduk dari wilayah yang padat di pusat Jakarta ke wilayah pinggiran dengan menempati rumah-rumah Perumnas, Real Estate, Perumahan Instansi dan lain-lain. Namun perpindahan tempat tinggal ke wilayah BOTABEK tersebut tidak selalu diikuti dengan perpindahan tempat kerja, tempat sekolah, atau tempat pelayanan masyarakat lainnya seperti Puskesmas dan pusat-pusat perbelanjaan yang memadai. Hal ini kembali menimbulkan persoalan bagi Pemerintah DKI Jakarta, karena muncul gejala baru yaitu adanya mobilitas penduduk yang tinggi pada jam-jam berangkat ke dan pulang dari tempat kerja. Pada jam-jam "sibuk" serupa ini lalu lintas sangat padat dari arah BOTABEK ke arah Jakarta pada pagi hari dan sebaliknya pada sore hari dan keadaan ini menimbulkan kemacetan yang cukup lama pada jalur-jalur yang dilewati. Sehingga kemudian muncul himbauan Komdak Metro Jaya melalui spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis yang isinya agar warga masyarakat berangkat ke kantornya lebih pagi. Meskipun demikian kemacetan masih tetap terjadi setiap hari. Baik disadari maupun tidak, kemacetan lalu lintas menimbulkan kerugian yang cukup berarti, di antaranya adalah pemborosan bahan bakar untuk transportasi, rasa lelah bagi para

penglaju sebelum sampai di kantor dan secara psikologis, kema-cetan dapat menimbulkan rasa cemas dan tidak sabar untuk segera sampai di tempat tujuan. Gejala terakhir tersebut dapat dilihat adanya kebiasaan "main serobot", baik di kalangan sopir angkutan umum maupun pengendara lain pada umumnya. Hal ini jelas kecuali mengakibatkan turunnya disiplin lalu lintas juga dapat menimbulkan kecelakaan.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, akhir-akhir ini sedang dilakukan penelitian ciri-ciri khusus wilayah JABOTA-BEK yang akan dijadikan pusat pengembangan. Adapun pusat-pusat pengembangan tersebut adalah: a. Bogor dan sekitarnya; b. Tangerang dan sekitarnya; c. Bekasi dan sekitarnya; d. Depok dan sekitarnya dan e. daerah lainnya seperti: Ciledug, Ciputat, Cibinong, Cilengsi dan lain-lain.

Tabel 27 berikut ini memberikan gambaran perkembangan penduduk JABOTABEK pada saat ini dan kemungkinannya pada masa yang akan datang. Wilayah BOTABEK sendiri terus mengalami pertambahan penduduk dari 3,754 juta pada tahun 1971 menjadi 5,411 juta pada tahun 1980 dan mungkin akan menjadi 11,439 juta pada tahun 2005 dengan laju pertumbuhan 4,1 persen pada periode 1971–1980 dan 3,0 pada periode 1980–2005. Sementara itu Jakarta juga terus berkembang dari 4,546 juta pada tahun 1971 menjadi 6,508 juta pada tahun 1980 dan mungkin akan menjadi sekitar 12 juta pada tahun 2005 dengan laju perkembangan 4,0 persen pada periode 1971–1980 dan 2,4 persen pada periode 1980–2005.

Oleh karena itu sebenarnya pengembangan wilayah JABO-TABEK bukan hanya menjadi masalah yang hanya diperhatikan oleh Pemerintah DKI Jakarta, tetapi melibatkan juga Pemerin-tah Daerah Jawa Barat, sehingga masing-masing akan mempunyai tanggungjawab sama sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Dengan membangun sarana pendidikan, pusat kegiatan masyarakat, sarana kesehatan dan lainnya di wilayah Botabek diperkirakan akan mengurangi arus migrasi, penglaju

dan sejenisnya ke wilayah Jakarta. Hal ini tentu akan mengurangi masalah kependudukan di wilayah Jakarta. Untuk men-

Tabel 27.
Distribusi Penduduk JABOTABEK Tahun 1971-2005
Berdasarkan Daerah Pengembangan @)

Propinsi/Kabupaten	Jumlah Penduduk (dalam ribuan)			r (%)	
	1971	1980	2005	71-80	80-2005
Kabupaten/Kodua Bogor	1.856	1.739	4.515	4.3	2.0
Kabupaten Tangerang	1.067	1.529	4.154	4.0	4.0
Kabupaten Bekasi	831	1.143	2.770	3.5	3.5
Wilayah BOTABEK	3.754	5.411	11.439	4.1	3.0
DKI Jakarta	4.546	6.508	12.000	4,0	2,4

Sumber: Diolah dari Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Dep. P.U. 1983.
BKLH DKI 1985b: 6, dari Tabel 1.1.

@) Arahkan perkembangan ini dilaksanakan dengan batasan bahwa DKI Jakarta dikurangi tingkat perkembangannya dan BOTABEK didorong perkembangannya.

dorong pengembangan wilayah JABOTABEK, ada yang menyarankan agar ditempuh kebijaksanaan yang dikenal dengan nama "dekonsentrasi planologis" kota Jakarta, yaitu usaha-usaha untuk mende-konsentrasikan kegiatan-kegiatan baru, maupun yang sudah ada, di pusat-pusat perkembangan di sekitar Jakarta. Dengan demikian diharapkan di pusat-pusat pengembangan baru ini akan menarik pertambahan penduduk Jakarta untuk bermukim di pusat-pusat ini. Dalam wilayah JABOTABEK ditentukan pusat-pusat pemukiman yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai pusat-pusat pengembangan baru. Demikian juga sistem jaringan lalu lintas regional yang menghubungkan berbagai fungsi dan berbagai pusat pengembangan yang direncanakan (Suselo 1977:24).

5. TINJAUAN MASALAH

Pada bagian akhir uraian mengenai penduduk DKI Jakarta ini kiranya penting untuk dijelaskan mengenai sasaran apa sebenarnya yang ingin dicapai pada awalnya, dan hasil apa yang sebenarnya dapat diperoleh pada akhirnya. Di samping itu perlu pula dikemukakan beberapa persoalan yang berkaitan dengan pemilihan data yang sering membingungkan karena ada sejumlah sumber melakukan penelitian atas obyek yang sama tetapi mengeluarkan hasil yang berbeda. Dengan demikian pembaca tulisan ini akan mendapat gambaran yang lebih baik mengenai isi tulisannya maupun sumber datanya. Pokok-pokok penilaian berikut ini sebenarnya dimaksudkan agar setiap orang yang hendak menggunakan data dari tulisan ini perlu berhati-hati untuk memilih bagian-bagian mana yang dapat digunakan secara langsung dan bagian-bagian mana yang memerlukan pertimbangan kritis sebelum pilihan dijatuhkan.

1. Pemberian judul "Penduduk DKI Jakarta 1950-1980" di sini sebenarnya menyimpang dari batasan waktu yang mencakup dalam rencana semula yang hanya meliputi periode 1950-1979. Penambahan waktu satu tahun seperti yang dilakukan pada tulisan ini jelas sulit sekali dihindari karena tahun 1980 adalah tahun sensus penduduk, sehingga gambaran secara lebih baik mengenai keadaan penduduk pada tahun-tahun sebelumnya hanya mungkin diperoleh melalui hasil sensus tersebut. Di samping itu batas awal yaitu tahun 1950 juga tidak sepenuhnya diikuti karena data dari periode sebelumnya, khususnya untuk memberi latar belakang pertumbuhan penduduk Jakarta, adalah perlu. Perluasan ke belakang dari cakupan waktu ini terutama untuk memperoleh gambaran yang lebih berarti mengenai keadaan penduduk tahun 190-an sesudahnya yang disebabkan oleh kondisi-kondisi menjelang dan sesudah perang kemerdekaan. Bahkan untuk memberikan kontras-kontras tertentu sengaja dikemukakan keadaan penduduk Jakarta sampai jauh ke belakang sejak abad 17.

2. Apabila uraian mengenai "Penduduk DKI Jakarta 1950-1980" di sini dianggap sebagai "sejarah penduduk Jakarta", maka anggapan itu hanya paling tepat bila yang dilihat sejarahnya terbatas pada pertumbuhan penduduknya. Karena hanya data itu saja yang dicatat perkembangannya setiap tahun. Sedangkan komponen-komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut, seperti perkawinan, kelahiran, kematian dan migrasi hanya dibicarakan dalam skala-skala waktu atau periode-periode tertentu saja, karena memang tidak sepanjang tahun dicatat. Apabila di antara komponen tersebut ada yang mengungkapkan informasi yang cukup banyak dan penting, umumnya adalah karena tidak hanya didasarkan atas hasil sensus penduduk, tetapi juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh individu baik sendiri maupun dalam rangka kerjasama dengan lembaga tertentu yang berminat pada masalah kependudukan. Sebagai contoh adalah masalah migrasi. Masalah migrasi ini banyak memberikan keterangan karena banyak ahli kependudukan berminat pada masalah ini, baik mereka yang berkebangsaan Indonesia, maupun asing, bahkan juga pihak pemerintah DKI Jakarta sendiri.
3. Tulisan ini sebenarnya merupakan hasil penelitian yang bersifat sekunder, artinya tidak didasarkan atas penelitian langsung ke lapangan, tetapi merupakan sintesa dari hasil penelitian pihak lain baik berupa makalah, buku maupun laporan-laporan proyek. Bahkan dalam beberapa aspek tertentu, di mana sumbernya sangat sedikit, setidaknya berdasarkan apa yang berhasil kami liput, maka secara sengaja kami ambil langsung dari satu atau dua sumber yang dapat dianggap paling baik. Misalnya bagian yang membicarakan komposisi Umur dan Jenis Kelamin serta Pendidikan dan Pekerjaan. Namun demikian akan sering ditemukan, hampir pada setiap aspek yang dibicarakan, keterangan pelengkap untuk mendapatkan gambaran global tentang keadaan penduduk Jakarta, yaitu dengan

memberikan data bandingan dengan daerah-daerah lain, atau dengan keadaan umum Indonesia.

4. Hal lain yang penting diberi perhatian adalah sumber data-nya. Seperti telah dikemukakan pada awal bab ini bahwa data kependudukan yang sumbernya diambil berdasarkan hasil-hasil laporan sebelum zaman kemerdekaan harus diperlakukan sangat hati-hati, bahkan harus berhati-hati juga dalam menggunakan data hasil perhitungan resmi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam "Koloniale Verslagen." Widjojo Nitisaastro menganggap perhitungan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda sangat ceroboh karena perhitungan penduduk, khususnya yang ada di Jawa dan Madura dalam abad 19, diadakan untuk pengerahan tenaga rodi, sehingga perhitungannya dikenakan terhadap rumah-rumah tangga yang warganya dapat dikerahkan tenaganya dengan mengabaikan rumah-rumah tangga yang tidak ada tenaga rodinya (Koentjaraningrat 1982:14). Sedangkan untuk masa-masa sesudah kemerdekaan datanya tentu lebih baik, namun demikian perlu diperhatikan bila tingkat kepadatan penduduk mau dipahami dengan lebih baik. Kita telah mengetahui bahwa bentuk pemerintahan dan luas wilayah DKI Jakarta telah berulang kali mengalami perubahan. Tetapi penjelasan pertumbuhan tingkat kepadatan selalu diperlakukan seolah-olah luas wilayah Jakarta tidak pernah berubah, yaitu seperti keadaan waktu perhitungan terakhir dilakukan. Tabel 1 pada tulisan ini dapat dipakai sebagai contoh yang baik, dan memang sulit ditemukan keterangan tambahan pada setiap penjelasan mengenai kepadatan penduduk tentang luas wilayah periode mana yang dipakai sebagai landasan perhitungan setiap periodenya. Karena umumnya didasarkan atas luas wilayah terakhir, maka terdapat sejumlah penduduk yang sebenarnya tidak diperhitungkan, terutama mereka yang pada suatu periode tertentu merupakan penduduk luar wilayah Jakarta, tetapi yang kemudian

menjadi bagian wilayah Jakarta karena adanya perluasan. Karena tidak adanya kesepakatan dalam masalah ini rupanya, maka dapat dijumpai keterangan yang sama sekali berlainan dari dua sumber yang membicarakan hal yang sama. Tabel 1.1 tentang Laju Pertumbuhan dan Kepadatan penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1971 dan 1980 yang diterbitkan sebagai laporan Pola Pengendalian Mobilitas Penduduk DKI Jakarta, bila dibandingkan dengan Tabel 2. tentang Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta tahun 1961, 1971 dan 1980 yang lalu diterbitkan pada tahun berikutnya (1985) juga sebagai laporan Pola Pengendalian Mobilitas Penduduk DKI Jakarta, ternyata keduanya memberikan data kepadatan penduduk DKI Jakarta pada tahun 1971 dan 1980, tetapi dengan hasil perhitungan yang hampir seluruhnya berbeda. Kecuali satu kesamaan yaitu kepadatan di wilayah Jakarta pusat pada tahun 1980, selebihnya berbeda baik di setiap wilayah maupun pada setiap periode, bahkan juga jumlah totalnya. Perbedaan lainnya adalah pada caranya menyatakan angka persentase, ada yang dua angka di belakang koma ada pula yang hanya satu. Demikian juga cara pembulatan angkanya. Laju pertumbuhan penduduk Jakarta dalam periode 1971-1980 misalnya, ada yang menulis 3,93 persen, tapi ada juga yang hanya menulis 3,9 persen sedangkan sumber lainnya bahkan ada yang membulatkan ke atas menjadi 4 persen.

5. Pada awalnya tulisan ini bermaksud untuk meliputi juga aspek-aspek lain di luar yang sudah kami lakukan ini, yaitu aspek ekonomi, kesehatan, dan juga perdagangan. Akan tetapi tanpa menyertakan aspek-aspek terakhir ini, ternyata datanya sudah cukup sarat untuk dituangkan dalam tulisan yang jumlah halaman dan waktu penyusunannya terbatas. Oleh karena itu dalam tulisan yang dapat dibuat ini, diupayakan untuk sedikit-dikitnya menyinggung aspek-aspek yang ingin dikemukakan dalam rencana semula.

BAB III

SEGI-SEGI FISIK DALAM PERKEMBANGAN KOTA JAKARTA (1950 – 1980)

Oleh : Irmawati Marwoto Johan

1. PENATAAN WILAYAH JAKARTA: TINJAUAN UMUM

Jakarta sebelum menjadi ibukota Republik Indonesia telah melampaui masa yang sangat panjang sebagai suatu kota pelabuhan. Dalam masa kuno ketika di Jawa Barat terdapat suatu kerajaan yang berpusat di Pajajaran dekat Bogor, di teluk Jakarta pada muara sungai Ciliwung terdapat suatu kota pelabuhan yang bernama Sunda Kalapa. Masa ini berlangsung kira-kira dari abad ke 12 sampai abad ke 16. Kemudian kota pelabuhan ini direbut oleh kerajaan Demak dan dengan perantara Falatehan, diubah namanya menjadi Jayakarta. Masa ini berlangsung dari bagian pertama abad ke 16 sampai awal abad ke 17, kemudian ketika badan dagang Belanda yang bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie mulai berdagang di Asia, maka kota pelabuhan ini mereka rebut dan menjadikannya pusat perdagangan VOC dengan nama Batavia. Masa ini berlangsung dari awal abad ke 17 sampai akhir abad ke 18. Setelah badan dibubarkan pemerintah Belanda mewarisi kekayaan (dan hutang-hutang) yang antara lain berupa hak-hak yang ditentu-

kan diberbagai daerah antara penguasa se[empat dan petugas-petugas VOC. Maka didirikan suatu badan yang memerintah daerah ini yang dinamakan *Nederlandsch Indie* dan Batavia dipakai sebagai ibukotanya (Leirissa 1982:14-15).

Kota Batavia dibangun oleh Jan Pieterzoon Coen di atas puing retuntuhan Jayakarta adalah usaha membangun suatu kota tiruan Belanda, suatu copy sebuah kota Belanda. Rencana kota berbentuk segi empat bersisi lurus sesuai dengan rencana kota-kota di negeri Belanda berdasarkan rumusan benteng Romawi. Segi empat panjang ini diletakkan pada Pasar Ikan, tempat dibuat suatu benteng memanjang kearah Selatan hingga belokan sungai Ciliwung. Kota ini dikelilingi oleh parit-parit dan tembok kota diperkuat dengan benteng-benteng kecil. Penduduk asli tidak diperkenankan membuat kampung di dalam tembok kota dan sungai Ciliwung yang berkelok-kelok dialihkan dengan sebuah terusan yang dinamakan kali Besar yang memotong kota menjadi dua bagian (Siswadi 1982:36).

Pada peta dari Francis van Berkerode yang dibuat sekitar tahun 1625 ternyata sudah dimulai perluasan kota ke arah tepi barat sungai Ciliwung yang dilaksanakan oleh orang-orang sesudah Coen. Kemudian dari peta yang dibuat oleh Clement de Jonghe (1650) ternyata telah ada perubahan besar-besaran dalam rencana kota. Terusan miring di sebelah Timur dikeringkan dan diganti dengan sebuah terusan yang berjalan sejajar dengan Ciliwung, bagian kota sebelah selatan dipisahkan dari kota yang sebenarnya dan disebelah barat batas-batas terdahulu telah diperluas. Yang menyolok adalah perencanaan jalan yang sangat beraturan. Di Batavia sungai Ciliwung yang diluruskan alirannya pada kedua tepinya dibangun jalan yang lebar dengan demikian perniagaan yang berkembang sepanjang sungai dapat ditampung sebagaimana mestinya, sedangkan *Prinsestraat* sebagai daerah pemerintahan ditempatkan agak dibelakang. Selain jalan-jalan ditata dengan baik juga bagian-bagian kota di atur dengan baik, disebelah Kasteel terdapat bengkel-bengkel dan gudang perbe-

kalan, perdagangan besar dipusatkan di kali Besar dan daerah tempat tinggal sepanjang terusan-terusan yang digali di jurusan utara selatan sedangkan bagian timur kota dimaksudkan untuk kampung-kampung penampungan tenaga kerja kasar (Siswadi 1982:37).

Pada masa pemerintahan Daendels (1811–1816) secara radikal memindahkan pusat pemerintahan kesuatu kota baru yang diberi nama Weltevreden. Inti kota baru ini adalah sekitar Lapangan Banteng, di mana ia kemudian mendirikan istananya. Tiilik tolak perancangan Weltevreeden agaknya berdasarkan pola yang sama seperti kota lain di Indonesia dengan sebuah alun-alun ditengahnya dan jalan-jalan lebar yang saling bersilangan. Weltevreeden yang menjadi pusat pemerintahan juga merupakan kota tempat tinggal, sedangkan kantor-kantor perusahaan dan perdagangan tetap dipertahankan di kota lama. Dalam perkembangannya ternyata perencanaan ini tidak dapat diterapkan karena perkembangan kota jauh lebih cepat. Terjadi pembangunan rumah-rumah disepanjang jalan raya lebih-lebih lagi jalan-jalan menuju ke luar kota. Pembangunan seperti ini mengakibatkan segala bangunan bercampur aduk, seperti gedung-gedung pemerintahan, rumah tinggal, bengkel, warung dan lain-lain.

Akibat dari perkembangan yang tidak teratur maka timbul masalah-masalah yang berkaitan, misalnya perkembangan lalu-lintas, listrik, gas, saluran air dan lain-lain. Kekacauan yang telah dimulai dari abad ke 19 dilanjutkan pada abad ke 20, bahkan semakin parah lagi karena tidak ada suatu Zoning yang efisien (Siswadi, 1982:43-45). Yang menjadi masalah utama pada abad 20 adalah jumlah penduduk yang terus meningkat, sehingga diperlukan banyak tanah yang dapat menunjang segala kebutuhan bagi masyarakat.

Pada uraian selanjutnya yang akan dibahas adalah bagaimana perkembangan kota Jakarta beserta sarana-sarananya dari tahun 1950 sampai tahun 1979. Adapun pembabakannya dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

- (1) Perkembangan kota Jakarta pada tahun 1950–1960
- (2) Perkembangan kota Jakarta pada tahun 1960–1970
- (3) Perkembangan kota Jakarta pada tahun 1970–1980

Berikut ini adalah beberapa catatan mengenai administrasi kota. Pada abad ke 19 yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Batavia merupakan suatu *Karesidenan*. Karesidenan ini dibagi lagi menjadi lingkungan-lingkungan yang lebih kecil yang dinamakan *Afdeling*. Hal ini berlaku sampai dengan awal abad 20. *Afdeling* ini dibagi dalam 5 daerah:

- (1) *Afdeling Stad en voorsteden van Batavia*
- (2) *Afdeling Meester Cornelis*
- (3) *Afdeling Tangerang*
- (4) *Afdeling Buitenzorg*
- (5) *Afdeling Krawang*

Adapun *Afdeling Stad en voorsteden van Batavia* dibagi lagi menjadi 4 *distrik*, yaitu: Penjaringan, Pasar Senen, Mangga Besar dan Tanah Abang juga termasuk pulau-pulau di teluk Batavia dan sebelah utaranya (The Liang Gie, 1958:31).

Pada tanggal 1 April 1950 Batavia ditetapkan menjadi sebuah *Gemeente*, yaitu sebuah daerah lokal dengan mempunyai keuangan sendiri. Batas wilayah *Gemeente* Batavia kira-kira 125 km² tidak termasuk pulau-pulau yang ada di teluk Batavia.

Untuk mempermudah operasi pemerintahan Pamongpraja, *afdeling Stad en Voorsteden van Batavia* dibagi menjadi dua *district* dan enam *onder district* yang masing-masing dikepalai oleh wedana dan asisten wedana. Pembagian *district* dan *onder district* tersebut adalah:

District	Onder District
(1) Batavia	1. Mangga Besar
	2. Penjaringan
	3. Tanjung Priok
(2) Weltevreden	4. Gambir
	5. Senen
	6. Tanah Abang

Ke 6 onder distrik ini dibagi lagi kedalam *Wijk-wijk* yang semula berjumlah 27, kemudian masing-masing *wijk* dibagi lagi kedalam kampung-kampung (The Liang Gie 1958: 34-35).

Pada tahun 1926, luas wilayah *Stadsgemeente Batavia* menjadi 182 Km² sebagai akibat dari penghapusan *Stadsgemeente Meester Cornelis* dan wilayahnya digabungkan kepada wilayah *Stadsgemeente Batavia*.

Setelah kota Batavia jatuh ketangan Jepang pada tahun 1942, maka dikeluarkan Undang-Undang 1942 No. 42 tentang perubahan tata pemerintahan daerah. Menurut UU tersebut Pulau Jawa dibagi dalam satuan-satuan daerah yang disebut *SYUU* (Karesidenan). Setiap *Syuu* dibagi dalam beberapa Ken (Kabupaten) dan *Shi* (Stadgemeente).

Di dalam UU no. 28 tahun 1942 kepala pemerintahan Jepang atau *Gunseikan* dapat membentuk *Tokubetsu Shi* (Stads Gemeente luar biasa). Jakarta kemudian dijadikan *Jakaruta Tokubetsu Shi* dipimpin oleh *Tokubetsu Shityo* dan beberapa orang *Zyoyaku* (pegawai tinggi) dan masing-masing diangkat oleh *Gunseikan*.

Ketika proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, *Jakaruta Tokubetsu Shi* dirubah menjadi *Pemerintahan Nasional Kota Jakarta*.

Namun ketika pemerintah Nica berkuasa, walikota Jakarta dan beberapa pejabat ditangkap dan diusir. Maka habislah kekuasaan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta.

Pada tanggal 23 Maret 1950 oleh Presiden RIS diangkat seorang Walikota Jakarta yang disusul dengan penyerahan kekuasaan pemerintahan pada tanggal 31 Maret 1950 dari wakil Gubernur Distrik Federal (gubernur Batavia en Ommelanden) kepada Walikota. Penyerahan ini ditambah dengan beberapa wilayah baru, yaitu:

- (1) Pulau Seribu
- (2) Onderdistrik Cengkareng

- (3) Sebagian dari Distrik Kebayoran (Onderdistrik Kebonjerruk, Kebayoran Ilir dan Kebayoran Udik).
- (4) Sebagian dari Distrik Bekasi (onderdistrik Pulogadung dan sebagian onderdistrik Cilincing).

Dengan batas-batas yang baru ini maka luas wilayah Kotapraja Jakarta Raya menjadi kira-kira 530 km², yaitu 3 kali luas wilayah Stadsgemeente Batavia.

Berdasarkan pada Undang-Undang no. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah dikenal 2 macam Kota Otonom, yaitu kotapraja Jakarta Raya yang berstatus daerah tingkat I, Kotapraja yang berstatus tingkat II dan daerah tingkat III. Maka realisasinya pada tanggal 15 Januari 1960 ialah ditetapkan Kotapraja Jakarta Raya sebagai daerah tingkat I dengan kepala daerahnya seorang Gubernur.

Karena sifat yang khusus dari Kotapraja Jakarta Raya, maka berdasarkan ketetapan Presiden No. 2 tahun 1961 yang ditingkatkan menjadi Undang-Undang no. 2 tahun 1961 dibentuk menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Baru pada tahun 1964 setelah ditetapkan dengan Undang-Undang no. 10 ditetapkan sebagai ibukota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta (*Gita Jaya* 1977:17). Pada tanggal 24 Juli 1975 terjadi pembulatan wilayah Jakarta atas:

- (1) Jakarta Pusat
- (2) Jakarta Utara
- (3) Jakarta Barat
- (4) Jakarta Selatan
- (5) Jakarta Timur.

Dari lima wilayah ini dibagi-bagi lagi atas 30 wilayah Kecamatan dan 236 wilayah Kelurahan (*Gita Jaya* 1977: 18 dan 65).

2. PERKEMBANGAN KOTA JAKARTA 1950–1980

2.1 Tanah dan Penduduk

Dengan kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Jakarta dan kedudukan Jakarta sebagai ibukota mengakibatkan

makin meningkatnya kebutuhan akan kantor-kantor dan perumahan pegawai. Kecuali sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga berkembang sebagai kota industri dan perdagangan sehingga jumlah penduduk pun semakin meningkat terutama karena urbanisasi (periksa halaman 40—41 dan Grafik 2 pada Bab II). Pada tahun 1950 penduduk Jakarta 1.432.085 jiwa, sepuluh tahun kemudian (1960) menjadi duakali lipat lebih, yaitu 2.910.858 jiwa. Ini berarti pemerintah DKI Jakarta harus menyediakan tanah lagi untuk gedung-gedung dan perumahan. Usaha tersebut antara lain dilakukan dengan membebaskan tanah-tanah, yang dulu milik tuan-tuan tanah, dengan cara membeli.

Pada bulan Februari tahun 1949 telah selesai dibuat sebuah rencana perluasan kota ke arah Kebayoran dengan luas 730 Ha. Daerah ini diproyeksikan sebagai daerah perumahan yang tepinya bersinggungan dengan jalan kereta api Tanah Abang-Tangerang. Realisasi dari rencana baru terwujud setahun kemudian dan tanah seluas 730 Ha dibagi untuk keperluan perumahan rakyat 152 Ha, perumahan sedang 69,8 Ha, villa 55,1 Ha, bangunan-bangunan istimewa 75,2 Ha, flat 6,6 Ha, toko-toko 17 Ha, industri 20,9 Ha, taman-taman 118,4 Ha, jalan-jalan 181,5 Ha dan sawah-sawah pinggiran 33 Ha. Semua ini dimaksudkan untuk memberi tempat kediaman bagi 100.000 penduduk (Surjomihardjo 1977:36,37).

Pada masa-masa ini yang menjadi masalah utama adalah masalah tanah, yang pemilikannya ada 4 macam:

- (1) tanah kotapraja
- (2) tanah negara
- (3) tanah individu
- (4) tanah partikular.

Adapun yang menjadi pemikiran Kotapraja adalah tanah partikular yang pada saat itu terdapat seluas 3.566 Ha. Adapun tanah ini dikuasai oleh 16 perusahaan dan keadaannya sangat terlanjar. Kampung-kampung yang berada di atas tanah partikular

sangat kotor, jalan-jalan tidak diaspal sehingga pada musim hujan akan sangat becek dan saluran air pembuangan tidak mengalir sehingga menimbulkan bau busuk. Keadaan perumahan penduduk saling berhimpitan demikian juga dengan sumur dan tempat buang air bergandengan sehingga tidak memenuhi syarat hygiene.

Pemerintah Kotapraja dalam hal ini ingin membeli kembali tanah-tanah tersebut dan akan dilakukan pembangunan dan perbaikan kampung sebagaimana layaknya tempat tinggal manusia (*Karya Jaya* 1977:71).

Keadaan seperti ini sebenarnya adalah kelanjutan dari keadaan tanah pada masa sebelumnya dan terutama pada masa pemerintahan Jepang, yaitu dari tahun 1942–1945. Pada masa itu kepada penduduk dianjurkan untuk menggarap semua tanah kosong dengan menanam sayur-sayuran dan pohon jarak tanpa memperdulikan tanah yang digarap itu kepunyaan siapa. Kepada penduduk juga diperbolehkan mendirikan gubug-gubug di kebun-kebun tersebut, sehingga lambat laun gubug-gubug ini menjadi bertambah besar dan berubah menjadi rumah-rumah sederhana. Pemakaian tanah-tanah yang digarap oleh penduduk tidak dikenakan biaya sewa baik oleh pemerintah maupun oleh pihak Partikulier. Selain itu tidak diadakan pendaftaran sehingga tidak lagi diketahui tentang letak tanah, luas tanah dan nama penggarap.

Pada masa pemerintahan Nasional dari tahun 1945–1947, pemerintahan kota mengadakan pengumuman yang mengharuskan penduduk untuk mendaftarkan tanah garapannya. Banyak yang sudah mendaftarkan tetapi masih banyak pula yang belum mendaftarkan. Baru pada tahun 1950 dan selanjutnya, seperti terbukti dari keputusan-keputusan yang tercantum dalam notulen rapat-rapat Badan Pemerintah Harian sejak tanggal 14 September 1950, persoalan tanah yang melanggar hukum mendapat perhatian kembali dari pihak Pemerintah Kota. Pada saat itu daerah yang menjadi tempat okupasi liar adalah daerah

yang sekarang menjadi jalan M.H. Thamrin, Hotel Indonesia, Hotel Asoka dan President Hotel (*Karya Jaya* 1977:37, 39, 41).

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat direncanakan pendirian kampung-kampung baru yaitu di Bendungan Ilir, Karet, Pasar Baru, Jembatan Duren dan Tanjung Grogol. Khusus di Tanjung Grogol akan dibangun 103 buah rumah yang akan dijual kepada rakyat. Bagi golongan kecil seperti tukang beca, penjual makanan dan sebagainya, pemerintah Daerah telah membangun beberapa perumahan darurat untuk disewa dengan pembayaran yang ringan. Adapun lokasinya berada di: Pisangbatu, Karang anyar I, Karanganyar II, Tanjung Priok dan Tanah Tinggi yang bisa menampung 2000 orang.

Beberapa daerah perumahan baru juga dibuka yaitu di jalan Gunung Sahari seluas 12 Ha oleh Jawatan Pelayaran, di Karet Bendungan seluas 4 Ha untuk Penupetel, di Cipinanga Vrendendal dibangun kompleks asrama seluas 50 Ha, Perkampungan baru daerah Raja Wali seluas 25 Ha dan asrama mahasiswa di Utan Kayu seluas 50 Ha (*Karya Jaya* 1977:71).

Untuk memenuhi kebutuhan akan pelelangan ikan yang dihasilkan oleh para nelayan yang tinggal disepanjang pantai utara dan pulau Seribu oleh Pemerintah Daerah telah ditetapkan 3 tempat pelelangan ikan yaitu: Tanjung Priok, Pasar Ikan dan Kamal (*Karya Jaya* 1977:79).

Tanah-tanah sawah pada masa ini antara lain terdapat di daerah bagian barat Cengkareng, bagian timur Klender dan bagian utara Tanjung Priok. Daerah-daerah yang menghasilkan bahan makanan seperti buah-buahan dihasilkan dari daerah selatan Jakarta yaitu: Pasar Minggu, Pasar Rebo, Kebun Jeruk, Kebayoran, dan Mampang Prapatan. Untuk kebutuhan susu diperoleh dari daerah Mampang Prapatan dengan produksi 8858 liter setiap hari. Dari daerah sepanjang pantai utara Jakarta menghasilkan ikan air tawar terutama ikan bandeng dengan empang yang seluas 1201,01 Ha, sedangkan di daerah selatan

menghasilkan ikan Gurame, Tawes dan ikan Mas dengan luas empang 658 Ha (*Karya Jaya* 1977:79).

2.2 Prasarana Umum

Prasarana umum yang terdapat di Jakarta tahun 1950–1960 meliputi hal-hal yang disebut berikut ini:

- a. **Listrik** : Untuk mengatasi masalah listrik akan dibangun pembangkit baru di daerah Ancol.
- b. **Air bersih** : Untuk mengatasi masalah ini akan dibangun Waterzuivering di daerah Karet yang diperkirakan akan menambah sebanyak 5000 liter air per detik. Selain itu juga menambah jumlah pipa leding dan menambah air dari sumber Ciomas Bogor sedangkan bagi penduduk yang tinggal di daerah kering akan dibuat 230 hydrant. Yang penting juga pada masa ini dibuat instalasi pembersih air Pejompongan yang dibangun dengan bantuan PUTL dengan kapasitas 2060 liter/detik.
- c. **Penanggulangan Banjir** : dibuat rencana pembuatan waduk pengumpulan air banjir sungai Cideng, Krukut dan cabang-cabangnya dan kemudian air dipompa ke laut, proyek ini dikenal dengan nama Rencana Pluit.
- d. **Jalan** : Untuk memenuhi kebutuhan akan jalan maka dibangun *Jakarta by pass* yaitu jalan raya dari Tanjung Priok ke Cililitan yang bersambung dengan jalan raya menuju Bogor.
- e. **Sarana ibadah** : Pada masa ini dibuat persiapan pembangunan mesjid Istiqlal.
- f. **Sarana Hotel** : dilakukan persiapan dan pembebasan tanah untuk membangun hotel Indonesia.

Selain proyek-proyek ini, juga dirumuskan rencana pembangunan dalam jangka panjang yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pendahuluan (*Outline Plan*) yang kemudian hari dikembangkan menjadi Rencana Induk (*Master Plan*) untuk kota Jakarta (*Karya Jaya* 1977:113,115).

3. PERKEMBANGAN KOTA JAKARTA 1960–1970

Pada tahun 1964 dengan Undang-undang no. 10, daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai ibukota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Setelah selesai dibangun kompleks Gelora Bung Karno pada tahun 1962, maka berentetlah pembangunan-pembangunan raksasa di kota Jakarta, baik yang bersifat bangunan monumental maupun wilayah-wilayah perumahan seluas ± 1.600 Ha sedang luas daerah pembangunan meliputi ± 18.000 Ha. Dalam rangka pembangunan tersebut, dimana perlu juga perhubungan dan lalu-lintas yang baik, maka dibangun pula jalan lingkar (Jl. Yos Sudarso, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jl. Slipi Raya) serta jalan-jalan lainnya. (*Master Plan* 1965–1985:2). Selain itu jalan Thamrin dan jalan Sudirman diadakan pelebaran jalan. Semua ini berakibat pembebasan tanah beberapa puluh meter pada kiri dan kanan jalan agar jalur tadi tidak ditempati bangunan liar.

Kemudian dibuatlah ketentuan bahwa bangunan di kiri dan kanan jalan Thamrin sedikitnya harus 5 tingkat demikian juga dengan jalan Jakarta by pass, jalan Slipi dan jalan Gatot Subroto (*Karya Jaya* 1977:236-237). Selain itu juga dalam rangka dilaksanakannya Asian Games ke IV dibangun beberapa gedung seperti Wisma Warta, Hotel Indonesia, tugu Nasional dan sejumlah patung lainnya. Kegiatan ini mengakibatkan harus dibongkar dan dibangun kembali 8.652 buah rumah oleh Pemerintah Daerah Jakarta, yang menyangkut 46.829 jiwa penduduk di Tebet, Pejompongan, Slipi, Cikoko dan Cileduk.

3.1. Masalah Yang Timbul

- a. Banjir : Pada awal tahun 60 di Jakarta terjadi banjir, setelah mengalami musim hujan yang hebat sehingga 7 kelurahan sangat menderita, terutama daerah Grogol dan sekitarnya. Masalah banjir memang merupakan masalah utama sampai saat ini, hal ini disebabkan keadaan lingkungan Jakarta yang dialiri 10 buah sungai besar telah tertutup oleh sebuah kota dengan jaringan drainase yang tidak memadai. Tetapi dalam perkembangannya gangguan fisik lingkungan seperti banjir dan sulitnya mendapat air bersih di beberapa tempat tidak menghambat perkembangan kota Jakarta. Setiap tahun penduduk bertambah kira-kira 5,3% dan tanah kosong yang dibangun hanya untuk perumahan diperkirakan meliputi kira-kira 240 Ha tiap tahun, sedangkan tanah untuk keperluan lain diperkirakan minimal 1000 Ha tiap tahun. Dengan makin luasnya tanah yang dibangun maka volume air hujan yang harus ditampung dan dialirkan juga tentunya semakin bertambah. Hal ini dapat merubah tata perairan di bawah permukaan tanah kota yang sudah tidak menerima curahan air hujan tersebut (Tambunan 1985: 1, 8). Pada tahun 1965 baru kemudian daerah banjir ini dialokasi dan dibuat rencana penanggulangan dalam Master Plan 1965–1985 yaitu dengan membuat waduk-waduk dan saluran kanal (Peta 7 dan 8).
- b. Kebakaran : Pada tahun 1959 Jakarta mengalami masa kemarau yang panjang. Tidak kurang dari 67 kali kebakaran besar telah terjadi dan menyebabkan 16.114 orang kehilangan tempat tinggal dengan kerugian ditaksir 64 juta rupiah. Kebakaran yang paling hebat terjadi di kampung-kampung yang

padat dan liar (*Karya Jaya* 1977:203). Usaha penanggulangan untuk memperbaiki kampung baru dilaksanakan pada Pelita I dengan nama proyek MHT.

- c. Sampah: Masalah sampah adalah masalah yang rumit dan berbelit-belit dan hal ini menyangkut kebersihan kota. Adapun penyebabnya adalah pada sifat-sifat dan kebiasaan penduduk membuang sampah dimana saja dan karena semakin banyaknya penduduk kota Jakarta yang mengakibatkan volume sampah bertambah. Dilain pihak pemerintah Daerah agak terlambat dalam menangani masalah ini. Usaha mengatasi masalah sampah ini dilakukan dengan menghancurkannya dengan sistem pembakaran, penimbunan dengan tanah (*sanitary landfill*) atau diolah oleh pabrik-pabrik pembuatan pupuk (pabrik kompos) (*Master Plan* 1965-1985: 6). Sampah-sampah ini yang jika tidak ditangani dengan sungguh-sungguh dapat mengakibatkan banjir karena menyumbat aliran-aliran air.
- d. Gelandangan : Pada tahun 1966 diperkirakan jumlahnya mencapai 30.000 orang. Langkah-langkah kebijaksanaan yang ditempuh untuk mengatasi masalah ini dengan menyalurkan mereka pada lapangan kerja dan transmigrasi. Namun yang menjadi masalah lagi usaha-usaha penyaluran tersebut diisi lagi oleh pendatang-pendatang baru dari daerah lain sehingga sampai saat ini tetap menjadi masalah (*Gita Jaya* 1977:201).
- e. Penduduk: Dari hasil analisa yang dilakukan didapat bahwa kenaikan penduduk berdasarkan pertambahan alami (*natural increase*) setiap tahunnya adalah 2% sedangkan disebabkan urbanisasi juga 2%. Dengan demikian maka kenaikan penduduk se-

cara netto (*net increase*) setiap tahunnya adalah 4%. Dengan dasar ini maka bisa diperkirakan jumlah penduduk sampai tahun 1985 akan mencapai 6.500.000 Jiwa. Luas kota Jakarta pada tahun 1965 adalah 56.000 Ha sedangkan wilayah kota saja 18.600 Ha. Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah kota 2,8 juta sehingga kepadatan bruto di wilayah kota mencapai 156 jiwa/Ha. Maka untuk proyeksi pada tahun 1985 tentunya dibutuhkan daerah yang lebih luas dan diperkirakan membutuhkan areal 50.000 Ha (*Master Plan 1965-1985: 7,8*). Kecuali itu, pertambahan jumlah penduduk ini juga berakibat pada hal-hal lain seperti sarana perumahan, lapangan kerja, arus lalu-lintas, listrik dan lain-lain.

3.2 Prasarana Umum

Usaha-usaha pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan prasarana umum terus dilakukan antara lain:

- a. Pasar : Pada tahun-tahun ini telah dibuat beberapa rintisan pasar seperti pasar Cikini dan pasar Senen. Pasar Cikini yang baru direncanakan akan dibangun karena pasar Cikini lama sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena keadaannya yang kotor dan becek. Pasar ini kemudian ditutup dan dirubah menjadi pertokoan yang diberi nama *Hias Rias*. Demikian juga halnya dengan pasar Senen, dahulu pasar ini berada ditepi kota tetapi sekarang berada di tengah-tengah kota. Kesibukan pasar ini 24 jam, karena selain sebagai pertokoan juga sebagai pasar tempat perdagangan sayur-sayuran dan buah-buahan secara besar-besaran. Maka direncanakan Proyek Senen yang bertujuan untuk merubah wajah pasar Senen lama (*Karya Jaya 1977:240-241*).

- b. **Perumahan** : Dalam usaha untuk menambah prasarana perumahan direncanakan kota satelit Pulo Mas yang mendapat bantuan dari PBB dan ditunjuk negara Denmark sebagai perencana. Dalam pelaksanaannya sampai tahun 1965 tanah yang telah dibebaskan tercatat 280 Ha dan juga sedang dikerjakan penggalian saluran dan danau. Selain proyek ini juga dibuat proyek Cempaka Putih yang sampai tahun 1965 telah membebaskan tanah seluas 100 Ha dari keseluruhan tanah yang disediakan seluas 230 Ha. Oleh proyek ini telah dibangun rumah tinggal termasuk rumah minimum seluas 44.932 m² lantai dan di luar Cempaka Putih telah diselesaikan rumah minimum sebanyak 254 buah dengan luas lantai 13.166 m². Adapun lukasinya adalah di Bandengan selatan, Taman Sari IV, Kebon Kelapa, Kebon Nanas, Kalibata, Raden Saleh, Mangga Besar, Cipete Ilir dan Tanjung Priok. Disepanjang jalan Slipi akan dibangun vila-vila atas pesanan beberapa Bank. Juga dibuat ketentuan bahwa bangunan di kiri kanan jalan Thamrin, jalan Gatot Subroto, Jakarta By pass dan Slipi sedikitnya harus lima tingkat.
- c. **Rekreasi**: Pembebasan tanah dilakukan di daerah Ancol yang direncanakan sebagai tempat rekreasi. Kemudian akan dibangun proyek Planetarium yang akan didirikan di atas tanah Kebon Binatang Cikini yang sekarang dikenal dengan Taman Ismail Marzuki. Untuk menampung kebun Binatang Cikini yang dipindahkan, maka dibebaskanlah tanah di daerah Ragunan yang sekarang disebut Taman Marga Satwa Ragunan.
- d. **Pendidikan/Sekolah** : Pengadaan gedung sekolah sebagai sarana pendidikan makin meningkat seiring de-

ngan laju pertumbuhan penduduk. Fasilitas gedung SD, SLP dan SLA pada tahun 1966 seluruhnya berjumlah 1.081 buah, sedangkan anak usia belajar diperkirakan sekitar 500.000 orang. Untuk mengatasi masalah ini, maka direncanakan akan dibangun SD sebanyak 124 buah dan yang direhabilitasi sebanyak 15 buah. Untuk SLP dibangun 31 buah gedung dan yang direhabilitasi sebanyak 4 buah. Namun pembangunan ini juga masih belum mencukupi sehingga direncanakan akan terus ditambah pada PELITA I (*Gita Jaya* 1977:176).

- e. Rumah Sakit/Kesehatan : Sejak tahun 1969 Pemerintah Daerah Jakarta menetapkan kebijaksanaan untuk memberikan bantuan kepada rumah-rumah sakit swasta agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Selain itu pula telah ditetapkan rumah-rumah sakit pada 5 wilayah kota sebagai Rumah Sakit Umum Wilayah Kota yang juga mendapat dana bantuan. Usaha-usaha itu diikuti dengan membangun Puskesmas baik ditingkat kecamatan maupun Kelurahan. Pembangunan Puskesmas ini terus ditingkatkan termasuk pula wilayah baru dari hasil pembulatan wilayah DKI Jakarta. Untuk meningkatkan peran Puskesmas dibuat juga Puskesmas keliling terutama bagi wilayah perairan seperti Kepulauan Seribu dibuat Puskesmas terapung. Selain mengadakan pemeriksaan, pengobatan dan memberikan penerangan-penerangan tentang kesehatan, juga diadakan kegiatan-kegiatan *Karang Balita* yaitu suatu pusat bimbingan pemeliharaan dan pembinaan kesehatan bagi anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun (*Gita Jaya* 1977: 193-194).

Masalah kesehatan lingkungan merupakan kegiatan jangka panjang, yaitu menunjang pemberan-

tasas penyakit menular. Adapun usaha ke arah ini dilakukan dengan cara pendidikan kesehatan, mengunjungi perusahaan makanan dan minuman juga hotel-hotel dalam rangka penertiban syarat-syarat kesehatan lingkungan. Kemudian dididik kader-kader kesehatan yang kemudian membentuk 30 unit pest control ditiap Kelurahan pada 5 wilayah DKI Jakarta. Dengan adanya unit-unit ini diharapkan sebanyak 90 RW yang meliputi 1050 RT yaitu kira-kira 210.000 jiwa akan terhindar dari gangguan penyakit menular.

Usaha lainnya adalah menanggulangi pengaruh penggunaan obat bius dengan pembangunan Unit Penyembuhan terhadap narkotika (*Drug-dependence Unit*) untuk usaha rehabilitasi penderita (Repelita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:33). Selain itu dalam partisipasi dengan program pemerintah pusat dalam usaha untuk menciptakan keluarga sejahtera melalui pengaturan kelahiran yang dikenal sebagai Keluarga Berencana (KB) juga menjadi salah satu program pemda DKI Jakarta. Pada Pelita I yang menjadi target dari penurunan penduduk adalah 2,4% dari 2,6% angka kelahiran penduduk. Program ini antara lain diselenggarakan di Puskesmas (Repelita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:34).

- f. Jalan dan Jembatan : Dalam pembangunan kota Jakarta sarana jalan merupakan faktor utama yang memegang peranan dalam menentukan kegiatan-kegiatan di sekitarnya, baik yang bersifat kegiatan ekonomi, pemerintahan, kebudayaan dan sebagainya. Dengan demikian peranan jalan tidak hanya perlu ditinjau dari kepentingan pada satu saat saja tetapi juga perlu ditinjau secara menyeluruh dalam

hubungannya dengan kegiatan-kegiatan atau program-program lainnya. Faktor utama yang mendorong diadakannya perbaikan sarana jalan dan jembatan disebabkan karena makin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang pada saat ini mencapai jumlah 157.619 buah. Panjang jalan yang hanya 800 km tidak lagi dapat menampung lalu-lintas kendaraan sehingga mengakibatkan kemacetan.

Dalam rangka perbaikan dan normalisasi jalan, jalan-jalan di ibu kota dibedakan menurut fungsinya yaitu: Jalan ekonomi, jalan lingkungan dan jalan desa (*Gita Jaya* 1977:238). Pada tahun-tahun ini telah dilaksanakan rehabilitasi jalan ekonomi sepanjang 317 Km, peningkatan mutu jalan dan normalisasi jalan ekonomi sepanjang 200 Km dan pembuatan jalan ekonomi yang baru sepanjang 3.500 M. Sedangkan untuk jalan lingkungan telah diperbaiki sepanjang 635 Km dan pembuatan serta perbaikan jembatan beton sebanyak 93 buah (Repelita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:55). Tahapan pembangunan jalan-jalan dalam Rencana Induk 1965-1985 diatur menurut kebutuhan dan persesuaian dengan tahapan perluasan kotanya. Bahkan pada tahapan-tahapan perluasan kota, pembangunan jalan ini dapat merupakan pembuka bagi daerah-daerah yang akan dibangun. Jumlah panjang jalan yang akan dibangun menurut tahapan-tahapan dari tahun 1965-1970 adalah:

- (1) Tahapan pertama 1965-1966 : 46,75 Km
 - (2) Tahapan kedua 1967-1968 : 46,50 Km
 - (3) Tahapan ketiga 1969-1970 : 43,50 Km
- (*Master Plan* 1965-1985: 19 dan periksa Peta 6).

g. **Angkutan Umum** : Angkutan umum pada dasarnya bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada masa ini semakin dirasakan kebutuhannya. Walaupun jumlah kendaraan pribadi masih akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang, tetapi sistem angkutan umum tidak akan ditempuh dengan mendasarkan semata-mata pada jumlah kendaraan pribadi. Sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan di dalam Rencana Induk bagian terbesar penduduk yang membutuhkan transportasi akan ditampung dengan angkutan umum berupa bis, bemo, taksi dan kereta api. Karena sistem perkotaan hingga kini masih belum memadai untuk dipakai sebagai sarana angkutan penumpang dalam kota, maka titik beratnya sekarang masih terletak pada pola angkutan melalui jalan-jalan raya. Kesulitan untuk memanfaatkan sarana transportasi kereta api terutama karena kurang luasnya jaringan kereta api yang tersedia yang ada pada saat ini adalah sistem jaringan yang membujur dari utara ke Selatan di bagian sebelah timur pusat kota yang hanya dapat menampung penduduk sekitar Jatinegara. Kesulitan lainnya terletak pada lintasan kereta api yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan menghambat lalu-lintas jalan. Pemecahan yang telah dipikirkan adalah dengan merubah sistemnya menjadi jalur kereta api di atas tanah (elevated railroad track) atau dengan sistem jaringan kereta api bawah tanah (Repelita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:56).

Bis kota yang beroperasi pada saat ini berjumlah 1.800 buah dan beroperasi pada rute sebanyak 63 buah, pelayanan dengan bis kota belum dapat melayani keperluan penduduk dengan sebaik-baiknya. Dalam penentuan target terutama diperhitungkan

kan banyaknya penduduk yang harus diangkut pada "peak hour" yakni waktu dimana orang-orang pergi atau kembali dari kantor-kantor, tempat-tempat kerja, sekolah dan sebagainya. Dari jumlah penduduk yang harus diangkut pada tahun 1965/1966 kebutuhan akan bis kota adalah 3.100 buah dan pada tahun 1970 membutuhkan 5300 buah bis (*Master Plan 1965-1985:13*).

Untuk memberikan pelayanan lebih baik dan dalam usaha mengurangi pemakaian kendaraan pribadi adalah dengan memberikan perbaikan dalam sistem pertaxian. Jumlah taxi yang ada sekarang ini adalah 871 buah. Sampai dengan saat ini alat transportasi seperti beca, bemo dan heliacak masih memegang peranan penting, tetapi sesuai dengan kebijaksanaan untuk menghapuskan becak yang akan sepenuhnya berlaku pada tahun 1979, maka kendaraan penggantinya harus sudah terpeenuhi dalam waktu yang dekat (*Repelita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:57*).

Bagi pengangkutan umum antar kota dilayani oleh bis-bis umum dan kereta api dan akan dipusatkan pada sebuah terminal pusat di Manggarai yang direncanakan akan dibangun menjadi terminal pusat bagi penumpang yang masuk dan keluar Jakarta. Dengan adanya terminal pusat yang sudah direncanakan, maka jalan-jalan kereta api inter-lokal hanya akan mempunyai route-route:

1. Cakung-Jatinegara-Manggarai-Tanah Abang-Kota
2. Kota-Tanah Abang-Serang
3. By-Pass train: Cakung-Tanjung Priok-Kota.

Dengan demikian stasiun Tanah Abang dan Kota hanya berfungsi sebagai sub-terminal (bagi penumpang), sedangkan stasiun Tanjung Priok terutama

sebagai pusat pergudangan yang sesuai dengan letaknya di daerah industri dan pelabuhan. Stasiun Cakung mempunyai fungsi untuk menyortir barang-barang yang datang dari luar/dalam kota sehingga diperlukan emplasemen langsiran yang luas disertai pergudangan. Sedangkan stasiun Senen, Jatinegara, Gambir, Kemayoran menjadi stasiun sub-way (*Master Plan* 1965-1985:14).

- h. Telekomunikasi : Pada saat ini Sentral-sentral telepon dalam kota Jakarta mempunyai kapasitas sebanyak 26.000 nomor. Dibandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 4 juta orang berarti density telepon di ibukota hanya mencapai 0,65%. Bidang ini kemudian ditambah sehingga mencapai 46.000 buah unit jaringan. Sudah jelas bahwa hal ini masih jauh dari jumlah kebutuhan dan untuk itu disediakan telepon-telepon umum sebagai kerjasama antara Pemda DKI dengan Perum Telekomunikasi (Repe-lita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:58).

Menurut Master Plan 1965-1985, telekomunikasi dalam jangka waktu 20 tahun (1965-1985) jumlah nomor telepon akan diperluas sampai 325.000 buah, ini berarti suatu perluasan dari kira-kira 300.000 nomor dalam jangka waktu 20 tahun. Jadi setiap tahun penambahannya sebanyak 15.000 nomor. Diperkirakan jumlah penduduk dalam 20 tahun meningkat menjadi 6,5 juta orang. Bila pembangunan telekomunikasi dapat dilaksanakan menurut rencana maka density telepon akan menjadi 4,6% (*Master Plan* 1965-1985:16).

- i. Listrik : Bagi Jakarta sebagai ibukota dimana kehidupan perekonomian tergantung pada kegiatan perdagangan, industri, jasa dan pariwisata, tersedianya listrik yang cukup mutlak diperlukan. Namun

pada masa ini walaupun kebutuhan meningkat terus tetapi penyebarannya belum merata keseluruhan lapisan masyarakat di Jakarta. Hal ini antara lain disebabkan karena masih terbatasnya jaringan distribusi juga penyambungan ke rumah-rumah belum dapat dilakukan sebelum persyaratan-persyaratan planologis dan teknis pelistrikan terpenuhi. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi pencurian listrik yang merugikan PLN. Dalam usaha meningkatkan pelayanan listrik ini dibangun beberapa pembangkit listrik yaitu: Pembangkit listrik tenaga uap di Muara Karang, Pembangkit listrik tenaga gas di Pulo Gadung, dan Pembangkit Listrik tenaga gas di Tanjung Priok.

Dengan adanya pembangunan pembangkit listrik maka terjadi penambahan penyediaan listrik dari 113.660 Kw menjadi 207.600 Kw itu berarti dari 22,8 W/kapita menjadi 43,5 W/kapita. Selain itu juga diadakan penyempurnaan jaringan-jaringan distribusi terutama di dalam rangka pembangunan tegangan dari 110 volt menjadi 220 volt (Repe-lita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:59).

Sampai dengan tahun 1970 dengan jumlah penduduk 4.200.000 ditargetkan kebutuhan tenaga listrik menjadi 242.000 Kw dan ini berarti jatah per kapita adalah 58 watt. Guna mengatasi kekurangan tenaga listrik di Jakarta maka dimintakan bantuan dari sentral-sentral hydro di luar Jakarta yaitu dari Bogor, Jawa Barat bagian timur termasuk Jatiluhur (*Master Plan* 1965-1985:11-12).

j. Gas : Gas sebagai bahan pemanas, bila ditinjau dari sudut keamanan, kebersihan serta efisiensi lebih menguntungkan daripada bahan-bahan bakar lainnya. Sampai saat ini pemakaian gas mencapai 600×10^6

kalori/bulan/unit konsumen. Angka ini akan meningkat terus sesuai dengan pertambahan penduduk yang makin pesat (Repelita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:60).

Khusus untuk Jakarta sesuai dengan master plan 1965-1985 telah direncanakan pengembangan yang akan meliputi tahap-tahapan dengan penekanan pemikiran guna memanfaatkan penggunaan batu bara bermutu rendah serta gas alam yang telah ditemukan di sekitar kota Jakarta. Tahap I 1965-1970 :

1965-1968 membendung kemerosotan produksi
1958-1970 rehabilitasi guna memanfaatkan "full capacity" dari pabrik gas di jl. Keta-pang termasuk penyelesaian pabrik peralatan perindustrian gas di Klen-der.

Dalam perluasan produksi gas yang dibuat (*manufactured gas*) difikirkan penempatan pabrik-pabrik gas di daerah Kebayoran Lama dan pinggiran kota sebelah barat laut. Sedangkan untuk daerah perindustrian di sebelah timur Jakarta difikirkan pemasukan gas alam yang diperoleh dari daerah Krawang, yang akan dihubungkan dengan saluran melingkar dengan penampung-penampung gas di beberapa tempat dipinggiran kota. Adapun letak dari pabrik akan disesuaikan dengan kondisi setempat. Selain itu akan diadakan rehabilitasi pipa hantar sepanjang 200 Km serta diperluas dengan pipa-pipa hantar utama mengikuti perkembangan jalan-jalan raya serta alat angkut lain guna keperluan langganan yang diperkirakan akan berjumlah 360.000 di tahun 1980 (*Master Plan* 1965-1985: 12).

k. Air bersih : Salah satu sarana yang merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan masyarakat kota adalah tersedianya air bersih. Persediaan air bersih di Jakarta masih belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk akibat kenaikan penduduk yang sangat cepat. Yang menjadi sumber air minum bagi seluruh penduduk Jakarta adalah instansi penjernihan air minum Pejompongan dan sumber air minum di Ciburial Bogor. Produksinya pada tahun 1966, masing-masing 2000 militer/detik dari Pejompongan dan 306 liter/detik dari Ciburial Bogor. Adapun kebutuhan yang sesungguhnya adalah 8000 liter/detik sehingga air minum masih jauh di bawah kebutuhan kota.

Selain masalah di atas yang juga menjadi masalah adalah pipa-pipa jaringan distribusi air sudah tidak memenuhi syarat penggunaan lagi karena pipa-pipa tersebut sudah berumur kira-kira 50 tahun. Keadaan seperti ini mengakibatkan terjadinya kebocoran dimana-mana yang mengurangi tekanan air. Keadaan ini telah diusahakan pemerintah pusat untuk ditanggulangi yaitu dengan melaksanakan perluasan instalasi Pejompongan dan rehabilitasi jaringan pipa yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Program ini telah menaikkan tambahan produksi air minum sebanyak 1.000 liter/detik sedangkan jaringan pipa yang direhabilitasi sepanjang 225 Km (*Gita Jaya* 1977: 249).

Jumlah peningkatan pada masa ini adalah dari 2.300 liter/detik menjadi 5.300 liter/detik sedangkan rehabilitasi pipa induk mencapai 11.618,68 m, penambahan ini tidak berarti kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena baru

mencapai 25% dari kebutuhan yang wajar (Repe-
lita DKI Jakarta 1974/1975-1978/1979:66).

Adapun rencana selanjutnya adalah memba-
ngun instalasi Cawang dengan kapasitas sampai
6000 liter/detik yang diharapkan pembangun-
nya dimulai pada tahun 1970 yang akan menda-
pat air dari Jatiluhur. Hal ini akan menaikkan per-
sediaan air menjadi 220 liter/orang/hari untuk
kira-kira 80% penduduk Jakarta (*Master Plan*
1965-1985:11).

- l. Tempat ibadah : Pembangunan fisik sarana-sarana keagamaan merupakan tugas dari Pemda DKI Jakarta yang di-
bantu dengan swadaya masyarakat. Adapun yang
merupakan sarana ibadah meliputi rumah-rumah
ibadah, madrasah, pesantren, asrama haji. Dari
tahun ke tahun ternyata terjadi pertambahan ru-
mah ibadah. Pada tahun 1969 jumlah seluruhnya
adalah 3.924 buah, jumlah ini meningkat menjadi
5.626 buah pada tahun 1973. Pada tahun 1970
jumlah seluruh rumah ibadah adalah 4.125 buah
yang terdiri dari: Masjid 620 buah, Langgar 2.957
buah, Gereja 431 buah dan kuil klenteng berjumlah
118 buah (LPEM FEUI 1981: 45,47).

- m. Tempat Rekreasi : Dalam menunjang pengadaan sarana
rekreasi untuk umum oleh Pemda DKI telah di-
bangun di beberapa tempat, yang secara umum di-
bagi atas:

- (1) Tempat rekreasi di alam terbuka: Taman Mar-
ga Satwa Ragunan, Taman Impian Jaya An-
col, Taman Ria, Pacuan kuda dan Anjing,
Pluit.
- (2) Tempat rekreasi tertutup: Taman Ismail
Marzuki, Museum pusat (gajah), Museum
Satria Mandala dan bioskop film yang sampai
tahun 1969 berjumlah 45 buah.

Oleh pemerintah DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak swasta, tempat-tempat rekreasi ini terus dibangun dan diperluas sementara itu terhadap museum-museum dilakukan pemugaran-pemugaran (LPEM FEUI 1981: 93, 97 dan Repelita DKI Jakarta 1974/1975–1978/1979 : 31).

4. PERKEMBANGAN KOTA JAKARTA 1970–1980

4.1 Pengembangan Wilayah

Perkembangan kota Jakarta pada masa ini juga tetap mengikuti Master Plan 1965–1985. Berdasarkan rencana ini telah ditetapkan peruntukan wilayah kota agar memudahkan arah perkembangan kota, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Pusat Pemerintahan
- b. Wilayah pengembangan kebudayaan dan kerohanian
- c. Wilayah pusat kegiatan politik nasional dan internasional
- d. Wilayah perdagangan dan usaha
- e. Wilayah industri
- f. Wilayah kewismaan
- g. Wilayah rekreasi
- h. Wilayah perlengkapan-perengkapan kota serta perhubungan. (Master Plan 1965–1985:1).

Sedangkan bentuk dan arah perkembangan kota Jakarta ditentukan adanya pemekaran kota yang seimbang kesegala arah. Titik pancar perkembangan wilayah kota adalah Tugu Nasional dengan radius 15 km (lihat Peta 1). Dengan terjadinya pertambahan penduduk yang pada tahun 1969 berjumlah 4.273.863 jiwa menjadi 6.239.293 jiwa pada tahun 1979 atau 4,1 persen setahun, maka jumlah areal tanah yang diperlukan tentunya juga akan semakin meningkat. Luas areal tanah yang pada tahun 1965 adalah 18.000 Ha maka diproyeksikan sampai tahun 1985 menjadi 50.000 Ha. Untuk mendukung maksud ini Pemerintah DKI Jakarta juga telah mencadangkan areal tanah berbagai peruntukan dalam wilayah Jakarta sebagai berikut:

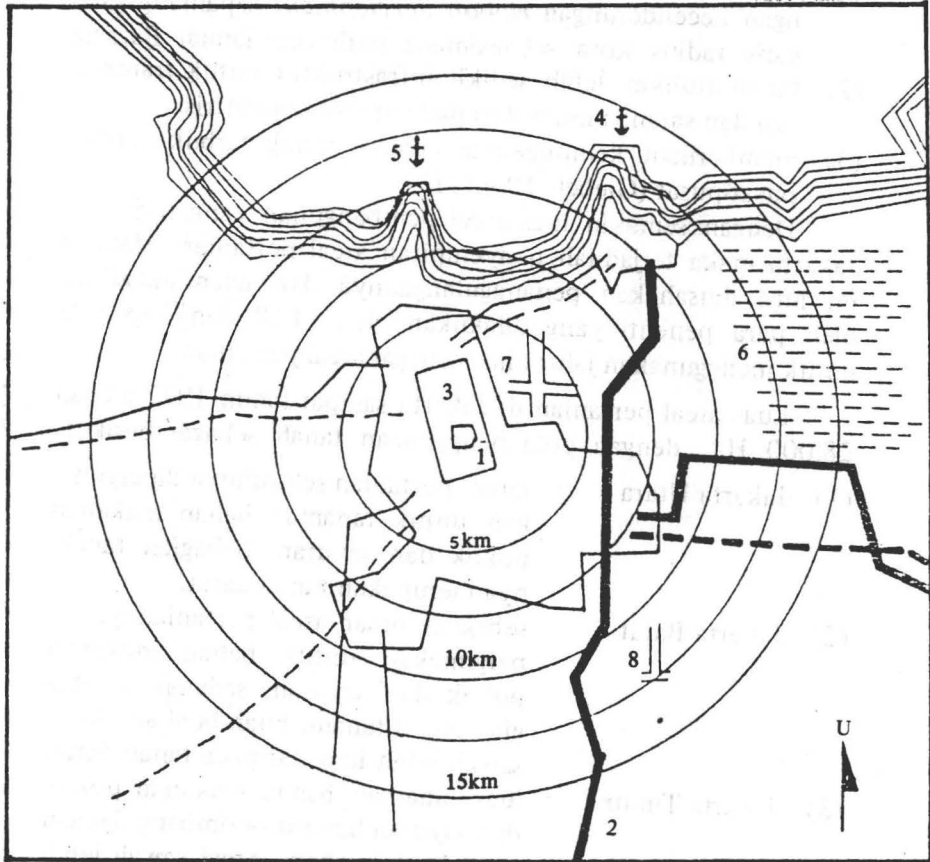
Kota inti	180 km
Penambahan areal untuk perumahan	150 km
Industri	70 km
Usaha-usaha lain	21,5 km
<hr/>	
Jumlah	421,5 km ²
<hr/>	

Akibat dari pertambahan penduduk yang pesat maka saat ini kepadatan penduduk Jakarta terhadap 635 km² adalah 82 orang/Ha. (Bianpoen 1977: 12 dan 13).

Selain dari usaha ini oleh Pemerintah DKI Jakarta juga telah direncanakan kerjasama dengan Pemda Jawa Barat untuk pengembangan wilayah yang meliputi kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi yang dikenal dengan istilah "JABOTA-BEK". Kerjasama pengembangan Jabotabek ini diharapkan akan banyak membantu mengurangi tekanan kepadatan penduduk di Jakarta (*Gita Jaya* 1977: 223). Keadaan Jakarta yang seperti ini rupa-rupanya bermula dari jaman kolonial Belanda yang lemah dulu, jenjangan kota-kota besar dan berlanjut pada masa masa kemerdekaan dimana segala kegiatan seperti kegiatan politik dan pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, investasi sosial dan budaya dimana 50% belanja nasional dipusatkan di Jakarta. Selain Jabotabek maka usaha untuk mengurangi kepadatan penduduk seperti transmigrasi, keluarga berencana dan pengembangan daerah pedesaan juga dilakukan (Giebels 1986: 109).

Pelaksanaan dari Jabotabek ini dilakukan oleh Cipta Karya yang bekerja sama dengan Belanda yang diwujudkan pada tahun 1975. Konsep perencanaan diambil dari model urbanisasi "Randstad" di Belanda yaitu "bundled deconcentration". Ada 2 model yang akan diterapkan pada Jabotabek, yang pertama adalah model konsentris yang memberikan kemungkinan perkembangan kesegala arah dan model linear yang memberikan kemungkinan perkembangan dari pusat pada garis Jakarta-Bogor, Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bekasi. Maka ditetapkanlah

Peta 1.
Wilayah Jakarta dan Pusat-pusat Aktivitas
(Tugu Monas sebagai Titik Pusat)



Sumber: Surjomihardjo 1977:74

Keterangan:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Monumen Nasional | 5. Pelabuhan Pasar Ikan |
| 2. Jalan Utama | 6. Rawa-rawa |
| 3. Pusat Kegiatan Kota | 7. Lapangan Udara Kemayoran |
| 4. Pelabuhan Tanjung Priok | 8. Lapangan Udara Cililitan
(sekarang Halim Perdanakusuma). |

model yang sangat mungkin yaitu model linear dengan perkembangan segi empat (lihat peta 2). Dengan 3 alasan:

- (1) model linear dapat diterapkan karena ada kesesuaian dengan kecenderungan *ribbon development* sepanjang garis-garis radius kota sebagaimana perluasan jaman Batavia.
- (2) membutuhkan lebih sedikit infrastruktur untuk transportasi dan sarana umum dari pada model konsentris.
- (3) memberikan kemungkinan adanya ruang terbuka antara pusat-pusat (Giebels 1986:113).

Dengan semakin luas areal pembangunan yang terjadi di Jakarta maka terjadilah penyempitan areal pertanian, Masalah ini juga diusahakan penanggulangannya dan telah diusulkan oleh para peneliti yang dilakukan oleh FEUI dan Bappenas untuk menggunakan jalur hijau sebagai areal pertanian.

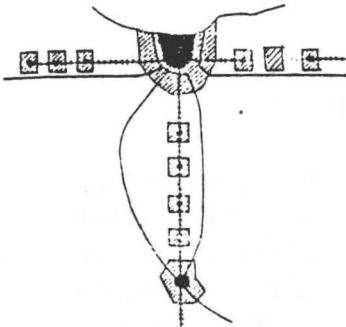
Luas areal pertanian di Jakarta sampai tahun 1977 adalah 28.000 Ha., dengan pola penggunaan tanah sebagai berikut:

- (1) Jakarta Utara : tanah pertanian seluruhnya dipergunakan untuk tanaman bahan makanan pokok dan sayuran. Sebagian tanahnya merupakan tanah darat.
- (2) Jakarta Barat : sebagian besar areal pertaniannya dipergunakan untuk bahan makanan pokok dan sayuran, sedangkan sebagian lagi ditanami buah-buahan. Areal sawah lebih luas daripada tanah darat.
- (3) Jakarta Timur : luas tanaman bahan makanan pokok dan sayuran hampir berimbang dengan areal buah-buahan. Areal sawah lebih luas daripada tanah darat.
- (4) Jakarta Selatan : merupakan daerah pertanian buah-buahan, sedangkan tanaman bahan makanan pokok dan sayur-sayur menempati areal yang lebih sempit.

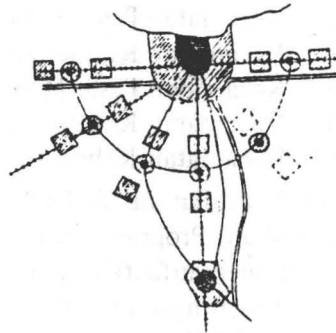
Adapun ciri usaha tani masih dititik beratkan pada usaha tani tanaman pangan dengan tingkat produktifitas yang rendah.

Peta 2.
Model-model Dekonsentrasi Terkelompok

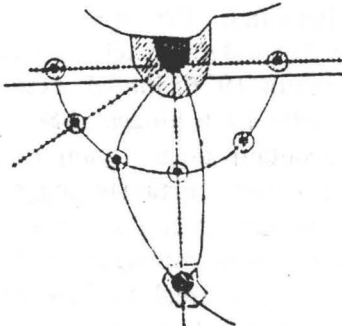
Sketsa sistem linear



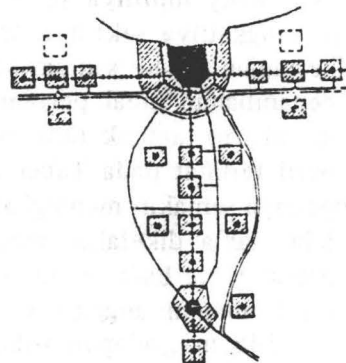
Sketsa sistem linear dengan
 perluasan-perluasan segi empat



Sketsa sistem konsentris



Sketsa sistem konsentris dengan
 perluasan-perluasan segi empat



Sumber: JABOTABEK 1973: 127, 129
 Giebels 1986:

Ini berarti aspek agronomis perlu mendapat perhatian yang nyata. Sehubungan dengan kondisi demikian maka persyaratan dengan teknologi mutahir menuju kepelaksanaan intensifikasi adalah persyaratan yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun daerah pertanian hortikultura yang potensial untuk dikembangkan di wilayah DKI Jakarta ada 5 kecamatan, yaitu:

- (1) Kecamatan Pasar Rebo
- (2) Kecamatan Kramat Jati
- (3) Kecamatan Pasar Minggu
- (4) Kecamatan Kebayoran Lama/Cilandak .
- (5) Kecamatan Kebon Jeruk

Untuk usulan ini maka telah disarankan oleh penelitian yang dilakukan Program Perencanaan Nasional FEUI-BAPPENAS untuk memanfaatkan jalur hijau untuk kegiatan ekonomi tanpa merubah fungsi utamanya. Dari areal jalur hijau yang diusulkan seluas 2.558 Ha yang diasumsikan peruntukannya sebagai berikut: 600 Ha untuk tanaman sayuran, 800 Ha untuk tanaman rambutan, 600 Ha untuk tanaman jeruk, 300 Ha untuk tanaman pepaya, 200 Ha untuk tanaman jambu biji dan sisanya 58 Ha tidak dapat dimanfaatkan karena topografinya kurang baik.

Menyempitnya tanah pertanian di Jakarta adalah karena meningkatnya sektor industri dan bangunan. Penurunan areal pertanian terjadi sampai tahun 1975 dan walaupun telah terjadi penambahan areal pertanian pada tahun 1976, jumlah petani di Jakarta tampak terus menurun mulai 1970 hingga 1980 seperti terlihat pada Tabel 28. Hanya petani anggrek yang tampaknya semakin meningkat, mungkin karena pertanian anggrek telah lama diketahui sebagai tanaman yang mempunyai masa depan yang baik. Tampak juga adanya pengembangan jumlah areal tanaman anggrek, pada tahun 1979 luas areal itu mencapai 425.345 m², adapun wilayah yang merupakan daerah anggrek adalah Jakarta barat dan selatan (lihat Tabel 29 dan LPEM FEUI 1981: 1-15).

Selain penanggulangan masalah areal tanah maka telah direncanakan pula penambahan dan pemeliharaan sarana-sarana umum lainnya.

4.2 Pengembangan Prasarana Umum

- a. Jalan dan jembatan: Selama ini telah dilakukan rehabilitasi pembangunan jalan ekonomi sepanjang 465 km, dan jalan lingkungan sepanjang 818 km (*Gita Jaya* 1977:239). Penambahan jumlah panjang jalan di DKI Jakarta adalah dalam rangka perluasan jaringan jalan ke seluruh penjuru kota disesuaikan dengan struktur kota. Penambahannya masih dititik beratkan pada jalan-jalan di daerah kampung-kampung yang dilaksanakan melalui program MHT dan penambahan jalan ekonomi desa yang merupakan jalan lingkungan di wilayah pinggiran yang dilaksanakan melalui program Bantuan Inpres Dati II. Pembangunan jalan-jalan di kampung dilakukan dengan standarisasi yaitu 80 m per Ha jalan kendaraan dengan lebar aspal rata-rata 4 m serta 130 m per Ha jalan dengan lebar 1,5 m (Repelita III 1979/1980–1983/1984:85).
- b. Angkutan umum dan Lalu-lintas: Perkembangan jalan-jalan pada kenyataannya tidaklah dapat menampung jumlah kendaraan yang juga semakin meningkat rata-rata per tahun 16,74%. Hal ini tentunya akan berakibat pada kemacetan lalu-lintas. Usaha lain yang ditempuh untuk menanggulangi hal ini maka dibuat peraturan dengan sistim satu lintasan dan pada tahun 1977 telah digunakan komputer untuk pengaturan lampu lalu-lintas. Pola angkutan umum yang ditetapkan adalah berdasarkan pada pola angkutan umum dasar dengan kereta api dan bus. Dan sebagai pelengkap adalah kendaraan-kendaraan kecil beroda tiga, taxi dan oplet. Untuk itu dibangun pula terminal-terminal bis kota dan antar kota. Yang sampai saat ini telah dibangun 22 buah terminal bis kota dengan 476 buah tempat pemberhentian bis (*Gita Jaya* 1977:

Tabel 28.
Perkembangan Areal, Pertanian DKI Jaya (dalam hektar)
(1969 – 1980)

Tahun	Tanah Sawah			Tanah Daratan			Jumlah Seluruh Areal Pertanian
	Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Jumlah	Pekarangan	Tegalan	Jumlah	
1969							
1970		14.871,94	14.871,94			20.469,92	35.341,86
1971		13.760,69	13.760,69			17.446,09	31.206,79
1972		12.480,35	12.480,35			15.667,75	28.148,10
1973		11.663,36	11.663,36			14.398,39	26.061,75
1974		11.538,66	11.538,66			12.617,58	24.155,24
1975	11.034,94	5.044,44	16.079,38			15.884,97	31.964,35
1976	7.468,15	5.373,88	12.842,03	6.815,22	8.627,56	15.642,79	28.484,31
1977	7.439,95	5.343,21	12.483,16	6.117,10	8.862,25	15.519,35	28.002,51
1978	7.086,50	5.082,41	12.168,91	6.624,40	8.580,57	15.204,97	27.373,88
1979	6.507,00	5.062,44	11.569,44	7.361,76	7.860,12	15.221,88	26.791,32
1980	5.813,66	4.701,67	10.514,94	7.553,03	6.155,90	13.108,97	24.223,91

Tabel 29.
Perkembangan Petani dan Tanaman Anggrek
di DKI Jaya (1074–1977 dan 1979–1980)

Uraian	1974	1975	1976	1977	1979	1980
1. Jumlah Petani	352	413	430	452	579	582
2. Jumlah Tanaman	817.891	1.567.891	1.697.791	1.747.825	3.412.389	2.923.276

Sumber: Dinas Pertanian DKI Jaya.

- 241, 242; dan *Repelita III* 1979/1980–1983/1984: 90 dan 91).
- c. Listrik: Pada masa ini telah terpasang pembangkit listrik tenaga uap di Muara Karang, Pembangkit tenaga gas di Pulo Gadung dan PLTG di Tanjung Priok. Sampai saat ini telah tersedia 886,5 MW dengan jatah 139 watt per kapita. Di samping ini juga telah diadakan penyempurnaan jaringan distribusi yang diikuti dengan perubahan tegangan dari 110 volt ke 220 volt dan telah dibangun gardu listrik sebanyak 571 buah (*Repelita III* 1979/1980–1983/1984: 95).
 - d. Gas : Sampai saat ini pemakaian gas telah mencapai 600 X 106 kalori/bulan/unit konstruksi dan kebutuhan ini akan terus meningkat. Untuk itu Pemda DKI telah memberikan bantuan kepada PN Gas dalam hal saluran distribusi yang rencananya meliputi pembaharuan dan penyesuaian sistem distribusi yang tersebar dalam 5 wilayah yang meliputi panjang keseluruhan 250 km. Oleh pemerintah pusat juga diberikan bantuan yaitu akan selesainya pemasangan jaringan pipa transmisi gas bumi sepanjang 30 km dari Cimanggis ke Jakarta melalui Jagorawi. Jaringan ini merupakan penyesuaian dari pipa transmisi Cilamaya – Cilegon. Sampai dengan akhir Pelita II pelayanan gas dalam kota dihasilkan oleh pabrik gas yang terletak di Jl. Zainul Arifin (*Gita Jaya* 1977: 254; *Repelita III* 1979/1980–1983/1984:96).
 - e. Penyediaan air bersih: Penyediaan air minum bagi penduduk Jakarta bersumber dari instansi penjernihan air Pejompongan dan sumber air minum di Ciburial-Bogor. Kapasitas yang dihasilkan masih terbatas apabila kebutuhan air minum per kapita 180–200 liter/hari. Yang menjadi masalah pula adalah menurunnya air dari Ciburial, sehingga yang menjadi masalah sekarang ini adalah bukan hanya bagaimana menaikkan produksi air tetapi penyediaan jaringan

distribusi air dari pusat produksi menuju langganan. Maka dibangun tempat penjernihan air untuk bagian timur Jakarta dengan kapasitas 4.000 liter/detik. Selain itu juga dibuat kerjasama dengan Belanda untuk pembangunan dan pengembangan air bersih "Miniplant Cilandak" guna penyediaan air minum daerah Jakarta Selatan. Untuk daerah Jakarta barat dibangun instalasi kecil Jelambar (*Gita Jaya* 1977:250,251).

Perluasan jaringan air minum terutama dilakukan pada daerah-daerah peremajaan melalui MHT. Walaupun sudah diusahakan meningkatkan produksi air minum tapi pada kenyataannya baru 83,48 l/hari/orang dan ini masih jauh dari yang direncanakan dalam Master Plan 1965–1985 yaitu 350 l/hari/orang. Penyaliran air bersih selain untuk penduduk juga disalurkan untuk keperluan pemadam kebakaran, Rumah sakit, tempat-tempat ibadah, kapal-kapal, industri dan MCK di proyek MHT (*Repelita III* 1979/1980–1983/1984: 97 dan 98).

- f. Telekomunikasi : Program pembangunan sistem telekomunikasi di Wilayah DKI Jakarta adalah wewenang dari Pemerintah pusat, sedangkan bantuan dari pemerintah daerah khususnya adalah dalam pembebasan tanah untuk sentral telepon serta lokasi kabel tanah. Pada akhir Pelita I, jumlah pesawat telpon yang ada masih sangat rendah yaitu 45.300 sambungan atau 0,9% dari jumlah penduduk.

Dengan bantuan dan pinjaman dari Bank Dunia, Pemerintah Jepang, Belanda dan Jerman, diharapkan dapat menambah kapasitas sentral-sentral telepon di Jakarta. Pada tahun 1976 telah berjalan penambahan telepon sebanyak 56.060, merupakan pelayanan yang diutamakan di daerah Kebayoran, Jatinegara, Gambir, Slipi, daerah Gajah Mada, Pulo Gadung, Rawamangun dan Ancol. Dengan pertambahan ini maka keseluruhan sambungan telepon mencapai 101.300. Untuk tahun 1918 telah ditargetkan sebanyak 262.800 pesawat (*Gita Jaya* 1977:255).

Dalam rangka pembangunan wilayah Jabotabek oleh Perum Telekomunikasi telah dilaksanakan program pembangunan sentral Telepon di wilayah Jabotabek, di Jakarta didirikan 99 Sentral telepon otomatis, 45 sentral telepon otomatis di daerah Tangerang, Cibinong, Bogor dan Bekasi (*Repelita III* 1979/1980–1983/1984: 92 dan 93).

- g. Sekolah : Dalam membicarakan sarana pendidikan ada 4 elemen pokok yang perlu mendapat perhatian utama yaitu: Gedung sekolah, sekolah, guru dan murid. Pendidikan tidak akan berjalan dengan sempurna bila salah satu elemen pokoknya terabaikan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sarana pendidikan tersebut pemerintah DKI Jakarta dari tahun ke tahun selalu berusaha menyempurnakan kelengkapan sarana-sarana pendidikan yang dibutuhkan. Jumlah SD dari 1.332 buah pada tahun 1969 menjadi 2.624 buah pada tahun 1979. Jumlah SMP pada tahun 1969 baru 299 buah dan pada tahun 1979 menjadi 615 buah sedangkan SMA pada tahun 1969 berjumlah 128 buah pada tahun 1979 menjadi 213 buah.

Selain sekolah-sekolah umum juga terlihat bahwa sekolah kejuruan seperti ST (sekolah tehnik) dan SMEP (sekolah menengah ekonomi pertama) juga mengalami kenaikan pada setiap tahun hanya pada tahun 1979 terlihat makin menurun. Berbeda dengan STM (Sekolah Tehnik Menengah) dan SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) terus meningkat, untuk STM peningkatan terlihat dari 21 buah pada tahun 1969 menjadi 73 buah dan SMEA dari 35 buah pada tahun 1969 menjadi 72 buah pada tahun 1979 (lihat Tabel 30). Bila kita perhatikan semua data yang ada ternyata bahwa jumlah sekolah umum lebih banyak dari sekolah kejuruan (LPEM FEUI 1981:67-69).

Perkembangan gedung sekolah Umum dan kejuruan dapat dilihat bahwa jumlah gedung sekolah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sekolah. Hal ini disebabkan

karena adanya sebagian gedung sekolah yang dipakai pada pagi dan siang hari untuk sekolah yang berbeda (lihat Tabel 31).

Bagaimana dengan jumlah guru? ternyata juga mengalami kenaikan yang mana hal ini sesuai dengan bertambahnya jumlah murid dari tahun ketahun. Jumlah guru SD pada tahun 1969 adalah 11.439 orang dan pada tahun 1979 hampir mencapai 2 kali lipatnya. Jumlah guru SMP dan SMA pada tahun 1969 adalah 2.977 orang dan 3.148 orang sedangkan pada tahun 1980 menjadi 13.342 dan 6.718 orang pada tahun 1980 (LPEM FEUI 1981:73).

Jumlah murid SD mengalami peningkatan dari 473.676 orang pada tahun 1969 menjadi 902.936 orang pada tahun 1979. Murid SMP dari tahun 1969 berjumlah 82.793 pada tahun 1979 adalah 215.240 orang. Murid SMA dari 36.240 menjadi 117.369 orang pada tahun 1979. Demikian juga dengan sekolah kejuruan jumlah murid terus meningkat, hanya saja jumlah murid sekolah umum lebih banyak dibandingkan dengan jumlah murid sekolah kejuruan (lihat Tabel 32 dan LPEM FEUI 1981: 73 dan 74).

- h. Perumahan : Perumahan juga merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan dari dahulu hingga sekarang. Masalah ini timbul karena keterbatasan tanah dan daya dukungnya. Perumahan dan pemukiman terus menerus harus ditingkatkan penyediaannya untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia yang terus menerus meningkat akibat pertambahan penduduk yang pesat. Peningkatan harga rumah jauh lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga untuk golongan masyarakat yang berpendapatan rendah hal ini semakin mendesak mereka. Pemilikan rumah oleh orang-orang yang berpendapatan rendah sebagian besar berada dipinggiran kota dimana mereka bekerja dibidang pertanian.

Tabel 30.
Banyaknya Sekolah Umum dan Kejuruan di DKI Jakarta
(1969 – 1980)

Jenis Sekolah	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
TK	396	425	448	506	511	470	550	615	661	661	661	760
SD	1.332	1.500	1.493	1.570	1.603	1.686	1.838	2.150	2.354	2.494	2.624	2.822
SMP	299	307	329	353	381	381	411	451	491	493	615	651
SMA	128	128	137	133	133	135	149	152	155	163	213	224
ST	17	18	25	25	24	28	29	33	27	28	28	20
SMEP	14	13	18	17	18	17	15	15	10	11	—	—
SMEA	35	40	40	40	44	45	44	59	55	59	72	70
STM	21	21	33	36	40	43	50	56	61	65	73	97
SKKA	9	6	6	6	6	7	10	10	12	13	13	13
SKKP	—	9	8	9	9	10	12	12	10	10	7	6
KPA	7	7	7	7	6	6	—	—	—	9	9	12
KPAA	6	6	6	6	5	5	—	—	—	10	10	12

Sumber: Perwakilan P & K DKI Jakarta
dalam Jakarta Dalam Angka 1977 dan 1981.

Tabel 31.
Banyaknya Gedung Sekolah Umum dan Kejuruan di DKI Jakarta
(1969 – 1980)

Jenis Sekolah	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
TK			371	420	442	343	550	586	586	586	586	612
SD			1.024	1.060	1.152	1.205	1.316	1.506	1.653	1.667	1.730	1.969
SMP			140	152	186	173	255	255	309	314	335	555
SMA			76	77	90	78	96	96	106	106	111	178
ST			16	19	20	26	28	28	22	26	26	26
SMEP			6	6	6	11	9	10	11	12	—	—
SMEA			21	21	23	40	39	39	40	56	58	56
STM			26	24	26	33	34	38	35	62	62	66
SKKA			4	4	5	5	8	8	11	12	12	12
SKKP			9	10	10	9	12	12	9	9	6	6

Sumber: Perwakilan P & K DKI Jakarta
 dalam Jakarta Dalam Angka 1977 dan 1981.

Tabel 32.

**Banyaknya Muris Pada Sekolah Umum dan Kejuruan di DKI Jakarta
(1969 – 1980)**

Jenis Sekolah	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
TK	—	30.200	27.924	40.141	39.430	26.604	31.635	46.311	57.576	52.909	53.000	57.212
SD	473.676	503.816	606.573	525.164	517.642	564.163	609.456	665.426	730.033	818.586	902.936	956.512
SMP	82.793	87.585	90.501	99.459	112.992	113.636	136.382	165.296	196.431	200.709	215.127	251.240
SMA	36.164	35.767	34.895	34.796	39.538	44.363	46.402	52.985	77.682	80.471	91.937	117.369
ST	7.134	7.124	5.967	6.768	7.144	8.134	10.585	10.994	7.145	7.199	4.379	3.002
SMEP	1.726	2.068	2.427	2.669	3.065	3.421	3.600	3.136	2.199	1.917	—	—
SMEA	5.531	7.233	9.811	9.600	11.019	12.443	13.860	16.432	20.289	22.354	25.460	25.976
STM	6.673	4.124	11.121	12.394	14.503	16.144	13.494	21.907	23.168	26.409	23.671	23.883
SKKA	1.240	839	1.740	1.362	2.598	1.811	1.919	1.855	2.387	2.549	1.593	1.968
SKKP	—	1.394	3.742	2.024	1.959	2.312	2.746	2.481	1.153	1.149	767	427

Sumber: Perwakilan P & K DKI Jakarta dalam Jakarta Dalam Angka 1977 dan 1981.

Untuk mengatasi hal ini oleh PEMDA DKI diusahakan berbagai hal antara lain melalui pembukaan daerah pemukiman baru maupun merehabilitasi daerah pemukiman lama. Pemerintah telah berusaha menyediakan perumahan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yaitu berupa perumahan dengan harga yang sangat murah dan ternyata inipun belum dapat terjangkau sehingga diberikan kredit-kredit ringan melalui BTN. Usaha lainnya adalah dengan membangun rumah-rumah bertingkat. Dari tahun 1970 sampai dengan 1979 telah terjadi perubahan proposisi rumah menurut jenisnya. Rumah permanen dan semi permanen meningkat, sedangkan rumah sementara turun (lihat Tabel 33 dan LPEM FEUI 1981: 112 dan 113).

Dalam Master Plan 1965-1985 telah direncanakan bahwa daerah pemukiman adalah daerah Kebayoran Baru, Tebet, Tomang Barat, Rawamangun, Pulo Mas, Cempaka Putih, Menteng, Kemayoran, Grogol dan Tomang barat.

- i. Perbaikan Kampung : 60% dari seluruh penduduk kota Jakarta adalah kelompok penduduk yang terpaksa harus menempati kampung-kampung, sehingga perhatian terhadap kelompok ini haruslah lebih banyak lagi. Perbedaan kesempatan untuk menikmati fasilitas dan mutu yang baik antara penduduk yang bertempat tinggal di perkampungan dan dibagian kota yang lain perlu diperkecil. Karena itu perlu diusahakan sejauh mungkin adanya pemerataan pelayanan. Kebijakan untuk meratakan pelayanan dan bentuk perbaikan mutu lingkungan di Jakarta dapat pula dipandang sebagai suatu usaha menghapuskan kerawanan dalam kota. Adapun yang menjadi sasaran pokok dalam perbaikan kampung adalah perbaikan sarana-sarana berupa: Jalan-jalan, saluran, penyediaan air bersih, penyediaan MCK (mandi-cuci, kakus) dan Puskesmas-Puskesmas, yang mana proyek ini dikenal dengan proyek Muhamad Husni Thamrin (MHT). Sampai dengan tahun 1975/1976

Tabel 33.
Perkembangan Perbandingan Rumah Permanen,
Semi Permanen dan Sementara di DKI Jakarta
Tahun 1971-1980

Tahun	Rumah Permanen (%)	Rumah Semi Permanen (%)	Rumah Sementara (%)
1911	23	25	52
1972	22	25	53
1973	28	28	44
1974	29	28	43
1975	32	31	37
1976	36	31	33
1977	35	30	35
1978	37	33	30
1979	35	33	32
1980	39	33	28

Sumber: KSS DKI Jakarta: Statistik Wilayah DKI Jakarta 1980.

jumlah kampung yang telah diperbaiki meliputi 4.694 Ha yang menyangkut penduduk Jakarta sejumlah 1.965.000 orang yang berjumlah 24 buah kampung dan sampai dengan tahun 1979 mencapai jumlah 330 kampung (*Repelita III* 1979/1980–1983/1984: 114; *Gita Jaya* 1977: 259 dan 260).

- j. Kesehatan/rumah sakit: Program kesehatan pada tahun-tahun ini diutamakan pada peningkatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat lainnya, peningkatan gizi rakyat, peningkatan sanitasi lingkungan, peningkatan kesehatan dan dengan adanya 30 puskesmas Kecamatan dan 262 puskesmas. Ini berarti kenaikan hampir 150% daripada keadaan awal Repelita II. Kemudian dari 40 buah Rumah Sakit yang ada dan mempunyai 7.380 tempat tidur dengan perbandingan tempat tidur 1/804 penduduk. Sebagian dari rumah sakit ini berhasil dikembangkan dengan bantuan tetap dari pemerintah DKI Jakarta. Lalu terjadi penambahan 3 buah Rumah Sakit baru dengan tambahan tempat tidur 873 buah (*Repelita III* 1979/1980–1983/1984: 53 dan 54).

Pengadaan air bersih, penyediaan obat-obatan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas dan penyediaan tenaga medis dan non medis secara merata. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin bertambah luas.

5. RANGKUMAN

Secara umum arah perkembangan kota Jakarta sejak tahun 1946 hingga tahun 1980 memperlihatkan tahap-tahap perkembangan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1940 terlihat adanya dua kutub perkembangan, yaitu Tanjung Priok dan daerah Pasar Ikan.
- b. Pada tahun 1952 terlihat adanya perkembangan ke arah Timur dan Selatan serta pengembangan daerah satelit Kebayoran Baru. Perkembangannya masih bersifat konsentris.

tetapi terbatas pada daerah yang tidak terkena banjir. Sementara itu daerah Tanjung Priok mulai ada pengembangan ke arah Selatan.

- c. Sampai tahun 1972 terlihat bahwa Tanjung Priok berkembang dua kali lebih besar, sedangkan daerah pusat kota meluas ke arah Barat, Selatan dan Timur melewati areal sekitar 8.750 Ha. Pada saat itu diduga tumbuh daerah Tomang, Slipi, Pal Merah, Cipete, Kuningan, Tebet, Cilitan, Rawamangun, Cempaka Putih dan Sumur Batu.
- d. Sampai dengan tahun 1980 nampak kecenderungan pertumbuhan ke arah Selatan, yaitu Cipulir, Cilandak, Cipete, Pejaten, Pasar Minggu, Cijantung dan juga ke arah Timur, yaitu ke daerah Klender, Pulo Gadung dan Pondok Bambu (Laporan Sektor Perumahan 1981/1982: 5 dan 6).
- e. Dengan adanya sistem peruntukan wilayah, terlihat adanya keteraturan dalam menentukan perencanaan perkotaan, khususnya bila dibandingkan dengan keadaan sebelum tahun 1965. Dengan bertambah luasnya wilayah Jakarta dapat juga dilihat bahwa daerah permukiman telah dipusatkan di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, sedangkan daerah Industri lebih ke arah Timur mendekati Bekasi.
- f. Segi-segi fisik dalam perkembangan kota Jakarta sebenarnya dapat disajikan lebih lengkap bila disertakan sejumlah peta yang telah dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta, tetapi karena adanya hambatan teknis dan administratif maka tidak dapat dilampirkan di sini. Ada enam peta yang penting untuk diperhatikan, yaitu Peta no. 1 (Sejarah Perkembangan); Peta no. 2 (Penggunaan Tanah 1965); Peta no. 3 (Rencana Peruntukan Tanah); Peta no. 13 (Rencana Jaringan Jalan); Peta no. 18 (Daerah Banjir) dan Peta no. 19 (Rencana Perairan).

BAB IV

BERBAGAI PERISTIWA DAN TEMPAT PENTING DI JAKARTA 1950-1980

Oleh : G.A. Manilet – Ohorella

1. PERISTIWA-PERISTIWA PENTING

Jakarta sebagai ibukota negara, dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami berbagai kejadian di berbagai sektor kehidupan. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi terutama karena keadaan politik, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik kenegaraan Republik Indonesia.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 kota Jakarta menjadi ajang pertempuran antara pemuda-pemuda kita melawan tentara Jepang dan kemudian sekutu. Para pejuang yang pernah mengecap pendidikan kemiliteran baik sebelum zaman Jepang maupun pada masa Jepang, berusaha keras untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Para pemuda berusaha menjalin kerja sama dengan para pemimpin bangsa untuk mewujudkan suatu pemerintahan negara yang berdaulat penuh.

Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 19 September 1945 para pemuda dan rakyat mengadakan suatu rapat raksasa di lapangan Ikada untuk menunjukkan kepada dunia, keberada-

an bangsa dan negara Indonesia. Kemudian antara tahun 1946 sampai 1949 praktis kota Jakarta tidak lagi menjadi ibukota negara, karena Pemerintahan dan Pimpinan-pemimpin Negara harus pindah ke Yogyakarta karena adanya perjanjian Renville. Baru setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, yang penyelenggaraannya di Jakarta dilakukan dan ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, mewakili Pemerintah Indonesia. Maka sejak itu kota Jakarta memasuki suatu era baru, baik dalam sistem pemerintahan dan pembangunan kota, maupun dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai peristiwa pun terjadi, sejak Jakarta menjadi ibukota negara Republik Indonesia Serikat. (RIS).

Pada tanggal 29 Desember 1949, Ir. Soekarno tiba di Jakarta dari Yogyakarta untuk menjalankan pemerintahan. Akan tetapi di mana-mana rakyat Indonesia tidak menyetujui pembentukan Negara Serikat itu. Oleh sebab itu dilancarkan usaha-usaha untuk kembali ke "Negara Kesatuan". Penggabungan daerah yang satu ke daerah yang lain atau penggabungan beberapa negara bagian menjadi satu, secara konstitusional memang dimungkinkan oleh pasal-pasal dalam konstitusi RIS sendiri; dengan ketentuan bahwa penggabungan itu dikehendaki oleh rakyat dan diatur dengan undang-undang Federal. Hal itu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang baru. Berhubung dengan itu maka pada tanggal 8 Maret 1950 pemerintah RIS yang berkedudukan di Jakarta, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat RIS sendiri, mengeluarkan Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1950, tentang tata cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS.

Setelah melalui berbagai proses perundingan antara negara-negara bagian yang masih berdiri ketika itu; akhirnya dalam rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden RIS Ir. Soekarno membacakan Piagam terbentuknya Negara Kesatuan RI. Dengan demikian sejak tanggal

17 Agustus 1950, Indonesia berbentuk Negara Kesatuan, dengan Jakarta sebagai ibukotanya.

Sejalan dengan itu untuk menyambut kembalinya negara ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Proklamasi yang ke-5, pemerintah dan rakyat Jakarta mengadakan Pasar Malam Kenang-kenangan dari tanggal 17 Agustus sampai 17 September 1950 di Lapangan Gambir. Pasar malam yang meriah di lapangan Gambir ini diisi dengan berbagai macam atraksi dan hiburan serta berbagai dagangan. Mulai dari permainan sulap sampai ke permainan judi; dagangan dari pisang rebus dan goreng sampai ke restoran makanan Cina. Tidak ketinggalan pula berbagai acara seni seperti, lenong, cokek, gambang kromong dan sebagainya.

Dalam kedudukan Jakarta sebagai ibukota/kotapraja Jakarta Raya, pada masa jabatan walikota Suwiryo, antara bulan Maret 1950 sampai dengan Mei 1951, beliau telah berusaha untuk mengembangkan Jakarta sebagai suatu kota "Metropole". Usaha beliau antara lain dengan mengadakan penataan kota Jakarta, membuka hunian-hunian baru dan membuat beberapa peraturan. Pada bulan November 1950, wali kota Soewiryo menerima tamu agung, negarawan India Pandit Jawaharlal. Nehru; penerimaan tamu agung ini tentu menambah wawasan aparat pemerintahan kota, untuk menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan. Akan tetapi dengan adanya perubahan dalam struktur pemerintahan negara; dimana Suwiryo menjabat sebagai wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Sukiman Suwiryo, maka terjadi lowongan jabatan untuk walikota Jakarta Raya. Kekosongan tersebut kemudian diisi oleh Syamsurizal yang menjabat walikota mulai tanggal 29 Juni 1951 (*Karya Jaya* 1977:63).

Pada awal masa jabatan Syamsurizal dimulai pembangunan stadion Nasional IKADA yang dilakukan mulai tanggal 18 Juli 1951. Dalam waktu tiga bulan stadion itu dapat diselesaikan

untuk kepentingan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-2 (PON II) pada bulan Oktober 1951.

Upacara pembukaan PON II tersebut diawali dengan kedatangan bendera PON dari kota Solo (Penyelenggara PON I) melalui rute-rute Solo, Yogya, Magelang, Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor dan masuk ke ibukota negara. Bendera tiba di Balaikota Jakarta pada pukul 16.20 tanggal 20 Oktober 1951. Kemudian pada tanggal 21 Oktober pagi, dengan resmi Pekan Olah Raga Nasional ke II dibuka oleh Presiden Soekarno. Bendera PON dinaikkan dengan hidmat. Setelah itu Mars PON gubahan Ibu Sud diperdengarkan untuk pertama kalinya, menambah semangat dan semaraknya upacara pembukaan PON ke II itu. Anak-anak sekolah membawakan bermacam-macam atraksi, diantaranya Senam Irama dan demonstrasi loncat batu yang unik oleh pemuda-pemuda asal Nias.

Pekan olahraga itu berlangsung dari tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 26 Oktober 1951. Team Jakarta sebagai tuan rumah keluar sebagai juara umum PON II dengan mengan-tongi 23 medali emas, 23 perak dan 18 perunggu (Direktorat Jenderal RTF 1985:9).

Setelah pesta olahraga nasional usai, roda kehidupan kota Jakarta berputar terus secara perlahan, tetapi pasti. Baik sebagai ibukota negara maupun sebagai kotapraja Jakarta Raya. Walaupun dalam masa itu rakyat terpaksa merasa resah karena adanya bermacam peristiwa yang timbul di luar kota sebagai akibat cetusan perasaan tidak puas terhadap situasi politik negara, yaitu masih adanya ekses-ekses dari peristiwa Kartosuwiryo dengan DI/TII nya di Jawa Barat dan pemberontakan RMS di Maluku.

Dalam tumbuh pemerintah pusat sendiri terjadi berbagai kesalah-fahaman politik, terutama antara Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dengan pimpinan TNI Angkatan Darat. Hal tersebut membangkitkan rasa tidak puas di kalangan

tentara dan juga di kalangan masyarakat terhadap DPRS. Terutama karena sebagai anggotanya adalah orang-orang federal yang mewakili negara bagian dalam RIS dan dipandang tidak mempunyai andil dalam Perang Kemerdekaan. Pimpinan TNI Angkatan Darat kemudian memanggil Panglima-Panglima tentara dan teritorium untuk mengadakan suatu pembicaraan mengenai masalah tersebut. Pembicaraan memutuskan untuk mendesak Presiden agar membubarkan Parlemen dan membentuk Parlemen baru. Masalah tersebut melatar-belakangi demonstrasi rakyat menuntut dibubarkannya Parlemen dan pengantiannya dengan parlemen baru. Peristiwa tersebut terkenal dengan "Peristiwa 17 Oktober" tahun 1952 (*Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka* 1975:68).

Dalam peristiwa itu rakyat yang mengadakan demonstrasi bergerak ke gedung DPR di Jalan Dr. Wahidin no. 1 kemudian menuju ke Istana Merdeka di Jalan Merdeka Utara untuk menyampaikan tuntutan tersebut kepada Presiden. Sebagai jawaban atas demonstrasi itu Presiden menolak tuntutan para demonstran dan mengatakan bahwa presiden bukan diktator untuk bertindak sendiri. Masalah pembubaran Parlemen akan dibicarakan dengan pemerintah dan meminta supaya mempercepat pemilihan umum. Di samping itu akan diselidiki pula keinginan rakyat di daerah-daerah di luar Jakarta.

Peristiwa tersebut mempertajam pertentangan-pertentangan yang ada di dalam tubuh TNI AD dan Angkatan Perang pada umumnya. Peristiwa itu pula yang mendorong kolonel A.H. Nasution sebagai KASAD mengajukan permohonan berhenti kepada Pemerintah. Permohonan mana telah terakabulkan dan pada tanggal 19 Desember 1952 dilakukan serah terima jabatan kepada penggantinya Kolonel Bambang Sugeng (*Tiga Puluh Tahun* 1975:68).

Peristiwa 17 Oktober itu tidak saja terjadi di Jakarta, tetapi juga merembes sampai ke luar Jakarta sehingga demonstrasi yang sama, menuntut pembubaran Parlemen terjadi pula di kota

Bandung pada bulan Nopember 1952. Penyelesaian peristiwa itu berjalan berlarut-larut, sehingga baru dapat diselesaikan pada awal tahun 1955, setelah Pimpinan Angkatan Darat mengadakan Rapat Collegial di Yogyakarta. Namun demikian gejala perpecahan di dalam negara mendesak untuk muncul ke "permukaan".

Sementara itu Jakarta sebagai pintu gerbang negara ikut mempersiapkan diri untuk menyambut tamu-tamu peserta Konferensi Asia Afrika yang akan berlangsung di Bandung pada bulan April 1955. Persiapan-persiapan dilakukan sejak bulan Januari 1955 dan pada bulan April 1955 Jakarta tampil sangat mengesankan, sebagai pintu gerbang tuan rumah penyelenggaraan konferensi yang bertaraf internasional. Konferensi berlangsung dari tanggal 18 sampai 25 April yang menelorkan Dasasila Bandung/Deklarasi Bandung yang terkenal itu.

Pada bulan Juli 1955, dengan persetujuan walikota Jakarta Sudiro, diadakan Festival Film Indonesia yang pertama. Sebelum penyelenggaraan festival tersebut, tokoh-tokoh perfilman Indonesia yaitu Haji Djamaluddin Malik dan Haji Umar Ismail mengemukakan gagasan mereka itu kepada walikota Jakarta dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) Dr. Bahder Djohan. Gagasan dan keinginan para tokoh dan artis-artis film tersebut disambut dengan baik. Sehingga penyelenggaraannya berlangsung pada akhir Juli 1955 bertempat di rumah dan halaman kediaman walikota Jakarta Raya Jalan Taman Suropati no. 7 Jakarta (*Karya Jaya* 1977:69).

Setelah penyelenggaraan Festival Film Indonesia, sebuah panitia di bawah pimpinan walikota Jakarta mengadakan persiapan untuk penyelenggaraan Pekan Raya Indonesia, dalam rangka HUT Proklamasi yang ke-10. Sehubungan dengan itu pada tanggal 18 Agustus 1955, warga kota Jakarta menyelenggarakan suatu bazaar amal yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman (sekarang Komplek Rumah Sakit Yayasan Jakarta). Dana yang diperoleh sebagian diperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit itu.

Dalam kedudukan kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara, pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum setelah menjadi program pemerintah dari kabinet satu ke kabinet lainnya. Pendaftaran Pemilu telah dimulai pada bulan Mei 1954. Dan seperti telah diketahui pada tanggal 29 September 1955, diselenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam masa kampanye Pemilihan Umum pertama itu suasana politik di kota Jakarta semakin menjadi-jadi. Puluhan tanda gambar dari partai-partai, dari ukuran kecil sampai yang paling besar tertancap di sudut jalan dan gang di seluruh pelosok kota. Tidak kurang dari 28 partai dan organisasi, bahkan perorangan yang masing-masing mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Pertama itu untuk memperebutkan 275 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat (Hutabarat 1985:17). Walaupun ketika itu sebagian besar rakyat Jakarta dikatakan masih buta huruf, tetapi Pemilihan Umum berjalan dengan lancar, karena semua rakyat menggunakan hak pilihnya dengan anggota ABRI tidak ketinggalan. Pemilihan Umum menghasilkan 272 orang anggota DPR yang pelantikan mereka diadakan pada tanggal 25 Maret 1956 di Istana Negara Jakarta (*Tiga Puluh Tahun* 1975:92).

Sejalan dengan itu pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan pemilihan anggota Konstituante (Sidang pembuat Undang-Undang Dasar). Yang pelantikannya diadakan di Bandung pada tanggal 10 Nopember 1956. Namun sayang sekali Konstituante itu gagal dalam melaksanakan tugasnya. Setelah Pemilihan Umum yang berlangsung juga di daerah-daerah, situasi negara makin menggawat. Jakarta sebagai ibukota dan pusat pemerintahan negara tidak dapat melepaskan diri dari suasana itu. Di daerah-daerah berdiri Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni, Dewan Lambung Mangkurat; yang akhirnya mencapai puncak dengan berdirinya PRRI di Sumatera Tengah dan PERMESTA di Sulawesi Utara. Ketidak stabilan itu terasa sampai menjelang akhir tahun 1957. Apalagi setahun sebelum itu konsep "Dwi Tunggal"

pecah yaitu dengan mundurnya Bung Hatta sebagai Wakil Presiden.

Disebabkan oleh situasi yang demikian itu, dalam bulan Maret 1957 diadakan *Konperensi Panglima-Panglima Tentara dan Territorium Seluruh Indonesia* di Jakarta untuk menyelesaikan masalah antara Pusat dan daerah secara *Musyawarah Nasional* yang mengumpulkan semua pemimpin dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat untuk membahas soal yang sama. Terakhir diselenggarakan *Musyawarah Nasional Pembangunan* pada bulan Nopember 1957. Semua kegiatan pertemuan tersebut dalam upaya memulihkan gejala perpecahan yang makin terlihat di dalam negara, termasuk pengunduran Bung Hatta dari jabatan Wakil Presiden.

Bersamaan dengan kejadian-kejadian di atas, pada tanggal 30 Nopember 1957, terjadi suatu usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang dikenal sebagai "Peristiwa Cikini". Peristiwa itu terjadi ketika Presiden Soekarno menghadiri suatu pesta sekolah yang diselenggarakan Yayasan Perguruan Cikini, dimana putra-putri beliau bersekolah di sana. Percobaan pembunuhan dilakukan dengan menggunakan granat tangan, sehingga menimbulkan banyak korban. Dan yang paling banyak adalah anak-anak sekolah yang ketika itu berada di halaman sekolah. Presiden Soekarno sendiri terhindar dari percobaan pembunuhan itu. Para pelaku Peristiwa Cikini kemudian ditangkap dan diajukan ke depan pengadilan. Mereka terdiri dari 4 orang pemuda yaitu Sa'idon bin Muhammad, Tasrif bin Husein, Yusuf Ismail dan Moh. Tasin bin Abubakar. Keempat terdakwa itu dijatuhi hukuman mati (*Tiga Puluh Tahun*, 1980:120).

Sayang sekali semua kejadian yang dibeberkan di atas justru terjadi setelah Pemilihan Umum I yang oleh pengamat politik dinilai "berlangsung dengan baik" dan diterima dengan hati yang ikhlas oleh para kontestan (Hutabarat 1985:18).

Sementara itu konstituante yang sejak pelantikan anggota-anggotanya di Bandung pada bulan Nopember 1956 dan badan

itu mulai bersidang setahun kemudian pada bulan Nopember 1957, tidak menghasilkan apa-apa. Konstituante telah gagal untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebaliknya timbul berbagai masalah dalam negara, yang meliputi bidang-bidang poliitik, ekonomi, sosial dan budaya yang kesemuanya itu justru membias dari Jakarta ke seluruh pelosok tanah air.

Sehubungan dengan itulah, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli tersebut didukung secara aklamasi oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di kota Jakarta. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya perintah harian oleh Kepala Staf Angkatan Darat, kepada seluruh anggota TNI-AD untuk mengamankan Dekrit tersebut (*Tiga Puluh Tahun* 1975:142). Massa rakyat di Jakarta berbondong-bondong menuju halaman Istana Merdeka untuk mendengarkan penetapan Presiden kembali ke UUD 1945.

Selama dasawarsa pertama kembalinya negara ke bentuk negara kesatuan, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi karena situasi negara, boleh dikatakan sebagian merupakan huru-hara. Hal itu disebabkan oleh jalannya pemerintahan yang belum stabil. Namun bersamaan dengan itu terjadi pula peristiwa-peristiwa lain, berskala nasional maupun internasional yang berdampak positif bagi kota Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota, dan sebagai kota pusat pemerintahan negara.

Peristiwa-peristiwa yang telah disebut sebelumnya seper-ti; Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-2 pada bulan Oktober 1951. PON mana merupakan tonggak estafet dari PON I tanggal 9 September 1949 di Solo. Yang kini dalam masa Pembangunan ini dicanangkan menjadi Hari Olahraga Nasional. Kemudian pada bulan April 1955, Jakarta sebagai ibukota negara RI menerima tamu-tamu dari negara-negara Asia Afrika sehubungan Konperensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung dan yang bertingkat Internasional.

Masih dalam kontek internasional; seperti kita ketahui sejak pengakuan Kedaulatan Negara kita oleh Pemerintah Belanda, Irian Barat masih merupakan masalah antara kedua negara. Sehubungan dengan masalah itulah maka di Jakarta pada tanggal 18 Nopember 1957 diadakan suatu rapat umum untuk menggalakkan usaha pembebasan Irian Barat. Rapat itu diselenggarakan di lapangan Banteng (Sekitar Tugu Pembebasan Irian Barat sekarang) dengan pembicara utama Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Pada kesempatan itu Pak Sudiro selaku walikota Jakarta dan ketua panitia penyelenggara rapat, membentuk suatu wadah dengan nama "Dana Perjuangan Irian Barat" DAPIB (*Karya Jaya* 1977:135). Peristiwa itu merupakan awal Gerakan Pembebasan Irian Barat oleh rakyat Indonesia sebelum dicetuskan Tri Komando Rakyat. Timbulnya gerakan itu berhubung usaha-usaha melalui meja perundingan secara bilateral antara kedua Pemerintah tidak membawa hasil. Maka sejak tahun 1953 Perjuangan Pembebasan Irian Barat itu dilakukan melalui forum-forum internasional. Terutama dalam sidang-sidang PBB dan forum solidaritas negara-negara Asia Afrika. Usaha-usaha dalam bidang diplomasi itupun tidak membawa hasil, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan antara kedua negara bahkan membatalkan keputusan-keputusan KMB. Di mana-mana di Indonesia rakyat melancarkan aksi protes terhadap Belanda. Dalam hal ini rakyat kota Jakarta lebih cepat bertindak. Pada bulan Desember 1957, rakyat berdemonstrasi mengambil alih beberapa gedung kantor milik Pemerintah Belanda, seperti gedung Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. yang sekarang menjadi Bank Dagang Negara, Percetakan De Unie, Perusahaan Phillips dan KLM. Juga Bank Escompto yang diambil alih pada tanggal 9 Desember 1957.

Kalau pada tahun 1951 Jakarta telah menyelenggarakan PON II, maka dalam tahun 1958 kembali Jakarta mencatat sejarah dalam bidang olahraga yang bertaraf internasional. Pada bulan Juni 1958 Regu Bulutangkis Indonesia diberangkat-

kan dari Jakarta untuk memperebutkan piala Thomas di Singapura. Regu Bulutangkis itu berhasil merebut piala Thomas, lambang supremasi bulutangkis sedunia dan memboyongnya ke Jakarta.

Demikian gambaran peristiwa yang terjadi di kota Jakarta selama masa 10 tahun pertama semenjak menjadi Ibukota negara RIS sampai dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di samping peristiwa-peristiwa itu, Jakarta telah pula mencatat kedatangan kepala-kepala Negara terutama dari Negara-Negara Asia Afrika dan negara-negara non-Block; yang dimulai dengan kedatangan Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru. Kemudian beberapa kepala negara lain dan menteri-menterinya. Dan terakhir, kedatangan Para Menteri negara-negara yang tergabung dalam Colombo Plan Consultative Committee yang mengadakan Konferensi Rencana Colombo di Yogyakarta pada bulan November 1959.

Bersamaan dengan berbagai peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi sejak tahun 1950 itu, kota Jakarta juga selalu ramai dengan diselenggarakannya upacara-upacara nasional seperti hari-hari besar nasional, hari-hari bersejarah, hari-hari besar keagamaan dan lain-lain.

Menjelang tahun 1960 kota Jakarta semakin dewasa dalam bentuk maupun gerak langkahnya. Dalam tahun 1960 berturut-turut dari bulan Januari — Februari, September dan Desember kota Jakarta sebagai ibukota negara kembali menerima tamu-tamu; kepala-kepala negara dari Singapura, Muangthai, Rusia (Sovyet), Afrika, Pakistan, dan lain-lain.

Seiring dengan itu pada tanggal 1 Januari 1961 Presiden Soekarno meresmikan dimulainya Pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama tahun 1961—1969. Upacara peresmian ditandai dengan pencangkulan tanah di Jalan Pegangsaan Timur 56, untuk membangun Gedung Pola. Sayang sekali dengan pembangunan gedung ini, harus mengor-

bankan gedung Proklamasi, Gedung mana mempunyai arti penting dalam sejarah.

Pada waktu yang bersamaan dimulai perencanaan dan pembangunan berbagai proyek bidang industri dan prasarana di seluruh Indonesia. Dimana dititik beratkan pada pembangunan industri berat dan industri kimia dasar (*Tiga Puluh Tahun* 1975:179).

Menjelang Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 1961, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1961, semua kegiatan kepanduan di Indonesia dilebur menjadi *Pramuka* (Praja Muda Karana), sekaligus dilantik Ketua Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka yang dipercayakan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tanggal 14 Agustus kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Gerakan Pramuka. Sejalan dengan itu pada tanggal 17 Agustus 1961 dimulainya pembangunan Tugu Nasional dengan pemancangan tiang pertama oleh Presiden Soekarno. Tugu tersebut kemudian dijadikan lambang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan dimanfaatkan sebagai Museum Sejarah Nasional sejak tahun 1966.

Dalam tahun 1962, kota Jakarta kembali mencatat lebaran Sejarah olahraga internasional. Dengan diselenggarakan Asian Games IV pada tanggal 24 Agustus 1962. Pesta olahraga Asia itu bukan saja dinikmati oleh para penonton di gelanggang olahraga Senayan tempat diselenggarakan Asian Games itu; melainkan rakyat Jakarta dan sekitarnya juga telah didekatkan pada acara-acara yang berlangsung di sana. Radio Republik Indonesia ikut menyiarkan pertandingan-pertandingan yang berlangsung dari Gelanggang Olahraga kepada rakyat. Bersamaan dengan itu suatu tonggak baru pun tercatat bagi *sejarah Televisi* di Jakarta dan Indonesia umumnya. Dalam rangka penyelenggaraan Asian Games itulah R. Maladi, R.M. Sutarto dan Ir. Roosseno menunjukkan dedikasinya dalam pembangunan Stasiun Televisi. Dimana pada tanggal 24 Agustus 1962 Televisi

Republik Indonesia mulai mengudara ketika meliput pembukaan AG yang dikumandangkan Presiden Soekarno. Dengan radius jangkauan sejauh 110 km, dan pesawat penerima di Jakarta dan sekitarnya sebanyak 10.000 buah, TVRI mendekatkan rakyat Jakarta dan sekitarnya kepada kegiatan-kegiatan olahraga yang sedang berlangsung di Stadion Senayan. Para penonton televisi ikut merasakan hangatnya sambutan penonton di stadion, menyambut kemenangan Sarengat di cabang atletik, Tan Yoe Hock di cabang bulutangkis dan Lanny Gumulya yang dikatakan melayang bagaikan burung camar dari papan loncat ke kolam renang (*Bola* 1986:6). Dengan motto *Ever Onward*, AG IV diselenggarakan dari tanggal 24 Agustus sampai tanggal 4 September. Tim Indonesia berhasil meraih kedudukan di urutan kedua sesudah Jepang.

Dalam Asian Games ini Indonesia memboikot/menolak keikutsertaan negara Israel dan Taiwan. Hal itu menyebabkan Komite Olimpiade Internasional mengadakan protes terhadap Indonesia. Dan sebagai jawaban Indonesia ke luar dari organisasi tersebut. Kemudian Indonesia berusaha mengalihkan kegiatan olahraga internasionalnya ke dalam "Games of the New Emerging Forces (Ganefo) yaitu pertandingan olahraga antar bangsa-bangsa tertindas dan menentang Imperialisme dan neo-kolonialisme (*Tiga Puluh Tahun* 1975:260). Ganefo diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 10 sampai 22 Nopember 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 48 negara.

Sementara berbagai kegiatan kenegaraan berjalan, keadaan ekonomi mulai merosot dan terus merosot. Sampai tahun 1963 keadaan itu belum dapat ditanggulangi, bahkan dikatakan makin merosot. Bahan-bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari serta barang-barang lainnya yang dibutuhkan untuk berbagai kegiatan ekonomi mulai sulit didapat. Harga-harga terus membumbung tinggi sehingga rakyat harus antri untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Hal itu mendorong Presiden Soekarno untuk menyampaikan pidato berjudul: "Deklarasi

Ekonomi" (DEKON) pada tanggal 28 Maret 1963. Pidato mana, oleh MPRS dalam sidang umumnya yang kedua ditetapkan menjadi Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Pembangunan Bidang Ekonomi (*Sejarah Nasional Indonesia VI*³ 1982/1983: 300).

Memang sejak tahun 1960 situasi ekonomi yang agak sulit dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Sampai tahun 1963, mereka mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapat tempat di dalam kabinet dan berusaha untuk menciptakan semacam aliansi dengan Presiden Soekarno. Kemudian berbagai situasi diciptakan oleh PKI, dan menyusutkan TNI-AD sebagai pihak yang cenderung menentang ide-ide Presiden. Sementara PKI sendiri berusaha merapatkan diri pada Presiden. Pada bulan Mei 1965 diadakan upacara besar-besaran, merayakan Hari Ulang Tahun PKI di Gelanggang Olahraga Senayan. Kemudian sejalan dengan itu diadakan Pendidikan Kilat Kader Nasakom. Dalam hubungan itu beberapa perwira Angkatan Perang berhasil digarap untuk bersimpati pada perjuangan PKI. Dan setelah perayaan Hari Ulang Tahun RI yang ke-20. Suasana kota Jakarta semakin mencekam.

Partai Komunis Indonesia telah mempersiapkan rencana besarnya yang kemudian pada tanggal 30 September 1965, terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan dan memalukan dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa biadab yang membawa korban 7 Pahlawan Revolusi sangat menggores kalbu rakyat Indonesia. Akan tetapi keadaan yang sangat penting itu dapat ditanggulangi pada tanggal 1 Oktober oleh Tentara Nasional Indonesia di bawah pimpinan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Rakyat dan ABRI di Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya bahu membahu menumpas gerakan yang dinamakan Gerak 30 September itu. Keberhasilan yang dicapai seluruh rakyat membuktikan akan kemampuan dasar negara kita Pancasila, yang hingga kini selalu kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Walaupun selama bulan Okto-

ber itu kota Jakarta dan negara umumnya dalam keadaan ber-
kabung, karena gugurnya ke-7 Pahlawan di Jakarta dan 2 (dua)
orang lainnya di Jawa Tengah.

Dalam usaha menumpas Gerakan 30 September PKI, massa mahasiswa di Jakarta memegang peranan sangat besar. Mahasiswa mengadakan aksi terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah sebelumnya (orde lama). Aksi-aksi merupakan gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI, makin lama semakin keras dan bertambah luas. Bukan saja di Jakarta tetapi meluas ke kota-kota di mana terdapat pusat kegiatan mahasiswa. Situasi makin bertambah ramai lagi dengan munculnya perasaan tidak puas terhadap keadaan ekonomi negara yang semakin merosot. Keadaan itu akhirnya mencapai puncak dengan aksi TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat). Di bawah pimpinan KAMI dan KAPI pada tanggal 12 Januari 1966, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila menuju halaman Kantor DPRGR mengajukan tiga buah tuntutan.

Aksi-aksi mahasiswa yang terus meningkat dan cenderung ditujukan pada Presiden Soekarno dijawab dengan dibubarkannya KAMI oleh Presiden pada tanggal 26 Februari 1966. Lebih jauh dari itu pada tanggal 3 Maret 1966, Universitas Indonesia ditutup. Hal itu telah mengundang aksi-aksi yang makin menghebat dari mahasiswa dalam perjuangan Tritura tersebut. Dalam perjuangan itu gugur mahasiswa Arief Rachman Hakim sebagai Pahlawan Ampera, dan beberapa mahasiswa dan pelajar-pelajar lain yang ikut bergerak dalam kelompok masing-masing seperti Ichwan Ridwan Rais, Yulius dan Muhammad Qomar.

Dalam tahun 1966-1967, Pemerintah Orde Baru mulai membenahi negara, sementara di kota Jakarta masih terjadi insiden-insiden kecil yang dilancarkan oleh mahasiswa dalam rangka pembersihan sisa-sisa G.30.S/PKI.

Pada awal tahun 1967 tepatnya tanggal 30 Januari 1967 mahasiswa Jakarta mengadakan apel siaga di depan gedung DPRGR untuk menyatakan penolakan mereka terhadap peleng-

kap Nawaksara yaitu pidato pertanggung-jawaban dari Presiden Soekarno. Kemudian pada akhir tahun tersebut yaitu pada bulan Desember 1967 kembali mahasiswa turun ke jalan-jalan menuntut penurunan harga-harga di samping menuntut pembersihan terhadap sisa-sisa Orde Lama.

Memang di akhir tahun 1967 itu terjadi gangguan terhadap stabilitas ekonomi yang baru saja diusahakan perbaikannya oleh pemerintah Orde Baru. Hal itu disebabkan oleh melonjaknya harga-harga dan inflasi yang terus melaju di samping panen yang tidak berhasil. Untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi nasional itulah maka pemerintah Orde Baru makin memantapkan programnya dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mulai dicanangkan pada tanggal 1 April 1968, dan dimulai pelaksanaannya pada tanggal 1 April 1969.

Setelah Program Pemerintah Orde Baru mulai berjalan dengan baik, diadakan Pemilihan Umum pertama tahun 1971 di bawah UUD 1945, yang merupakan Pemilihan Umum kedua bagi negara Indonesia. Pemilihan Umum tersebut diikuti oleh 10 kontestan terdiri dari 9 partai politik dan golongan karya. Dalam Pemilu ini anggota ABRI tidak menggunakan hak pilihnya seperti pada Pemilu tahun 1955.

Pada tanggal 24 Maret 1973 berdasarkan ketetapan MPR Nomor IX/MPRS/1973, dilakukan pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden.

Jakarta sebagai ibukota negara, kota Proklamasi, kota wisata dan kota pendidikan, dari saat ke saat makin memantapkan diri menuju kota metropole.

Sehubungan dengan itu pada tanggal 16 April 1973 diselenggarakan Jambore Nasional Pramuka di Danau Situ Baru, di perbatasan Jakarta dan Jawa Barat. Jambore diikuti pula oleh utusan-utusan dari negara lain seperti Australia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Philipina dan Pakistan. Inilah Jambore

kepanduan pertama setelah perkumpulan pandu-pandu di Indonesia dilebur menjadi Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Dalam tahun 1973 berturut-turut beberapa kejadian penting yang membawa nama baik Jakarta di forum internasional. Pada tanggal 16 Juli 1973 diselenggarakan Konferensi Law Asia ke III atau The Law Association for Asia and the Western Pasific, yang diikuti oleh kurang lebih 1000 ahli hukum dari 20 negara Asia dan Pasifik Barat (*Sejarah Nasional Indonesia VI*³ 1982/1983:479).

Pada tanggal 23 Juli 1973 terbentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia, dalam suatu kongres pemuda seluruh Indonesia sebagai Forum Komunikasi tingkat nasional antara generasi muda. Sebagai ketuanya diangkat David Napitupulu. Salah seorang eksponen angkatan '66.

Setelah masa demonstrasi mahasiswa mulai surut nampaknya keadaan ekonomi rakyat terutama di kota Jakarta mulai membaik, sehingga pemasukan barang-barang luar negeri makin banyak mengalir ke Jakarta, terutama dari Jepang. Namun pada awal tahun 1974, yaitu di tanggal 15 Januari dan 16 Januari terjadi lagi demonstrasi-demonstrasi dan kerusuhan massal, yang merupakan kelanjutan atas ekkses-ekkses dari pada aksi mahasiswa yang berlangsung beberapa waktu sebelumnya. Kerusuhan yang terjadi bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia, sehingga demonstrasi itu beralih para pengrusakan atas barang-barang asal Jepang.

Sebelum terjadi peristiwa itu, pada tanggal 11 Januari 1974 presiden menerima anggota pimpinan Dewan Mahasiswa dari 35 Perguruan Tinggi di Indonesia dan mengadakan dialog langsung mengenai situasi dan berbagai masalah nasional. Dalam kesempatan itu para mahasiswa menyampaikan dua buah deklarasi yang pada pokoknya berisi tuntutan agar pemerintah melaksanakan pola pembangunan yang berorientasi kepada keadilan sosial dan kemakmuran rakyat banyak (*Tiga Puluh Tahun* 1980:28).

Dialog dengan Presiden itu merupakan rangkaian aksi-aksi yang dilancarkan para mahasiswa itu sebelumnya, serta aksi penyampaian petisi kepada berbagai instansi pemerintah dan asing (*Tiga Puluh Tahun* 1975:32).

Rangkaian aksi/demonstrasi mahasiswa itu mencapai puncaknya pada tanggal 15 Januari. Berkat tindakan cepat dari para alat negara keriuhan-keriuhan dapat diatasi dengan cepat. Peristiwa tersebut terkenal dengan peristiwa *Malari*, dengan tokoh-tokoh yang bertanggung jawab antara lain: Hariman Si-regar, Drs. Syahrir dan Mohammad Awi Cholid.

Masa Pembangunan Lima Tahun Pertama yang berlangsung mulai tanggal 1 April 1969 sampai April 1974, kemudian Pembangunan Lima Tahun Kedua dari April 1974 sampai April 1979 telah membawa perubahan yang sangat besar bagi kota Jakarta dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Suasana politik semakin stabil dengan adanya peningkatan fungsi ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator. Kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam bidang politik makin berkurang, sedang peningkatan volume perkuliahan makin ditambah; sehingga mutu pendidikan lebih dipertanggung jawabkan.

Sarana komunikasi dan transportasi semakin meningkat. Dengan adanya proyek-proyek baru dapat menarik banyak tenaga kerja. Baik dari Jakarta sendiri maupun dari luar kota Jakarta, sehingga dengan demikian rakyat yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan apa-apa kini dapat bernafas agak lega dengan adanya perubahan keadaan ekonominya. Hal itu berarti, kemakmuran rakyat yang diperjuangkan mahasiswa dan rakyat melalui aksi-aksi diawal masa orde baru itu sedikit demi sedikit mulai terwujud. Bidang kebudayaanpun semakin meningkat dan berkembang dengan dibangunnya pusat-pusat Kesenian dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan perkembangan negara, maka Jakarta sebagai ibukota RI mencatat sederetan kunjungan tamu-tamu negara, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan poleksosbud

dimata dunia internasional. Pada tahun 1974 itu berturut-turut telah berkunjung ke Indonesia dan Pemerintah kota Jakarta.

1. Ratu Elizabeth II dan Duke of Eidenburg dari Inggris, mulai tanggal 18 sampai tanggal 22 Maret 1974.
2. Raja Belgia Boudewijn bersama Ratu Fabiola mulai tanggal 21 Oktober sampai 2 Nopember 1974.
3. Shah Iran Mohammad Reza Pahlevi dan Permaisuri Ratu Farah Diba dari tanggal 1 sampai 2 Nopember 1974.

Bersamaan dengan itu pada tahun 1974, yang merupakan tahun terakhir Pelita Pertama dan awal mulainya Pelita Kedua, telah diselenggarakan berbagai Pertemuan Ilmiah dalam rangka peningkatan pembangunan di semua sektor.

Pada bulan April, mulai dari tanggal 1 sampai dengan 4 April 1974, telah diselenggarakan Konperensi PATA (Pasific Area Travel Association) ke-23 di kota Jakarta. Konperensi mana dihadiri oleh wakil-wakil dari 39 negara yang bergerak dalam bidang kepariwisataan. Konperensi ini adalah konperensi ke-2 yang diadakan di Indonesia. Konperensi pertama diadakan pada tahun 1963 di kota Jakarta juga.

Dalam menyongsong Pelita kedua 1974-1979 telah diadakan pula berbagai pertemuan Lokakarya/Widyakarya dan seminar-seminar ilmiah, untuk membahas bermacam-macam program pembangunan yang akan dijalani/dikerjakan dalam Pelita kedua tersebut dan pelita-pelita selanjutnya. Pertemuan-pertemuan ilmiah yang diselenggarakan antara lain:

- (1) Lokakarya Organisasi dan Komunikasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dari tanggal 2 sampai 4 Pebruari 1978.
- (2) Lokakarya Peningkatan Minat Baca Masyarakat Pedesaan dan Peningkatan Mutu Buku Bacaan, mulai tanggal 14 sampai 16 Juni 1978.
- (3) Lokakarya Nasional Riset dan Teknologi ke-I, mulai tanggal 24 sampai 27 Juli 1978.
- (4) Seminar Pengembangan Sistem Kepustakaan Agama diselenggarakan dari tanggal 24 sampai 28 Juli 1978.

- (5) Pertemuan Kerja Anggota Sistem Jaringan Kepustakaan Dokumentasi dan Informasi, pada tanggal 26 sampai 28 September 1978.
- (6) Lokakarya Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi, Sub Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti Depdikbud, dari tanggal 30 Oktober sampai 1 November 1978.
- (7) Lokakarya Pengolahan Informasi untuk Tenaga Spesialis Ahli Peneliti, Bidang minyak dan energi diselenggarakan dari tanggal 22 sampai 23 Januari 1979.
- (8) Rapat Kerja Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Teknologi Tepat Guna, mulai tanggal 24 sampai 25 Januari 1979.
- (9) Seminar On Engineering Information Needs, dari tanggal 12 sampai 14 November 1979.
- (10) Diskusi Mengenai Masalah Pembuka Sediaan Arsip dari tanggal 14 sampai 15 Desember 1979.
- (11) Widyakarya Peneliti Kebijaksanaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mulai tanggal 4 sampai 9 Pebruari 1980.
- (12) Seminar Informasi dan Teknologi untuk Menunjang Pembangunan pada tanggal 23 April 1980.
- (13) Lokakarya Nasional Riset dan Teknologi ke-II yang diselenggarakan pada tanggal 23-27 Juni 1980 (*PDIN LIPI* 1983:1-151).

Sejalan dengan makin mantapnya Pemerintahan Orde Baru dan makin mapan pula konstitusi negara, maka pada bulan Mei 1977 berlangsung Pemilihan Umum ketiga dengan aman dan tertib. Pembangunan Lima Tahun kedua pun berjalan dengan baik, yang berakhir pada tahun 1979 dan diteruskan dengan Pelita ke-III tahun 1979-1984.

Seiring dengan pembangunan negara yang terus berjalan, Pemerintah juga berusaha untuk membentuk masyarakat Indonesia menjadi manusia Indonesia yang Pancasila yang dapat melindungi negaranya sendiri. Untuk itu maka Jakarta sebagai

pusat pemerintahan menyelenggarakan *penataran-penataran P4*. Sehubungan dengan program Pemerintah tersebut penataran-penataran P4 itu mulai diselenggarakan pada tahun 1978.

Penataran mana dikelompok-kelompokkan, mulai dari penataran untuk calon penatar nasional yang berkedudukan sebagai *manggala*: yaitu mereka yang ditetapkan sebagai penatar tertinggi pada tingkat nasional. Kemudian penataran-penataran Tingkat Pusat yang akan menatar pada instansi-instansi tingkat pusat. Mereka ini diambil dari instansi-instansi pemerintah dimana mereka itu berasal, untuk menatar para pegawai yang golongannya lebih rendah.

Untuk program nasional ini maka di Jakarta dibangun suatu Badan pusat untuk mengkoordinir seluruh kegiatan secara menyeluruh. Badan tersebut terkenal dengan B.P. 7. yang bertempat di Jalan Pejambon No. 2 Jakarta. BP7 inilah yang menyelenggarakan penataran P4 pada tingkat yang paling tinggi, dan ditujukan pada seluruh Organisasi masa di seluruh Indonesia.

2. FASILITAS REKREASI DAN PENDIDIKAN MASSA

Rekreasi dan Pendidikan Masa adalah sarana yang sangat penting dan sangat diperlukan oleh kota Jakarta sebagai ibukota negara di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sini tak dapat dipisahkan dari kegiatan nasional, regional maupun internasional. Hal itu sehubungan dengan kedudukan, fungsi dan perannya sebagai pusat pemerintahan kota revolusi, kota industri, kota perdagangan, kota pariwisata, kota budaya dan kota pendidikan, serta lain-lain atribut yang disandangnya. Dengan sendirinya kota ini selain mempunyai potensi dan prospek di masa datang juga mempunyai berbagai permasalahan dan tantangan yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Salah satu masalah umum yang timbul adalah pertambahan penduduk dan gangguan yang ditimbulkan terhadap perimbang-

an fasilitas yang tersedia terutama fasilitas-fasilitas rekreasi yang dapat dimanfaatkan pula sebagai tempat-tempat pendidikan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Masalah-masalah tersebut akan dicoba untuk dikemukakan.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 kemudian dalam tahun-tahun survive sampai tahun 1950 kota Jakarta masih diwarnai oleh sisa-sisa kolonial. Fasilitas-fasilitas rekreasi yang ada, seakan-akan disediakan dan hanya dapat dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu. Sedang masyarakat atau rakyat biasa jarang sekali dapat menikmatinya. Hal itu mungkin karena masih terbatasnya tempat dan fasilitas rekreasi, dan ditambah pula keadaan ekonomi rakyat yang tidak memadai. Barulah setelah tahun 1950 dimana jumlah penduduk makin bertambah dan Jakarta berkembang sebagai kota industri dan perdagangan maka fasilitas rekreasi mulai diadakan. Keadaan itu pula telah memberi harapan pada penduduk yang bertempat tinggal di pinggiran kota Jakarta bahkan dari desa-desa yang agak jauh untuk mencari lapangan pekerjaan baru di "pusat" keramaian kota.

Berhubung dengan itu maka suatu perencanaan pengembangan kota yang dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan teratur dirasakan sangat perlu. Oleh sebab itu Pemerintah kota Jakarta menyeru kepada penduduk agar bekerja bahu-membahu bersama pemerintah untuk membangun kotanya supaya dapat benar-benar menjadi suatu medan hidup yang aman dan tenteram bagi semua lapisan masyarakat (Surjomihardjo 1977a: 39; *Karya Jaya* 1977:63).

Ajakan tersebut ternyata dapat diterima oleh masyarakat. Akan tetapi untuk pembangunan gedung-gedung prasarana dan sarana lainnya diperlukan adanya tanah-tanah kosong. Maka hal itu dimusyawarahkan dan telah disepakati dengan jalan membebaskan atau membeli tanah-tanah dimaksud dari tuan-tuan tanah. Kemudian perencanaan pembangunan pun mulai dipersiapkan. Akan tetapi pembangunan berjalan agak ter-

sendat-sendat, berhubung suatu "*rencana induk pembangunan kota*" belum diwujudkan, disamping adanya dualisme dalam pembangunan di Ibukota. Yaitu antara Pemerintah Kotapraja Jakarta dan Pemerintah pusat (*Karya Jaya* 1977:91-2).

Pada tahun 1950-1955, mulai dibangun lingkungan bangunan di daerah Sentiong Besar Wetan, Petojo Centrum, Komplek Tanjung Karang, Kebon Sereh Jatinegara, Slipi, Jembatan Duren dan Sentiong Besar (Surjomihardjo 1977a:39). Bersamaan dengan itu pengembangan kota ke arah selatan juga dilaksanakan, yaitu dengan dibangunnya Kebayoran Baru sebagai kota Satelit.

Sejalan dengan pembangunan di dalam kota itulah, muncul juga gagasan-gagasan untuk mengadakan fasilitas-fasilitas rekreasi kepada penduduk kota yang makin beraneka ragam kesukuan dan kebangsaan. Sebelum tahun 1950 tempat-tempat rekreasi yang sudah ada seperti Ancol, Decapark, Taman Fromberg, Hotel des Indes dan lain-lain merupakan tempat melepaskan lelah bagi pegawai-pegawai Belanda saja yang bekerja selama seminggu (enam hari). Memang ada pula orang Indonesia yang bekerja sebagai pegawai tinggi dalam pemerintah Belanda yang ikut menikmati rekreasi tersebut. Namun jumlah mereka hanya beberapa saja dibandingkan dengan pegawai-pegawai Belanda dan keluarganya. Tempat-tempat rekreasi tersebut di atas kemudian dikembangkan dan diperbanyak sesuai dengan perkembangan penduduk dan kota Jakarta.

Untuk dapat mengetahui latar belakang pendirian tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas rekreasi tersebut dan pengembangannya, maka dalam sub bagian ini akan membicarakannya secara sepintas.

2.1 Ancol

Muara Ancol atau Pantai Ancol telah terkenal sejak dahulu karena keadaannya yang telah tersedia secara alamiah. Tepat berhadapan dengan muara agak jauh ke laut, terdapat suatu

petiraman yang kaya raya. Di sebelah kanannya terdapat sebuah restoran besar terkenal dengan nama *Slingerland* yang sangat terkenal dalam sejarah Betawi (1650–1800) sebagai tempat elite Belanda berangin-angin makan tiram dan berta-masya (Ali 1964:49).

Pada tahun 1950-an sebagian besar daerah Ancol ini dikuasai rakyat. Kemudian dalam tahun 1960-an mulai dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan tempat rekreasi bagi rakyat, menggantikan tempat rekreasi lama di Cilincing. Sesudah tahun 1966 setelah masa Orde Baru, Ancol berkembang sebagai sarana rekreasi yang dapat dijangkau oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Dengan diciptakannya Ancol sebagai Taman Impian Jaya Ancol, terasa Pemerintah Daerah telah menyediakan fasilitas rekreasi yang sangat memadai bagi warga kotanya.

Selain lokasinya yang strategis dan alamiah Taman Impian Jaya Ancol tidak hanya dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pentas untuk penyelenggaraan kesenian bagi masyarakat, tetapi juga fasilitas-fasilitas hiburan yang lain seperti: kolam renang, kolam arus, akuarium, tontonan pesut dan lumba-lumba, tempat bermain anak, hotel-hotel dan cottage, tempat berlibur keluarga dan lain-lain. Di dalam taman, terdapat pula berbagai jenis fauna dan flora, yang kesemuanya itu di samping sebagai hiburan, juga berfungsi sebagai alat pendidikan.

Pasar seni, menampilkan berbagai karya seni yang tinggi mutunya dapat menarik para wisatawan asing maupun domestik untuk berkunjung ke sana. Sebuah teater yang mempertunjukkan film-film nasional dan asing dalam ukuran besar, yaitu teater mobil, dan berbagai fasilitas rekreasi laut seperti perahu, kapal motor, speed boat dan lain-lain menambah semaraknya taman rekreasi ini.

Dari tahun ke tahun memang pengunjungnya semakin banyak sehingga areal rekreasinya pun harus ditambah, dan saranya terus dikembangkan. Namun dibalik itu berbagai proble-

ma pun timbul. Berbagai kejahatan terjadi di tempat-tempat rekreasi seperti ini. Tindakan kriminal, prostitusi, pengedaran obat-obat terlarang, perjudian dan sebagainya, yang semua itu memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh dari pengelola taman rekreasi sendiri dan pemerintah kota Jakarta, khususnya aparat keamanan.

2.2 Kebon Binatang

Dahulu Kebon Binatang berada di daerah Cikini, yaitu sekitar Jalan Kebon Binatang, Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya dan Jalan Raden Saleh.

Pada tahun 1960-an timbul suatu gagasan dari Kepala DKI Jakarta Sumarno dan Wakil Kepala Daerah Hengki Ngantung untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Komplek rekreasi dan Budaya di Ragunan, Pasar Minggu, di Komplek Kebun Binatang sekarang. Akan tetapi karena belum adanya suatu kepastian tentang rencana tersebut maka, hal tersebut terkatung-katung. Bersamaan dengan itu, pembangunan proyek planetarium akan segera didirikan di atas tanah kebun binatang Cikini (*Karya Jaya* 1977:121).

Dengan demikian kebun binatang segera dipindahkan, ke Ragunan, lokasi yang sebelumnya ditentukan untuk pembangunan "Taman rekreasi dan budaya". Lokasi tersebut kemudian terkenal sebagai Taman Marga Satwa, yang merupakan salah satu fasilitas rekreasi bagi kota Jakarta, terutama anak-anak.

Sejak mulai dibuka, Taman Margasatwa Ragunan terus ditingkatkan volumenya, bermacam jenis satwa dalam dan luar negeri terus didatangkan kesana untuk memperkaya hasanah fauna di Jakarta dan Indonesia umumnya, disamping memberi pengetahuan pada masyarakat terutama anak-anak tentang dunia margasatwa, di kebun binatang Ragunan ini dikembangkan binatang-binatang yang sudah mulai langka seperti, komodo, dan beberapa jenis monyet yang berasal dari Indonesia.

2.3 Taman Ismail Marzuki

Taman Ismail Marzuki yang terkenal sebagai TIM, terletak di Jalan Cikini Raya No. 73, Taman ini terletak di bekas lokasi Kebon binatang dahulu, memanjang dari Jalan Cikini Raya sampai tepi sungai Ciliwung di sebelah timurnya.

Taman kesenian ini memakai nama Almarhum Ismail Marzuki, seorang komponis Indonesia asal Jakarta, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya telah menciptakan lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu ciptaan Ismail Marzuki, kecuali telah memperkaya khasanah musik Indonesia, juga telah memberi inspirasi dan semangat kepada bangsa Indonesia pada masa perjuangan mempertahankan tanah air. Taman ini diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1969 oleh Gubernur DKI Ali Sadikin.

Di taman ini berpusat berbagai kegiatan kesenian baik kesenian tradisional maupun kesenian kontemporer, kesenian daerah dan kesenian asing. Seni yang ditampilkan di sana meliputi berbagai jenisnya seperti Seni teater, seni musik, seni tari, seni rupa, seni sastra, seni film dan lain-lain.

Untuk menampung segala kegiatan tersebut terdapat beberapa bangunan yaitu: Teater Besar, Teater Arena, Teater Halaman, Teater Terbuka, Teater Tertutup, Ruang Tari Hurian Adam, Ruang Pameran, Sanggar belakang dan Sanggar Baru.

Hampir setiap bulan diadakan kegiatan kesenian berupa konser musik, tari dan drama, baik oleh rombongan kesenian Indonesia maupun rombongan kesenian asing.

Keberadaan Taman Ismail Marzuki sebagai taman dan pusat kesenian, makin memberi warna dan identitas bagi kota Jakarta sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Karena di taman ini pula, berbagai cabang seni dapat dihidupkan kembali dan dikembangkan.

Untuk mengelola segala kegiatan kesenian di taman tersebut terdapat dua lembaga yang disebut *Dewan Kesenian Jakarta* dan *Pusat Kesenian Jakarta* di samping itu terdapat satu lemb

ga pendidikan yang dinamakan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ). Lembaga ini merupakan semacam Universitas kesenian yang bertujuan untuk turut membina seniman profesional Indonesia.

2.4 Planetarium

Tempat rekreasi yang satu ini, mulanya nyaris luput dari perhatian masyarakat. Hal ini karena selain namanya yang asing, kelanjutan pembangunannya pun pernah terhenti beberapa lama. Sejak mulai didirikan pada tanggal 9 September 1964 oleh Presiden Soekarno, pembangunannya kerap mengalami hambatan, terutama di masa G.30.S PKI. Sehingga tahun 1969, barulah pembangunan Planetarium ini selesai dan dimulai beroperasi.

Planetarium adalah sebuah gedung tinggi yang berkubah, dapat memproyeksikan gambaran angkasa raya dalam ruang cembung yang sengaja dibuat mirip dengan alam semesta kita. Gedung ini terletak berdampingan dengan Pusat Kesenian Jakarta di dalam lokasi Taman Ismail Marzuki.

Setiap sore, dua kali setiap hari dan tiga kali setiap hari Minggu diadakan pertunjukan. Pengunjung yang datang bisa bervariasi dalam tingkat umur dan planetarium pun akan menyesuaikan acara-acara yang bervariasi pula, menurut tingkat daya tangkap serta imajinasi setiap orang.

Acara-acara yang disajikan di dalam ruang pertunjukan bermacam-macam seperti, mengenal dongeng tentang bintang-bintang di zaman ribuan tahun yang lalu sampai kepada galaksi-galaksi yang mengisi alam semesta ini. Benda-benda langit diperagakan secara visual; yaitu, mengenai pergerakannya, pertumbuhan bintang-bintang, gerhana matahari, gerhana bulan aurora, dan kilauan cahaya petir.

Acara-acara yang disuguhkan untuk rombongan pelajar dan guru, lebih selektif untuk membantu mereka dalam sistem dan proses belajar mengajar.

Memang dalam sistem belajar mengajar mengunjungi planetarium lebih terasa manfaatnya. Karena planetarium merupakan alat peraga yang tepat dan lengkap untuk Ilmu pengetahuan tentang alam.

Sesuai dengan tujuan pembangunan planetarium ini sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional yaitu usaha mencerdaskan bangsa, maka sejak tahun 1970-an Pemerintah DKI Jakarta berusaha untuk memberikan subsidi, dan mengadakan publikasi.

Dengan meningkatnya animo masyarakat maka penyempurnaan program dan fasilitas pun makin ditingkatkan, sehingga kegiatan makin lancar dan meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sejak tahun 1972 sampai tahun 1980-an grafik jumlah pengunjung menunjukkan angka kenaikan yang terus meningkat seperti yang terlihat pada halaman berikut.

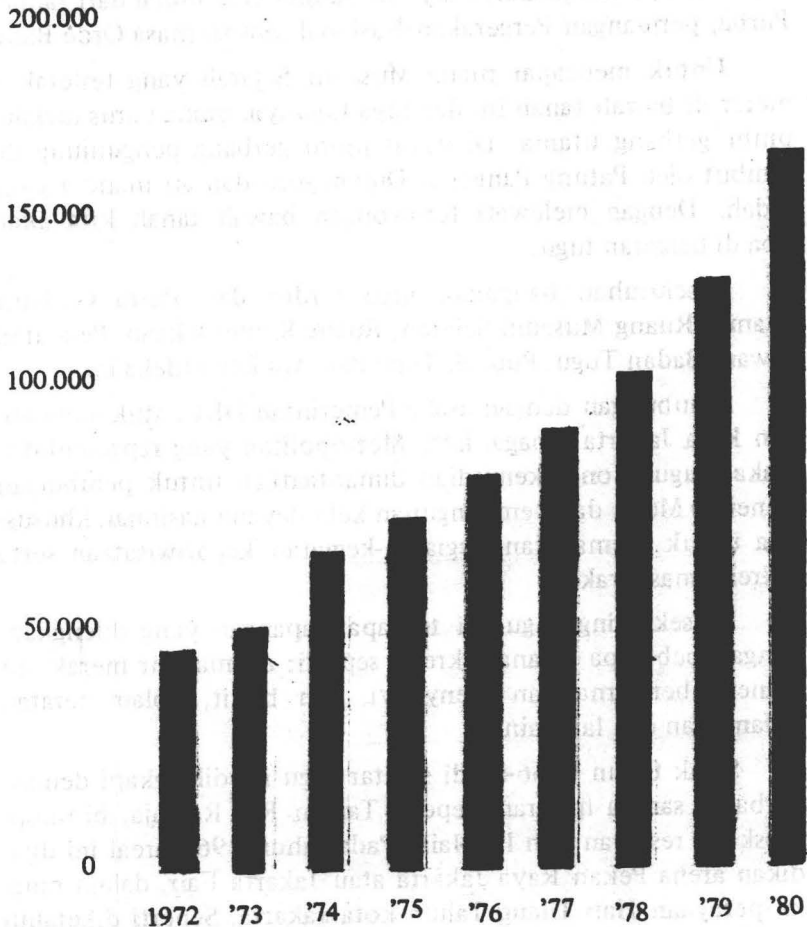
Grafik jumlah pengunjung yang terus menunjukkan adanya peningkatan itu, memberikan suatu permasalahan bagi pengurus planetarium ini. Diharapkan pengurus planetarium perlu memikirkan pengembangan ruang pertunjukannya di kemudian hari atau penambahan gedung planetarium lainnya, untuk melayani dan memenuhi kebutuhan para pengunjung dan pelajar yang semakin meningkat animonya.

Dewasa ini pengurus planetarium menyediakan pula para astronom untuk memberikan ceramah-ceramah atau penjelasan-penjelasan mengenai paket pertunjukan yang sudah pernah disuguhkan. Pada waktu pertunjukan sedang berjalan juga para astronom memberi penjelasan mengenai paket-paket yang sedang dipertunjukkan itu.

2.5 Tugu Monas (Monumen Nasional)

Bangunan arsitektur Indonesia yang monumental dan bersifat nasional ini mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1962. Monumen ini dibangun di tengah-tengah lapangan merdeka

Grafik 3.
Pertambahan Jumlah Pengunjung Planetarium Jakarta
(1912 - 1980)



Sumber: Planetarium Jakarta 1982:5

(kini lapangan Monas), sebagai lambang dan cermin jiwa perjuangan bangsa.

Tugu dengan tinggi sekitar 115 meter itu di bawahnya terdapat museum sejarah yang menyajikan adegan-adegan peristiwa sejarah dalam bentuk diorama. Dari sana para pengunjung dapat menyimak jalannya sejarah bangsa kita, mulai dari zaman Purba, perjuangan Pergerakan Nasional sampai masa Orde Baru.

Untuk mencapai ruang Museum Sejarah yang terletak 3 meter di bawah tanah itu dan juga tugunya, orang harus melalui pintu gerbang utama. Di dekat pintu gerbang pengunjung disambut oleh Patung Pangeran Diponegoro dan air mancur yang indah. Dengan melewati terowongan bawah tanah kita akan tiba di halaman tugu.

Keseluruhan bangunan tugu terdiri dari Pintu Gerbang Utama, Ruang Museum Sejarah, Ruang Kemerdekaan, Pelataran cawan, Badan Tugu, Puncak Tugu dan Api kemerdekaan.

Sehubungan dengan usaha Pemerintah DKI untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota Metropolitan yang representatif, maka Tugu Monas kemudian dimanfaatkan untuk pembinaan Generasi Muda dan pembangunan kebudayaan nasional, khususnya untuk memajukan kegiatan-kegiatan kepariwisataan serta rekreasi masyarakat.

Di sekeliling tugu ini terdapat lapangan yang dilengkapi dengan beberapa sarana rekreasi seperti: air mancur merak, air mancur berwarna dan menyanyi, jam bukit, kolam teratai, kolam ikan dan lain-lain.

Sejak tahun 1966-an di sekitar tugu ini dilengkapi dengan berbagai sarana hiburan, seperti Taman Ria Remaja, bioskop-bioskop, restoran dan lain-lain. Pada tahun 1968 areal ini dijadikan arena Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair, dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun kota Jakarta. Seperti diketahui tradisi merayakan HUT kota Jakarta ini telah dimulai sejak tahun 1957, yang berarti pada tahun 1979, kota Jakarta telah

merayakan HUT-nya itu sebanyak dua puluh kali. Di tempat ini diselenggarakan juga berbagai macam pameran yang berhubungan dengan pembangunan ibukota dan negara pada umumnya.

2.6 Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Taman ini terletak di daerah Pondok Gede Jakarta Timur. Dewasa ini setiap pengunjung yang datang ke TMII, di samping berekreasi dan bergembira para pengunjung juga akan dapat menyaksikan betapa luasnya tanah air kita yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan aneka ragam suku bangsa, adat istiadat, agama dan budaya. Semuanya merupakan suatu kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dipergakan di Taman Mini Indonesia Indah ini.

Pada mulanya TMII bernama Proyek Miniatur Indonesia Indah". Dibangun oleh Yayasan Harapan Kita yang diketuai Ibu Tien Soeharto. Gagasan untuk mendirikan taman rekreasi ini dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto pada tanggal 13 Maret 1970 dalam Rapat Pengurus Yayasan Harapan Kita di jalan Cendana no. 8 (HP, Soeradi 1986:2).

Semula pembangunan Proyek Taman Mini itu ditentukan di daerah Cempaka Putih. Hal itu telah ditetapkan dengan SK Gubernur DKI No. 1382/A/K/BKD/70 yang memberi izin pada Yayasan Harapan Kita untuk membangunnya. Namun mengingat perkembangan pembangunan kota Jakarta sebagai kota Metropolitan di kemudian hari, maka Pemerintah DKI menyarankan untuk memindahkan lokasi rencana pembangunan tersebut, Dengan demikian Taman Mini dibangun di atas lokasinya yang sekarang dengan luas areal sekitar 100 Ha.

Pembangunan Taman Mini Indonesia ini memang berskala nasional dan internasional, sehingga melibatkan unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam suatu organisasi yang rapi dan lengkap serta efektif. Yang disebut *Badan Pelaksana Pembangunan dan Persiapan Pengusahaan Proyek Miniatur*

Indonesia. Mengingat prospek Taman Mini ini di kemudian hari sebagai obyek wisata, maka pra rencana dan rencana induk pembangunan taman dikerjakan oleh Team Teknisi ITB Bandung dan tim khusus yang terdiri dari berbagai ahli (BP, Soeradi 1986:7).

Taman mulai dibangun pada bulan Juni 1972 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden pada tanggal 20 April 1975.

Ketika dibuka TMII memiliki 26 anjungan has daerah yang mewakili 26 provinsi dan lebih kurang 20 bangunan non anjungan. Baru dalam tahun 1980 dibangun anjungan Timor Timur.

Bangunan non anjungan yang telah berdiri pada waktu peresmianya adalah:

- (1) Arsipel Indonesia (peta kepulauan)
- (2) Sasana Utama (Joglo)
- (3) Tugu Api Pancasila
- (4) Sasana Kriya
- (5) Sky Lift
- (6) Kereta Api Mini
- (7) Mesjid Pangeran Diponegoro
- (8) Gereja Santa Catharina
- (9) Gereja Halleluya
- (10) Penataran Ageng Kertabumi
- (11) Aryadwipa Arama
- (12) Taman Ria Atmaja
- (13) Taman Angrek
- (14) Air terjun buatan
- (15) Borobudur mini
- (16) Sasono Adiroso
- (17) Caping Gunung
- (18) Taman Burung
- (19) Museum Komodo
- (20) Gedung Pusat Pengelolaan.

Sesudah diresmikan dan mulai berfungsi, sampai dengan tahun 1979 Taman Mini terus berkembang sesuai perkembangan kebudayaan, di samping terus melengkapinya sesuai perencanaan yang telah digariskan semula. Sehingga antara tahun 1975 sampai 1979 fasilitas rekreasi yang bertambah di Taman Mini ini adalah:

- (1) Graha Wisata Remaja
- (2) Taman Burung
- (3) Bioskop
- (4) Jam Bunga
- (5) Kereta Api kelinci
- (6) Taman Kaktus
- (7) Museum Fauna Komodo
- (8) Radio Taman Mini.

Sesudah tahun 1979, fasilitas rekreasi Taman Mini semakin bertambah. Pada tahun 1980 dibangun Museum Indonesia dan Anjungan Daerah Timor Timur dan pada masa-masa berikutnya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas rekreasi dan pendidikan massa lainnya, yaitu Taman Renang Ambar Tirta, Sasono Adiguna, Museum Perangko, Taman Apotik Hidup, Teater Keong Emas, Rumah Adat Betawi, Istana Anak-anak, Museum Transportasi dan lain-lain. Bahkan menurut rencana areal Taman Mini masih akan ditambah lagi 45 Ha (*Yayasan Harapan Kita* 1973: 315-20).

2.7 Fasilitas-fasilitas Lain

Sampai dewasa ini kota Jakarta telah memiliki Sarana-sarana rekreasi yang sangat memadai, bukan saja dapat menarik pengunjung dari dalam negeri melainkan juga para wisatawan asing dari luar negeri. Fasilitas rekreasi berkembang menjadi obyek-obyek pariwisata yang sangat mendatangkan keuntungan/devisa bagi negara dan Pemerintah DKI sendiri.

Kota Jakarta yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi, dengan rata-rata pendapatan perkapitanya di atas rata-

rata pendapatan di daerah-daerah Indonesia lainnya, ternyata merupakan daya dukung yang sangat penting bagi kelangsungan hidup Taman-taman rekreasi yang semakin bertambah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung di pusat-pusat rekreasi, terutama seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Margasatwa, Taman Ismail Marzuki, Taman Mini Indonesia Indah, Planetarium dan Tugu Monas.

Sejak tahun 1972, grafik yang dibuat, menunjukkan jumlah pengunjung yang selalu meningkat. Karena itu pula nampaknya menjadi faktor pendorong bagi para pengusaha tempat-tempat rekreasi untuk selalu membuka usaha-usaha baru dalam bidang tersebut. Sehingga fasilitas-fasilitas rekreasi terutama bagi anak-anak terus bertambah dan berkembang, di samping yang telah disediakan oleh Pemerintah DKI. Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah DKI selain sebagai fasilitas rekreasi, juga ditekankan pada segi keindahan kota. Seperti halnya pengadaan taman-taman kota, dan jalur-jalur hijau. Pengadaan jalur-jalur semacam itu memang sangat diperlukan oleh suatu kota yang berpenduduk padat seperti Jakarta ini. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah banyak tampaknya akan sangat membutuhkan adanya lebih banyak lagi tempat-tempat rekreasi sebagai pelepas lelah dan sebagai sarana untuk membangkitkan semangat baru dalam kesibukan kerja sehari-hari. Untuk maksud itu antara lain disediakan sejumlah lapangan-rekreasi-terbuka.

Lapangan terbuka yang tersedia seperti lapangan Monas dapat digunakan sebagai tempat bermain dan rekreasi, hiburan aktif maupun pasif, bagi seluruh anggota keluarga muda maupun tua. Lapangan terbuka di sini dalam bentuk dan fungsi terbagi atas:

- a. Squares atau Plaza yang bersifat menghias kota,
- b. Tanah lapang bagi anak-anak yang berumur 5 sampai 15 tahun,
- c. Lapangan olah raga bagi yang berumur 16 sampai 24 tahun,

- d. Taman-taman lingkungan,
- e. Taman-taman kota,
- f. Pemandian pantai,
- g. Park Way,
- h. Kebun-kebun bibit,
- i. Taman-taman Nasional (seperti Taman Margasatwa dan Kebun Raya) (Dinas Pertamanan DKI 1984:3).

Penting pula termasuk dalam kategori lapangan terbuka ini adalah kuburan-kuburan/terutama kuburan-kuburan kuno dan Taman Makam Pahlawan.

Pusat-pusat sport (olah raga) di kota Jakarta sampai dewasa ini, yang terbesar adalah Komplek Gelora Senayan. Akan tetapi di beberapa lingkungan kota telah berkembang pula beberapa pusat olah raga dan kesenian yang lebih kecil seperti kolam-kolam renang, stadion-stadion basket, badminton dan gelanggang-gelanggang remaja.

Fasilitas rekreasi dan pusat-pusat sport, baik dalam pola maupun penggunaannya, kadang-kadang masih digunakan secara bercampur. Fasilitas rekreasi yang bersifat lokal adalah gedung-gedung bioskop, gedung-gedung kesenian, rumah-rumah bola dan semacamnya, dapat memberi hiburan di luar jam-jam kerja. Di samping itu berkembang pula tempat-tempat rekreasi yang selain bersifat lokal juga bersifat regional seperti: Pantai Ancol, Kebon Binatang, Waduk Pluit, Situ Gintung dan Kepulauan Seribu.

Tidak ketinggalan pula fasilitas-fasilitas yang bertujuan dan bersifat pembinaan mental dan jiwa nasional, antara lain dengan adanya bangunan-bangunan tugu; monumen-monumen universitas, bangunan-bangunan ibadah, gedung-gedung atau bangunan untuk pameran, pengembangan olah raga dan sebagainya. Bangunan-bangunan tugu dan monumen yang telah dibangun antara lain:

1. Monumen Nasional (Tugu Monas) yang mulai dibangun

pada tanggal 17 Agustus 1961 dan diresmikan pada tahun 1962.

2. Monumen Gajah Mada, di halaman Markas Besar Kepolisian R.I., Patung perwujudan Gajah Mada yang mengandung nilai kebhayangkaraan ini adalah tokoh kenegaraan dan pendekar kepahlawanan bangsa, yang telah mencapai kegemilangan dan menurunkan pedoman kesatriaian bagi pejuang-pejuang bangsa, dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Patung melambangkan sosok kepolisian sebagai pengemban Tribrata dan Catur Prasetya itu diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juli 1962.
3. Patung Selamat Datang yang dibangun di depan Hotel Indonesia dalam rangka persiapan/penyambutan, penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962.
4. Patung Pembebasan Irian Barat. Patung ini terletak di tengah-tengah lapangan Banteng, dibuat pada waktu perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Barat (Irian Jaya). Patung ini mulai dibuat tahun 1962 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1963.
5. Patung Pahlawan, di taman segitiga Menteng. Di bawahnya tertulis: Bangsa yang besar adalah bangsa yang Menghargai Pahlawannya. Patung ini dewasa ini dikenal dengan Patung Petani karena ia menggambarkan dua orang pria-wanita: Pria petani menyandang senapan, sedang wanitanya sedang memberikan sepiring nasi kepada sang pria yang akan berangkat ke medan perjuangan. Patung ini diresmikan pada tahun 1963.
6. Patung Pangeran Diponegoro yang dihadiahkan oleh seorang konsul General Honorair Itali yaitu Dr. Mario Pitto pada tahun 1965. Untuk mengenang jasa dan kepahlawanan Diponegoro.
7. Patung Bahari, terdapat di halaman Markas Besar Angkatan Laut R.I. Jalan Gunung Sahari. Patung, menggambarkan seorang pelaut perkasa, berdiri memegang jangkar, melambangkan kepahlawanan dari pelaut-pelaut bangsa kita. Patung ini diresmikan tahun 1965.

8. **Patung Dirgantara.** Patung ini terletak di bunderan Jalan Gatot Subroto di depan Markas Besar Angkatan Udara. Ia melambangkan semangat manusia Indonesia dalam penerbangan di angkasa raya. Patung yang menggambarkan suatu semangat keberanian untuk menjelajah angkasa ini baru selesai akhir tahun 1966 sejak mulai dibangun pada tahun 1964.
9. **Patung Pemuda Membangun,** terletak di bunderan air mancur Senayan. Patung ini menggambarkan seorang pemuda dengan semangat yang menyala-nyala sedang berlari membawa obor. Pembuatan patung ditekankan pada ekspresi gerak dari tokoh pemuda, sehingga nampak nyata guratan-guratan urat dagingnya. Tujuan yang ingin dicapai dengan manivestasi patung ini adalah untuk mendorong semangat membangun yang pada hakekatnya harus dilakukan oleh para pemuda atau orang-orang yang berjiwa muda. Patung ini diresmikan pada bulan Maret 1972.
10. **Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya.** Monumen merupakan perwujudan tujuh Pahlawan Revolusi dalam bentuk patung yang berdiri di bawah Lambang Negara, sekaligus merupakan peringatan atas pengorbanan mereka dalam perjuangan bangsa. Monumen juga mengungkapkan fakta sejarah kekejaman teror G.30.S/PKI dan relief rangkaian ceritera peristiwa sekitar penumpasan G.30.S/PKI. Monumen ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1973. Adapun pembuatan monumen ini antara lain bertujuan untuk:
 - a. Mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan revolusi,
 - b. Mewariskan jiwa dan semangat perjuangan 45,
 - c. Menanamkan kesadaran Kesaktian Pancasila, dan
 - d. Meningkatkan kesiap-siagaan dan kewaspadaan mental idiologi (Dinas Museum DKI 1982:28-30).

Sementara itu sarana pendidikan formal maupun non formal terus tumbuh dan berkembang. Mulai dari tingkat pendid-

dikan dasar bahkan play group dan Taman Kanak-kanak sampai kepada tingkat pendidikan tinggi. Juga dengan berkembangnya lokasi-lokasi pemukiman baik sederhana maupun elite, berkembang pula fasilitas-fasilitas rekreasi dan pendidikan.

Rumah-rumah ibadah seperti Mesjid, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan sebagainya juga ikut berkembang sesuai dinamika perkembangan penduduk dan keagamaan di kota Jakarta. Di Mesjid-mesjid selain sebagai pusat peribadatan juga berkembang sebagai pusat pendidikan dan pengembangan kebudayaan Islam.

Bangunan-bangunan megah seperti, mesjid Istiqlal, Khatedral, Gereja Immanuel, Stadion dan Gelanggang Olahraga Senayan, Gedung ASEAN dan berbagai gedung lainnya merupakan kelengkapan dan menambah semaraknya kota Jakarta sebagai kota Metropolitan. Di samping bersifat pembinaan mental dan jiwa nasional.

Gereja Immanuel, Khatedral dan Mesjid Istiqlal, misalnya jelas merupakan pusat ibadah dan pembinaan mental. Akan tetapi di samping itu keberadaan bangunan-bangunan tersebut mendatangkan suatu kebanggaan tersendiri bagi penduduk kota Jakarta. Baik dilihat dari bentuk fisiknya, maupun segi historisnya.

Stadion dan komplek Gelanggang olah raga Senayan yang dibangun mulai tanggal 8 Pebruari 1960 adalah merupakan komplek olah raga termegah ketika itu di Asia dalam rangka penyelenggaraan Asian Games IV. Pesta Olahraga tersebut bukan saja telah menampilkan Indonesia dan kota Jakarta khususnya di mata dunia internasional, tetapi juga telah meninggalkan tapak sejarah yang penting bagi kota Jakarta dan Indonesia umumnya.

Boleh dikatakan berkat Asian Games IV itulah kota Jakarta dan Indonesia umumnya memiliki stasion televisi seperti sekarang. Sebab waktu itulah Ir. Rooseno menunjukkan ke-

mampuannya disamping teknisi-teknisi Jepang untuk memasang antena pemancar siaran televisi (*Bola* 1986:6). Jakarta memiliki sistem transportasi yang ramai seperti sekarang berkat Asian Games itu. Karena para pemimpin ketika itu memikirkan pula bagaimana transport yang baik mampu melayani banjir manusia yang hendak menyaksikan pesta olahraga tersebut. Asian Games IV juga telah memberikan inspirasi, dimulainya era pembangunan gedung bertingkat di ibukota negara kita ini. Awal era tersebut ditandai dengan terselesaikannya Hotel Indonesia dan Sarinah berbareng dengan selesainya kompleks gelanggang olahraga.

Gelanggang olahraga itu semula bernama Gelanggang Olahraga Bung Karno. Sejak tahun 1966 lebih dikenal dengan Gelanggang Olahraga Senayan. Komplek gelanggang olahraga ini terdiri dari berbagai arena baik untuk pertandingan maupun latihan.

Bangunan-bangunan yang termasuk gelanggang olahraga adalah Stadion Utama, Stadion Renang, Stadion Tennis, Istana Olahraga, basket hall dan perkampungan atlet yang terdiri dari Wisma Aneka I dan II, Wisma Gelora, Wisma Krida, Hotel Hasta, Hotel Asri dan gedung pusat kesehatan. Selain itu dilengkapi pula dengan sebuah taman anggrek yang belakangan ini dapat mencipta sumber dana untuk menunjang kelangsungan hidup/pemeliharaan Gelanggang olahraga.

Selanjutnya bangunan megah lainnya adalah Gedung Sekretariat Asean. Keberadaan gedung ini di kota Jakarta sehubungan dengan adanya Asosiasi negara-negara Asean di mana Indonesia adalah salah satu anggotanya. Latar belakang penempatan dan pendirian sekretariat Asean di kota Jakarta ini ditetapkan berdasarkan, persetujuan yang diadakan oleh Asosiasi itu di Bali pada bulan Pebruari 1976, dan realisasinya pada bulan Juni 1976. Mula-mula Sekretariat Asean berkedudukan di Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta. Sekretariat Asean ini dikepalai atau dipimpin oleh seorang *Sekretaris Jen-*

deral yang diangkat berdasarkan persetujuan Menteri-menteri Luar Negeri lima negara.

Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama adalah Letnan Jenderal Hartono Rekso Dharsono dan yang kedua Mr. Umarjadi Nyotowijono yang memegang jabatan ini sampai tahun 1978.

Nampaknya penempatan Sekretariat Organisasi yang ber-tingkat internasional ini di Jakarta karena adanya pengaruh Indonesia yang begitu menentukan dalam organisasi tersebut. Di samping itu dilihat dari segi regional (ASEAN) kedudukan kota Jakarta sebagai ibukota negara R.I. mempunyai arti penting. "Pendangkalan" selat Malaka dan pelayaran yang terbatas keadaan navigational safety-nya di selat tersebut memungkinkan Jakarta lebih nampak peranannya untuk hubungan antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Itulah sebabnya Jakarta dirasakan sangat tepat bagi kedudukan sekretariat dari kelima negara ASEAN.

Di samping fasilitas-fasilitas rekreasi dan pendidikan masa yang telah diutarakan, museum-museum pun adalah salah satu fasilitas rekreasi dan pendidikan masa itu. Terutama bagi para siswa dan mahasiswa serta mereka yang ingin memperdalam ilmunya dalam bidang Sejarah, Antropologi, arkeologi dan beberapa bidang ilmu sosial lainnya. Kota Jakarta dalam hal ini telah menyediakan berbagai museum yang dapat digunakan sebagai sarana informasi ilmiah di samping juga rekreasi. Museum-museum yang ada di kota Jakarta antara lain:

- a. Museum Nasional atau Gedung Gajah
- b. Museum Jayakarta
- c. Museum Fatahillah
- d. Museum Wayang
- e. Museum Prasasti
- f. Museum Tekstil
- g. Museum Satria Mandala
- h. Museum/Gedung Kebangkitan

- i. Museum/Gedung Sumpah Pemuda
- j. Museum Perangko di Taman Mini
- k. Museum Transportasi
- l. Museum Satwa Komodo
- m. Museum Indonesia dan lain-lain.

Selain itu salah satu sarana penting bagi pendidikan masa adalah dunia perbukuan. Dunia perbukuan di Indonesia ini telah dikoordinir oleh sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang penerbitan buku yang terkenal dengan nama IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). IKAPI memegang peranan yang sangat besar dalam pengembangan pendidikan dan pengetahuan masyarakat Indonesia, terutama di kota Jakarta. Melalui pameran-pameran buku yang diadakan hampir setiap tahun, IKAPI telah ikut berpartisipasi dalam proses pendidikan masyarakat.

Sejak berdirinya organisasi ini pada tanggal 17 Mei 1950, di Jakarta, ia telah berusaha membantu pemerintah dalam pengadaan buku bagi kebutuhan pendidikan. IKAPI sejak bergerak, telah berhasil menerbitkan berbagai buku meliputi berbagai aspek kehidupan bangsa.

Di kota Jakarta khususnya, organisasi ini boleh dikatakan setiap tahun mengadakan pameran buku. Pameran itu diadakan untuk mempromosikan hasil-hasil karya yang baru dari IKAPI dalam bidang perbukuan. Dampak yang sangat penting dan positif yang terlihat dari kegiatan IKAPI ini adalah kesadaran masyarakat terhadap kegunaan buku. Hal itu nampak pada setiap pameran yang diadakan. Di samping bertambahnya anggota penerbit, semakin banyak dan meningkat pula jumlah pengunjung yang datang ke arena pameran. Dan itu berarti bertambah pula jumlah buku yang terbeli, karena semakin banyaknya masyarakat kota Jakarta yang membutuhkan buku dalam berbagai cabang ilmu dan berbagai sektor kehidupan.

Sisi lain yang sangat penting dari pameran-pameran IKAPI tersebut adalah membangkitnya minat baca dari anak-anak

mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Siswa-siswa SMA. (IKAPI 1975:125). Fungsi pameran selain sebagai tempat menimba ilmu, juga merupakan pusat rekreasi yang insidental.

Demikian pula pameran-pameran dalam bidang lain misalnya, pameran seni lukis, pameran perumahan, pameran hasil industri Indonesia dan lain-lain sebagainya yang dapat merupakan pusat rekreasi yang insidental disamping juga pusat perbelanjaan.

Pameran-pameran tersebut ditunjang dengan adanya sarana penting yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Misalnya lapangan-lapangan terbuka dan bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang khusus disediakan untuk kepentingan pameran. Seperti: Arena Pekan Raya Jakarta, Lapangan Monas, Gedung Convention Hall, lobi-lobi hotel, Taman Ismail Marzuki dan Taman Mini Indonesia Indah.

Sementara itu semua kegiatan pengembangan fasilitas rekreasi yang telah dibicarakan dikelola oleh suatu badan atau asosiasi yang terkenal dengan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia disingkat PUTRI. Badan ini menghimpun seluruh usaha taman-taman rekreasi yang ada di Indonesia. Putri bergerak dalam penyediaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan taman rekreasi/objek wisata.

Akan tetapi keberadaan PUTRI di kota Jakarta, lebih menguntungkan bagi pengusaha taman-taman rekreasi di kota tersebut.

Pengembangan rekreasi di sini dapat berarti pengembangan usaha, yaitu dengan menambah jenis fasilitas rekreasi yang baru, dapat juga berarti perluasan wilayah, penambahan kegiatan ataupun peningkatan mutu kegiatan dan mutu manajemennya. Dalam hal inilah Putri dapat dikatakan memegang peranan dalam usaha membantu perencanaan pengelolaan, dan pengembangan taman-taman rekreasi tersebut.

Dalam usaha-usaha seperti itu maka titik kegiatan ditekankan pada:

- a. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan teknis petugas ke arah pencapaian efisiensi dan produktivitas kerja yang optimal secara terarah dan berkesinambungan.
- b. Mendayagunakan segenap petugas di lingkungan taman-taman rekreasi sesuai bidang keahliannya dalam rangka pemanfaatan segenap potensi yang ada.
- c. Menyelenggarakan penyegaran dan penataran.

Usaha-usaha PUTRI tersebut, memang sejalan dengan pengembangan fasilitas rekreasi yang berada di kota Jakarta. Di samping itu apa yang juga digariskan oleh pengusaha Taman-Taman Rekreasi di Jakarta adalah sangat sejalan dan seirama dengan perkembangan kota Jakarta dalam usaha perwujudan identitasnya sebagai kota wisata dan kota budaya. Usaha-usaha tersebut ditekankan pada pengembangan kegiatan seni budaya sebagai usaha memelihara, melestarikan, menghidupkan, memperkaya dan menyebarluaskan serta meningkatkan mutu dan daya guna seni budaya daerah maupun nasional selaras dengan perkembangan tata kehidupan masyarakat kota Jakarta dan bangsa Indonesia umumnya (HP., Soeradi 1986: 29).

Bersamaan dengan itu ditujukan pula pada pengembangan lingkungan dengan usaha meningkatkan kebersihan dan sistem pertamanan yang memadai serta nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R. Moh.,
1964 "Sedjarah Antjol". *Intisari*. (Februari). Jakarta, h. 49-52.
- Aryanto,
1986 "Perencanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Taman Rekreasi/Obyek Wisata". *Bulletin PUTRI* (edisi khusus). Jakarta, h. 3-17.
- Aswatini dan Mudjiani,
1986 *Profil Kependudukan DKI Jakarta. Laporan Akhir*. Jakarta: KMNKLH dan LDFEUI.
- Bianpoen,
1976 "Pola Pemukiman di Daerah Padat Penduduk di Jakarta". *Widyapura* (1-2), h. 6-39.
- BKLH DKI Jakarta dan LDFEUI,
1984 *Pola Pengendalian Tingkat Mobilitas Kependudukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1983*. Jakarta
- 1985a *Pola Pengendalian Mobilitas Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1984-1985*. Jakarta.
- 1985b *Pola Pengendalian Mobilitas Penduduk Penglaju BOTABEK-Jakarta 1984-1985*. Jakarta

- Bola (Koran Mingguan),
1986 "Tapak Sejarah Asian Games Bagi Indonesia"
(Awal September 1986). Jakarta.
- Castles, Lance,
1967 "The Ethnic Profile of Djakarta". *Indonesia*
(April), h. 153-204
- Direktorat Jenderal RTF.,
1985 "Tinjauan Selayang Pandang dari PON ke PON"
*Pedoman Operasional Siaran Khusus Pekan
Olah Raga Nasional XI*, Jakarta, h. 5-28.
- Dinas Pertamanan DKI Jakarta,
1984 *Buku Tamu 1983*. Jakarta.
- Djafar, Hasan,
1987 "Hunian-hunian Pertama di Jakarta". Makalah
dalam *Seminar Jakarta Dalam Perspektif Seja-
rah*. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia
dan DMS DKI Jakarta (8-9 Juni 1987).
- Djalak, Abdoel,
1977 "Perkembangan Penduduk Jakarta Abad 16-
20". *Widyapura* (1), h. 9-15.
- Geertz, Clifford,
1983 *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi
di Indonesia*. Jakarta: Bharata.
- Giebels, Lambert,
1986 "JABOTABEK: An Indonesian-Dutch Concept
on Metropolitan Planning of the Jakarta Re-
gion". *The Indonesian City: Studies in Urban
Development and Planning*. PJM. Nas (ed./.
Dordrecht-Holland/Cinnaminson USA: Foris
Publication.
- Gita Jaya. Lihat Pemerintah DKI Jakarta 1977b.
- Higgins, Benyamin,
1983 "Prakata" dalam Clifford Geertz 1983, h. xi-xx.
- H.P., Soeradi dkk.,
1985/1986 *Sejarah Taman Mini Indonesia Indah*. Jakarta:

- Proyek IDSN 1985/1987, Bab II (naskah belum diterbitkan).
- Hutabarat, Saur,
1986 "Pesta Meriah dari Masa ke Masa". *Tempo* (2 Agustus 1986). Jakarta, h. 17-20.
- IKAPI,
1975 *IKAPI Seperempat Abad 17 Mei 1950 – 17 Mei 1975: Buku Kenangan*. Jakarta
- Kartoyo, Azwini,
1981 "Keluarga Berencana". *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: LDFEUI, h. 161-187.
- Kartodirdjo, Sartono dkk., (eds.),
1976 *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Karya Jaya. Lihat Pemerintah DKI Jakarta 1977a.
- Koentjaraningrat,
1982 "Penduduk Indonesia". *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Koentjaraningrat (ed.). Jakarta: LP3ES.
- KSS DCI Djakarta/KSS DKI Jakarta,
1970 *Statistik Wilayah DCI Djakarta 1969*.
1980 *Statistik Wilayah DKI Jakarta 1970*.
1981 *Jakarta Dalam Angka*
1983 *Jakarta Dalam Angka*
1984 *Jakarta Dalam Angka*
- LDFEUI,
1980 *Buku Pegangan Bidang Kependudukan* (cetakan pertama). Jakarta.
1984 *Buku Pegangan Bidang Kependudukan* (cetakan kedua). Jakarta.
- Leirissa, R.Z.,
1982 "Dari Sunda Kelapa ke Jayakarta" dalam Surjomihardjo 1977c, h. 14-31.
- PDIN LIPI.,
1983 *Indeks Makalah: Konferensi, Lokakarya dan*

- Sejenisnya di Indonesia 1978–1980.* Jakarta.
- LPEM FEUI,**
 1981a *Monografi Perkembangan Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat DKI Jakarta* (Buku I dan III). Jakarta.
 1981b *Perekonomian Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menjelang Tahun 2605.* Jakarta.
- Lohanda, Mona,**
 1985 "Budaya 'Indisch' dalam Konteks Budaya Betawi". Makalah dalam *Seminar Sejarah Nasional IV*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan IDSN (16–19 Desember 1985)
 1987 "Pergeseran Pola Budaya di Batavia Masa Kolonial". Makalah dalam *Seminar Jakarta dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jakarta dan DMS DKI Jakarta (8–9 Juni 1987).
- Master Plan 1965–1985.** Lihat Pemerintah DKI Jakarta 1976.
- Naim, Mochtar,**
 1982 "Besarnya Migrasi Sukubangsa Minangkabau dan Sukubangsa-Sukubangsa Lain di Indonesia". *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Koentjaraningrat (ed.). Jakarta: LP3ES.
- Oey, Mayling,**
 1977 "Jakarta Dibangun Kaum Pendatang". *Prisma* (Mei 1977), h. 63-70.
- Ongkosongo, Otto S.R.,**
 1987 "Sejarah Penanggulan Pantai di Jakarta". Makalah dalam *Seminar Kebaharian Asean*. Jakarta: Museum Nasional (12–13 Agustus 1987).
- Pemerintah DKI Jakarta,**
 1974 *REPELITA DKI Jakarta 1974/1915 – 1978/1979.* Jakarta.
 1976 *Rencana Induk Jakarta (Master Plan 1965–1985).* Jakarta.

- 1977a *Karya Jaya: Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945-1966*. Jakarta.
- 1977b *Gita Jaya: Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*. Jakarta.
- 1979 *TEPELITA III DKI Jakarta 1979/1980 - 1983/1984*. Jakarta.
- 1981/1982 *Laporan Sektor Perumahan dan Tanah untuk Perumahan*. Jakarta.
- 1982 *Sejarah Singkat Patung-patung dan Monumen di Jakarta*. Jakarta.
- Planetarium Jakarta,
- 1982 *Bulletin Planetarium Jakarta* (no. 1 Th. 1982). Jakarta.
- Poesponegoro, Marwati Djoenod dan Noegroho Notosusanto, eds.
- 1982/1983 *Sejarah Nasional Indonesia VI^a*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan IDSN.
- 1984 *Sejarah Nasional Indonesia II^a dan III^a*. Jakarta: PN. Balai Pustaka/Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- PPPP dan BKLH DKI Jakarta,
- t.t. *Proyek Pengendalian Mobilitas Penduduk DKI Jakarta* (belum terbit).
- Rahardjo,
- 1985/1986 "Pola Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta". *Pola Pertumbuhan Penduduk Perkotaan di Beberapa Kota: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Denpasar* (vol. 1). Jakarta: KMNKLH dan LPUI, h. 1/1-36.
- Reksohadiprodjo, Sukanto,
- 1984 "Tata Guna Tanah dan Pengembangan Perkotaan". *Prisma* (no. 6, 1984), h. 14-23.
- Repelita DKI Jakarta 1974/1975 - 1978/1979. Lihat Pemerintah DKI Jakarta 1974.

- Repelita III 1979/1980 – 1983/1984. Lihat Pemerintah DKI Jakarta 1979.
- Sejarah Nasional Indonesia II⁴ dan III⁴. Lihat Poesponegoro, Marwati Djoenod dan Nugroho Notosusanto, eds. 1984.
- Sejarah Nasional Indonesia VI³. Lihat Poesponegoro, Marwati Djoenod dan Nugroho Notosusanto, eds. 1982/1983.
- Sedyawati, Edi,
1987 "Tarumanagara: Penafsiran Budaya". Makalah dalam *Diskusi Panel Menggali Kembali Sejarah Kerajaan Tarumanagara*. Jakarta: Universitas Tarumanagara (12 September 1987).
- Singarimbun, Masri,
1977 "Urbanisasi: Apakah itu Suatu Problema?". *Prisma* (Mei 1977), h. 3-11.
- Siswadi,
1982 "Perkembangan Kota Jakarta: Suatu Tinjauan Sosial Historis" dalam Surjomihardjo (ed.), 1977c, h. 32-49.
- Surjomihardjo, Abdurrachman,
1977a *Perkembangan Kota Jakarta*. Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta bersama DMS DKI Jakarta.
1977b *Pemekaran Kota Jakarta*. Jakarta: Jambatan.
1977c (ed.). *Beberapa Segi Sejarah Masyarakat-Budaya Jakarta*. Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta dan DMS DKI Jakarta.
1982 (ed.). *Beberapa Segi Sejarah Masyarakat-Budaya Jakarta* (edisi kedua). Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta dan DMS DKI Jakarta.
- Suparman, I.A.,
1986 "Perubahan Struktur Ketenaga Kerjaan di Indonesia Tahun 2005". Makalah dalam *Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV*. Jakarta: LIPI (8-12 September 1986).

- Tambunan, Rudi Parluhutan,
1985 "Pengaruh Peurbahan Jumlah Penduduk Terhadap Pola Penggunaan Tanah Jakarta Tahun 1965-1980". Disertasi Fakultas Pascasarjana Ilmu Lingkungan-Ekologi Manusia Universitas Indonesia. Jakarta.
- Taylor, Jean S.
1978 "The Social World of Batavia: A History of Mestizo Culture in Dutch Asia." Disertasi University of Wisconsin, Madison.
- Temple, Gordon,
1986 "Migrasi ke Jakarta." *Kemiskinan di Indonesia*. Kuntjoro Jakti (ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 78-91.
- ten Dam, H.
1951 "Verkenningen Rondon M'pajaran" *Indonesia* (1951), h. 190-310.
- The Liang Gie,
1958 *Sedjarah Pemerintahan Kota Djakarta*. Djakarta: Kotapradja Djakarta Raya.
- Tiga Puluh Tahun. Lihat Tirta Pustaka, P.T.
Tirta Pustaka, P.T.,
1975 *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta.
1980 *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka* (seri 1970-1975). Jakarta.
- Verstappen, H. TH.,
1953 *Jakarta Bay. A Geomorphological Study on Shoreline Development*. s' Gravenhage.
- Yayasan Harapan Kita.
1973 *Apa dan Siapa Indonesia Indah*. Jakarta.

001447.4

G3.3